

الجريمة وعلاقتها بالأسرة في منظور الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الليبي

( دراسة تحليلية مقارنة )

أطروحة علمية

مقدمة لاستيفاء بعض الشروط للحصول على درجة الدكتوراة في الشريعة والقانون

بكلية الدراسات الإسلامية جامعة سونان أمبيل

الإسلامية الحكومية



إعداد الطالب

محمد حامد محمد الأحيرش

رقم التسجيل : NIM. F43416080

كلية الدراسات العليا

جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية

سورابايا

2019م

## إقرار رسالة طالب

أنا الموقع أدناه ، وبياناتي كالاتي

الاسم بالكامل : **محمد حامد محمد الأحيرش** . رقم التسجيل : **NIM. F43416080**

أقر بأن هذه الرسالة التي حضرتها لتوفير شرط الحصول على درجة الدكتوراة في كلية الدراسات العليا قسم الشريعة والقانون بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا .

تحت عنوان : **الجريمة وعلاقتها بالأسرة في منظور الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الليبي**

( دراسة تحليليه مقارنة )

قد حضرتها وكتبتها بنفسي وما زورتها من إبداع غيري أو تأليف الآخر وإذا ادعى أحد مستقبلاً أنها من تأليفه وتبين أنها فعلاً ليست من بحثي، فأنا أتحمّل المسؤولية على ذلك ولن تكون المسؤولية على المشرف أو على كلية الدراسات العليا بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا .

حررت هذا الإقرار بناءً على رغبتي الخاصة ولم يجبرني أحد على ذلك .

الطالب المقر/ محمد حامد محمد الأحيرش

التوقيع .....

بتاريخ 11 / 2 / 2019م.

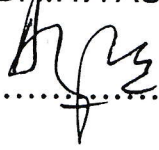
موافقة المشرفين

تمت الموافقة من طرفي المشرفين على هذه الأطروحة التي قدمها الطالب محمد  
حامد محمد الأحيرش، في سورابايا. / / 2018م

المشرف

الأستاذ الدكتور الفاضل

PROF.DR.H.YASID.MA.LLM



المشرف

الدكتور الفاضل

DR.H.M.Lathoif Ghozali.LC. MA



الاعتماد من لجنة المناقشة

تمت مناقشة هذه الأطروحة المقدمة من الطالب محمد حامد محمد الأحرش في المناقشة

المفتوحة في / / 2018 أمام لجنة المناقشة التي تتكون من:

..... (رئيساً ومناقشاً)

1. الأستاذ الدكتور حسين عزيز

..... (كاتباً ومناقشاً)

2. الدكتور أحمد إمام ماوردي

..... (مناقشاً رئيسياً)

3. الأستاذ الدكتور فيصل الحق

..... (مشرفاً ومناقشاً)

4. الأستاذ الدكتور يزيد

..... (مناقشاً رئيسياً)

5. الأستاذ الدكتور السيد عقيل حسين المنور

..... (مناقشاً رئيسياً)

6. الأستاذ الدكتور أحمد زهرا

..... (مشرفاً ومناقشاً)

7. الدكتور محمد لطائف غزالي

ووافقت اللجنة على قبول الأطروحة.

سورابايا، / / 2018م

مدير الكلية



الأستاذ الدكتور حسين عزيز الماجستير

رقم التوظيف: 195601031985031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : .....

NIM : .....

Fakultas/Jurusan : .....

E-mail address : .....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

.....  
.....  
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

( ..... )  
*nama terang dan tanda tangan*



## ABSTRAK

Mohamed Hamed Mohamed Alehirish, 2019. *Kejahatan dan hubungannya dengan keluarga menurut perspektif fiqih islam dan undang pidana Negara Libya (Studi Analisis komparatif )*, Tesis. Jurusan Syariah dan Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing I.Dr: Prof..H. Yasid.MA.MIl. II : Dr. H.M.Lathoif Ghozali. LC. MA

**Kata Kunci :** KDRT, Sanksi, Hukum Islam, Hukum Pidana Libya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan mempelajarinya secara detail, terbuka dan independen menurut sudut pandang fiqih islam dan hukum pidana Libya, dengan tujuan untuk mereview dan mengembangkan hukum ini, agar tidak bertentangan dengan hukum Islam dan menentukan kedudukan hukum keluarga Libya terhadap kejahatan tersebut. Serta untuk menyoroti dan menentukan aspek yurisprudensi dan hukum melalui beberapa kajian pada sanksi hukum yang dikenakan oleh pembuat hukum Libya untuk kejahatan tersebut dan untuk mengkomparasikan.dan Pertanyaan penelitiannya adalah :1) Bagaimana kejahatan terkait dengan keluarga dalam perspektif yurisprudensi Islam dan kuhp libya ? : 2) Bagaimana bisa hukuman untuk kejahatan ini membandingkan pendapat dengan ulama dalam hukum Islam dan kuhp libya ?

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data melalui beberapa kitab referensi hukum Libya dan ensklopedia hukum pidana Libya. Sedangkan data yang berkaitan dengan hukum islam dikumpulkan dari beberapa kitab fiqih, kemudian peneliti menganalisis data tersebut daengan cara menampilkan data pada tiap tema, menganalisis, membahasnya dari segi hukum Libya dan pernyataan serta pendapat para ulama fiqih madzhab empat, kemudian mengkomparasikan dan menarik kesimpulan dari hal tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuat hukum Libya tidak jauh berbeda dari hukum Islam dalam hal pembuatan hukum kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) beserta sanksinya, meskipun berbeda pada beberapa kasus dengan dalih menjaga hak-hak manusia, keamanan dan stabilitas mereka, dan hal itu dikarenakan tidak adanya pengembangan serta penyesuaian hukum tersebut.

Adapun kedudukan hukum keluarga Libya tidak mengulas penganiayaan salah satu anggota keluarga dan penyalahgunaan mediator dan pendidikan secara ekplisit, akan tetapi melimpahkan hal tersebut ke hukum pidana, namun dalam beberapa permasalahan dan kasus tidak dikriminalisasi dan tidak dihukum, sedangkan hal tersebut adalah alat bantu, penguat argumen dan penjelas dari kondisi keluarga yang berlaku dalam hukum pidana. Dan membantu pengadil (hakim) dalam menentukan kondisi dan kesesuain sebuah hukum terhadap kejahatan.

Kritik dari peneliti muncul ketika sebuah teori mengatakan bahwa hanya Hukum keluarga yang dapat mengatur hubungan yang muncul dari kenyataan bahwa manusia itu laki-laki atau perempuan, bahwa dia adalah suami atau duda atau absolut, atau bahwa dia penuh atau tidak lengkap, namun peneliti melihat bahwa teori ini tidak lengkap, dimana dia tidak menentukan ganjaran dan hukuman-hukuman apabila terjadi pelanggaran aturan tersebut. Peneliti menegaskan bahwa asumsi berdasarkan kriteria khusus pada saat terjadinya kejahatan ini diambil oleh KUHP Libya sebagai bukti. Oleh karena itu, teori peneliti melengkapi teori sebelumnya. Dengan demikian, teori peneliti saling melengkapi dengan teori sebelumnya. Dan bahwa kejahatan serta hukuman yang dikenakan pada mereka tidak setara menurut hukum Islam, dan tidak terbatas pada hukum keluarga saja.



## ABSTRAK

Mohamed Hamed Mohamed Alehirish, 2019. *Crime and its Relation to the Family in the Perspective of Islamic Jurisprudence and the Libyan Penal Code (Comparative analytical study)* Thesis. Sharia and Law Department, Postgraduate Program of Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya. Advisor I: Dr: Prof..H. Yasid.MA.MIl. II : Dr. H.M.Lathoif Ghozali .LC. MA.

---

**Keywords:** Domestic violence, sanction, Islamic law, Libyan Criminal Law

The study aims at find out and analyze domestic violence, and study it in detail, openly and independently based on the Islamic main fiqh and Libyan criminal law in order to review and develop the law so it will not against Islamic law and.Furthermore, it aims to monitor and determine the jurisprudence aspect and the law by studying the law sanction set by Libyan law maker and compare it with Islamic law. As following the search questions :1) How are crimes related to families in the perspective of Islamic jurisprudence and the Libyan Penal Code? : 2) How can sanctions be compared to these crimes in terms of the opinions of scholars in Islamic jurisprudence and the Libyan Penal Code?

The researcher employs a descriptive analysis method and collects the data from Libyan law reference textbooks and criminal law encyclopedia. Data related with Islamic law are from several fiqh books. Then the researcher analyzes the data by representing them on each theme and reviewing them from the perspective of Libyan law and four main ulemas. The last steps are compare and draw the conclusion from the study.

The result shows that the Libyan law maker is in accordance with Islamic law in making law on domestic violence and its sanction. However, the implementation of the law is sometimes different in some cases due to some reasons such as maintaining human rights, safety and stability. The fact is caused by the lack of development and adjustment of the law.

The Libyan family law has no explicit explanation on domestic violence and mediator misuse, and it delegates them to criminal law. However, the explanation will help to strengthen the argument and clarify the family condition in criminal law. It also help judges to determine the condition and law adjustment to a certain crime. In some cases, the suspects are not brought to trial and punished.

The criticism of the researcher arises when a theory says that only the Family Law can regulate the relationship arising from the fact that man is male or female, that he is husband or widower or absolute, or that he is full or incomplete, but the researcher sees that this theory is incomplete, where it does not specify rewards and punishments in case of violation of the rule. The researcher asserts that the assumption based on the specific criteria at the time of the crime was taken by the Libyan Criminal Code as evidence. Therefore, theorist's theory complements the previous theory. Thus, the theory of researchers complement each other with previous theories. And that the crimes and punishments imposed on them are unequal according to Islamic law, and not limited to family law alone.



## فهرس المحتويات

1	الباب الأول : الإطار العام والدراسات السابقة.....
1	أ. خلفية البحث : المقدمة .....
7	ب. مشكلة البحث.....
9	ج. أسئلة البحث.....
10	د. أهداف البحث .....
10	هـ. أهمية الموضوع .....
12	و. الدراسات السابقة .....
18	ز. حدود البحث .....
19	ح. تحديد مصطلحات البحث .....
22	ط. نظرية البحث .....
23	ي . هيكل البحث .....
25	الباب الثاني : الإطار النظري.....
27	أ. المبحث الأول / النظريات المعاصرة والمتعلقة بموضوع البحث .....
27	1_ تكامل وصلابة وتماسك الأبوين.....
28	2_ التزام الأبوين بأصول التربية السليمة وفق تعاليم الإسلام .....
	3_ استواء الوضع الاقتصادي للأسرة واعتدال حجمها.....
30	

34	4_ التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للجريمة على الأسرة .....
34	أ. التأثيرات المباشرة للجريمة على الأسرة.....
41	ب. التأثيرات الغير مباشرة للجريمة على الأسرة .....
48	5_ الأسرة ونظامها في الإسلام.....
49	أ. حماية الإسلام للأسرة .....
51	ب. التفسير النظري والإسلامي لعلاقة الأسرة بالجريمة.....
53	ب. المبحث الثاني / الطبيعة القانونية والشرعية للجريمة
53	1_ الطبيعة القانونية للجريمة .....
55	2_ الجريمة ونشأتها عند الإسلام والقانون الليبي .....
56	أ. الجريمة في القانون الليبي.....
56	ب. تاريخ نشأة الجريمة في القانون الليبي.....
58	ج. الجريمة في الإسلام .....
60	د. تاريخ نشأة الجريمة في الإسلام.....
61	هـ. أركان الجريمة من حيث الشرع والقانون.....
62	(1)_ الجريمة بحسب ركنها المادي.....
64	(2)_ الجريمة بحسب ركنها المعنوي.....
65	(3)_ الجريمة بحسب ركنها الشرعي.....
66	(4)_ الجريمة في الفقه الإسلامي.....

66	و. مدى سلطة ولي الأمر في التجريم عند جمهور فقهاء .....
71	ج. المبحث الثالث / العقوبة الشرعية عند الفقهاء والأسس التي تحكمها .....
71	1_ العقوبة الشرعية في الاصطلاح الفقهي .....
72	2_ الغاية من العقوبة عند الفقه الإسلامي .....
74	3_ أنواع العقوبة الشرعية .....
77	4_ الأسس التي تحكم العقوبة الشرعية وشروطها .....
81	5_ الظروف المشددة والمخففة للعقوبات عند الإسلام والقانون الليبي .....
81	أ. الظروف المشددة والمخففة للعقوبات عند الإسلام .....
89	ب. الظروف المشددة والمخففة للعقوبات في القانون الليبي .....
94	6_ السلطة التقديرية للقاضي في تقدير العقوبات وفق القانون الليبي .....
96	الباب الثالث : منهج البحث .....
96	أ. نوع البحث ومنهجه .....
101	ب. مصادر جمع البيانات .....
106	ج. أدوات جمع البيانات .....
106	د. أسلوب جمع وتحليل البيانات .....
108	هـ. الخطوات المتعلقة بمنهج الكتابة .....
110	الباب الرابع : عرض البيانات وتحليلها .....
110	أ. المبحث الأول / جرائم الأسر في منظور قانون العقوبات الليبي والفقه الإسلامي .....



- أ. جدول مقارنة لمحل تلك العقوبات بين القانون الليبي والفقهاء الإسلاميين ..... 187
- ب. مناقشة الباحث للتحليل والنقد لتلك العقوبات ..... 188
- 3\_ عقوبة جرائم سوء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية عند القانون الليبي ..... 191
- 4\_ عقوبة جرائم سوء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية عند الفقهاء الإسلاميين ..... 196
- أ. جدول مقارنة لمحل تلك العقوبات بين القانون الليبي والفقهاء الإسلاميين ..... 201
- ب. مناقشة الباحث للتحليل والنقد لتلك العقوبات ..... 201
- 5\_ عقوبة جرائم إساءة معاملة أفراد الأسرة بين القانون الليبي والفقهاء الإسلاميين ..... 203
- 6\_ آراء العلماء والمفكرين في مسألة العقوبة في تلك الجرائم ..... 208
- الباب الخامس : النتائج والتوصيات** ..... 212
- أ. نتائج البحث ..... 212
- ب. النظرية المترتبة على النتيجة ..... 215
- ج. التوصيات ..... 218
- د. قائمة المصادر والمراجع ..... 220
- هـ. ملحق البحث : بعض الأحكام الصادرة عن محكمة سبها الجزئية ..... A
- و. السيرة الذاتية للباحث ..... L





















2\_ لما كان فقه العقوبات في الجرائم هو الحامي لحياة الفرد والجماعة فيما يتعلق بأبدانهم، وأعراضهم، وأنسابهم، وأموالهم، وعقولهم، ودينهم، واستقرارهم، وأمنهم، اشتدت حاجة الناس إلى معرفة أحكامه حتى يكونوا على بينة من أمرهم فيما يتعلق بحفظ هذه الضرورات، ويرى الباحث بأن الأسس التي يقوم عليه النظام الإسلامي كفيلة بأن تقضي على العيوب التي تصاحب العقوبة الوضعية، كما هي كفيلة بأن توفر المجهودات التي تبذل لتخفيف أضرار هذه العقوبات والأموال الكثيرة التي تنفق في سبيل تنفيذها، وتظهر المشكلة الرئيسية هنا في العقوبات التعسفية التي لم يراعى فيها القانون الليبي المعايير الخاصة عند الحكم فيها، ولم يجعل للقاضي مرجع أساسي له في الحكم فيها، الا بتحديد حالة الجاني وقت ارتكاب الجريمة والوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، وبذلك يظن الباحث ويعتقد بأن العقوبات من الأحكام التي لا تقبل السلطه التقديرية للقاضي في تحديدها وتطبيقها، وإنما بوجوب تحديد نصوص صريحه لكل جريمة فيها بما لا يتخالف مع الشريعة الإسلامية.

على هذا الأساس سيسرد الباحث رسالته في تلك الجرائم المتعلقة بالأسر، وتوضيح العقوبات التي سنها المشرع الليبي لها، ومقارنتها بما جاء في الفقه الإسلامي من حيث نوع الجرائم والعقوبات المفروضة عليها .

### ج. أسئلة البحث

1. كيف تكون الجرائم المرتبطة بالأسر في منظور الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الليبي ؟

2. كيف تكون عقوبات تلك الجرائم مقارنةً بين آراء الفقهاء في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الليبي ؟





يتمنى من الله أن يوفق من قرء هذه الرسالة وعمل على أن يأخذ الجوانب الإيجابية فيها، بحيث يتم الاستفادة منها.

ب\_ أن هذا البحث هو مساهمة للتعرف على أحكام قانون العقوبات الليبي في هذه الجرائم ومن ثم مقارنتها بالشريعة الإسلامية، بحيث تكون الأسر بدراية كاملة على ما يدور حولها من جرائم داخلية على كيانها وأسبابها وعواملها والآثار القانونية المترتبة عليها عند الشريعة والقانون الليبي.

ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة كونها محاولة لتحديد حجم ونمط أهم جرائم والعقوبات المترتبة عليها.

## 2\_ الأهمية التطبيقية للموضوع :

أ\_ يأمل الباحث من ناحية تطبيقية أن يلفت انتباه المسؤولين عن الأجهزة القضائية والتنظيمات الحقوقية والمؤسسات العلمية في الدولة الليبية وأن يقدم لهم دراسة مخصصة في هذه الجرائم تحليلاً وتفصيلاً وتطويراً ومعالجتها للقصور التي شابها قانون العقوبات الليبي، ومن ثم المساهمة في تطوير وتقنين معايير جديدة، تفصل القانون بشكل دقيق، وبما يتماشى مع الشريعة الإسلامية بشكل عام.

ب\_ من ناحية تطبيقية أيضاً فإن الباحث يأمل من خلال هذه الدراسة أن يلفت انتباه الأسر والمقبلين على الزواج إلى أن هناك أفعال وسلوكيات صنفها المشرع الليبي إلى جرائم جنائية ترتكب داخل الأسر ضد الآخرين بطرق مادية ومعنوية يجب الانتباه لها وبذلك تكون هناك ضوابط قانونية وقضائية وشرعية في التعامل والحكم على مرتكبيها إذا ما تمت ارتكاب هذه الأفعال في ظل مجتمع يسوده قانون يحمي الأمن والاستقرار وتحكمه العادات والتقاليد.





4\_ ( الجرائم الواقعة على الأسرة ) تناول هذا الكتاب الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حقوق الأولاد والتمثلة في حق الرعاية والعناية والحماية وضمن وسائل الصحة والحياة والتربية الخلقية وأسباب تحقيق الأمن والاستقرار داخل الأسر، وكيفية ضمان أسرة قوية متماسكة .<sup>22</sup>

حيث لم يتطرق الكاتب الى القانون الليبي بشكل خاص في مسألة تلك الجرائم الواقعة على الأسر، ويظهر الفرق بين الدراسة التي قام بها الباحث والدراسة التي كتب فيها الكاتب في كون أن كل منهما جرائم واقعة على الأسر، غير أن الباحث أعتمد في رسالته على القانون الليبي من حيث استنباط وتحليل تلك الجرائم، وتحديد العقوبات المعنية فيها، وحيث أكتفي الكتاب بتحديد الجرائم فقط وتحليلها، دون النظر الى العقوبات المفروضة عليها، وهذا ما قام الباحث بالبحث فيه، والذي رأى بأن رسالته مكملة للكتاب الذي لم يحدد فيه العقوبات المعنية لكل جريمة واقعه داخل كيان الأسر.

5\_ ( الوسيط في أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي والتقنيات العربية المعاصرة ) حاول الكاتب في هذا الكتاب بيان أحكام الزواج في الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه واستعرض القوانين المعمول بها في بعض الدول العربية، مثل القانون المصري والسوداني والليبي والسوري، وبالوقوف على القانون الليبي الذي تطرق له الكاتب بشكل عام من خلال الأخذ بالاجتهادات الفقهية التي لم تقف عند الحكم الفقهي فقط، وإنما وقفت ووصلت الى ابراز آداب الإسلام في الحياة الزوجية، واستيفاء الحقوق والوفاء، بما يتحقق به المودة والرحمة، دون النظر الى الأحكام الجزائية من حيث الجزاءات المفروضة في مخالفة نظام تلك الاحكام .<sup>23</sup>

يظهر الفرق في أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الدراسة والدراسة التي سيبحث فيها الباحث كون أن هذه الدراسة مكملة من حيث إثبات بعض النظريات، لتحقيق

22 سعد عبد العزيز، الجرائم الواقعة على الأسرة ( تونس : الدار التونسية، ط2، بدون تاريخ نشر ) 39-40 .

23 أحمد الغزالي، الوسيط في أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي والتقنيات العربية المعاصرة، الجزء1 ( مصر : دار النهضة العربية، 1999م ) المقدمة وما يليها .











يجد الباحث أن جميع الدراسات السابقة تكلمت عن دور الأسرة في التصدي للجرائم ولم تتطرق على دراسة تلك الجرائم من حيث الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الليبي ونجد أن بعض الدراسات لم تكن العينة فيها متمثلة لمجتمع الدراسة، فمثلاً مدبولي اعتمد في دراسته على البيانات المتوفرة في ملفات الأحداث خلال الفترة 1392هـ، إلى 1400هـ، كذلك نجد أن عنوان دراسته هو تطور ملامح جناح الأحداث في المملكة العربية السعودية و أن دراسته اقتصرت على مدينة الرياض، وفيما يتعلق بأداة الدراسة التي استخدمها نجد قد استخدم أسلوب تحليل المضمون من واقع ملفات الأحداث كأداة رئيسية في البحث وكان الأجدى أن يختار عينة من مجتمع الدراسة ومن ثم استخدم الاستبانة أو المقابلة وذلك بهدف الوصول إلى دراسة علمية دقيقة، وكذلك نرى أن بعض الدراسات أهملت تحديد بعض مفاهيم الدراسة الرئيسية، وانفقت نتائج الدراسات على أن معظم الأسر من حيث الزوج والزوجة والأبناء المرتكبون للجرائم ينتمون إلى أسر مفككة.

#### ز. حدود البحث

يتحدد نطاق الدراسة في هذا البحث بالوقوف على الجرائم الأسرية عند قانون العقوبات الليبي " الجرائم العامة " لسنة 1953 ميلادي بتاريخ 23/ 9 الموافق 14 محرم 1373 هجري، في المواد التي سنها المشرع في الباب الثاني الفصل الأول منه وتحليلها وتفصيلها والوقوف على العقوبات المفروضة لها ما إذا ثم ارتكاب تلك الجرائم، ومن ثم مقارنتها بالفقه الإسلامي " المذاهب الأربعة " وبيان موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي منها لسنة 1393 هجري، الصادر بتاريخ 19 رجب الموافق 19 أبريل 1984 ميلادي، وتعديلاته لسنة 1403 هجري، الصادرة بتاريخ 17 شعبان الموافق 29 أي النار لسنة 1993 ميلادي، و بما جاءت بها الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم تطبيقاً لقوله تعالى ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ .<sup>29</sup>

29 سورة الانعام - الآية : 38





### 3\_ الجريمة في منظور قانون العقوبات الليبي

كل جريمة في رأي قانون العقوبات الليبي يكون في مقابلها عقوبة وبالعقوبة تتميز قواعد هذا القانون عن غيره من القوانين الأخرى، سواء المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأسر أو غيرها، إلا أن قانون العقوبات يشمل علاوة على الجرائم و العقوبات مجموعة من القواعد العامة التي تحكمها ضمن إطار مشترك مثل مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات التي يقرر فيها مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة فيه إلا بنص " وبالتالي يحدد لنا عناصر وأركان كل جريمة، من حيث مبادئ المسؤولية الجزائية، وأسباب الإباحة فيها، وموانع العقاب لها، وسريانها من حيث المكان و الزمان، كما يشمل هذا القانون أيضا على جميع التشريعات الجزائية "العقابية" الخاصة و المكملة له سواء كانت المتعلقة بالأسر أو غيرها، ويشير الباحث أخيرا إلى أن هذا القانون مقصور فقط على القواعد الموضوعية دون القواعد الشكلية أو الإجرائية .<sup>32</sup>

### 4\_ العقوبات المعنية في هذه الأطروحة

يقصد الباحث بكلمة عقوباتها في هذه الأطروحة، العقوبات الخاصة التي فرضها القانون الليبي، والتي يطبقها القضاء عن طريق محاكمة على من ثبت مسؤوليته عن الجريمة، أي بذلك يعتبر بأن أي أذى أو أثر قانوني يلحق به مقابل ما حققه من سلوك إجرامي أضربه أو هدد بالضرر مصالح يحميها القانون عقاباً له لجزره

32 فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات ( مصر : دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، 2001م ) 9 . قانون العقوبات الليبي هو قانون الجرائم العامة لسنة 1953م، الصادر بتاريخ 23 / 9 الموافق 14 محرم 1373هـ، فيكون خير دليل لتوضيح ما ذكره الباحث آنفاً، فيضم هذا الأخير الجرائم والعقوبات المقررة لها، وكما أن المجتمع يكافح الجريمة بعدة وسائل أبرزها قانون العقوبات، وهو بذلك يشمل على عدة قواعد تحدد للأفراد السلوك الواجب والسلوك المخطور ويترتب على مخالفتها جزاءً معيناً، وأهم ما تختص به القاعدة الجنائية هو الجزاء الذي يتمثل في العقوبة غالباً والعقوبة هي نوع من المعاناة تفرضه الدولة على من ينتهك هذه القواعد ، تتمثل في تجريد الشخص من بعض الحقوق والمزايا، ويتم ذلك عن طريق السلطة القضائية، وباستخدام الدعوى الجنائية، وهو من فروع القانون العام، لأنه يحمي حقاً عاماً، وقد يلتبس الأمر عندما تقع الجريمة على أحد من الأفراد في حياته أو بدنه أو ماله، وينجلي الالتباس بأن الحماية الجنائية إنما تنصب أساساً على حق المجتمع في صيانة حياة الأفراد وسلامتهم وصيانة أموالهم، وأي اعتداء على أيّ من ذلك يعتبر اعتداءً على المجتمع نفسه.

وردعه، وبذلك لا تتال الا على من ارتكب جريمة أو ساهم في ارتكابها ولا تمتد إلى غيره ممن لم يساهم فيها من أفراد الأسرة أو ورثتهم<sup>33</sup>.

## ط. نظرية البحث

سيستند الباحث على النظرية القائلة بأن قانون الأحوال الشخصية هو وحده دون غيره، من ينظم العلاقات التي تنشأ عن كون الإنسان ذكر أو أنثى، أو كونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عدم درايته بالقانون، ويكون ذلك بالاستناد على المقومات الرئيسية للأسرة ومراعاة معاييرها المتمثلة في تكامل الأبوين والتزامهما بأصول التربية السليمة ومراعاة الوضع الاقتصادي لهما.<sup>34</sup>

غير أن الباحث يظن ويعتقد بأن هذه النظرية ناقصة، أو بمعنى غير كاملة الأهلية وتحتاج للإتمام، حيث لم يحدد فيها ماهية تلك الجرائم ومن هو المسؤول عن الجزاءات والعقوبات في حالة ما اذا تم مخالفة هذا القانون، ويرى الباحث بأن هذه النظرية اعتمدت على المسائل التنظيمية فقط، ولم تحمي الأسرة جنائياً، وإذا ما تأمل القارئ في الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات الليبي والمتعلقة بالأسر والمتمثلة في جريمة التقصير في القيام بالواجبات العائلية، وجريمة سوء إستعمال وسائل الإصلاح والتربية، وجريمة إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال، لتبين له بأنها جرائم

33 محمد رمضان باره، الأحكام العامة للعقوبة والتدابير الوقائية قانون العقوبات الليبي القسم العام، الجزء 2 ( ليبيا : طرابلس، ط1، 2010م ) 1. وما بعدها ومن ذلك نصت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة 1948م، على أن العقوبات تكون شخصية وتناسب مع جسامة الجريمة ، ولا يعتبر إخلالاً بمبدأ شخصية العقوبة تأثر أسرة المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو غيرهم ممن لهم علاقة معينة به نتيجة لتقيد العقوبة عليه ، كحبس الجاني وحرمان أسرته من مقابل عمله أو تغريمه بمبالغ مالية وما يترتب على ذلك من أضرار بدمته المالية، ومنه قوله تعالى ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴾ سورة الحشر - الآية : 17. ينظر محمد بن مكرم بن منظور الأفرريقي المصري، لسان العرب، الجزء 5 ( بيروت : دار صادر، ط1، بدون تاريخ نشر ) 619 .

34 النظرية لإحمد محمود خليل، الوسيط في تشريعات محاكم الأسرة للمسلمين وغير المسلمين ( مصر : المكتب الجامعي الحديث 2008م ) 5 .



تدخل تحت قانون الأحوال الشخصية لأنها تختص بأحوال الناشئين، غير أن قانون العقوبات الليبي جعل من تلك الجرائم جرائم جنائية داخلية تحت بنوده ومواده من حيث التنظيم والجزاءات المفروضة عليها، ولهذا السبب سيكمل الباحث تلك النظرية الأولى، ومن خلال ذلك سيعمل الباحث على الأخذ بالجرائم والعقوبات المفروضة عليها، والأخذ بالافتراضيات المبنية على المعايير الخاصة سواء كانت قانونية منها أو اجتماعية أو فقهية عند وقوع تلك الجرائم، وبذلك سيستند الباحث على أقوال الفقهاء في التحليل كون تلك الجرائم يأخذ بها قانون العقوبات الليبي كدليل لعدم مخالفة أحكامه للشريعة الإسلامية ولو تعددة أسباب فاعلها.

#### ي . هيكل البحث

بعدما قام الباحث بالتفكير والتأني والاطلاع، وصل الباحث إلى أن متطلبات الدراسة العلمية وطبيعة هذا الموضوع والغرض من بحثه تجعل من المناسب أن تكون الدراسة على النحو التالي : في الباب الأول تطرق الباحث في خلفية البحث عن موضوعه بشكل دقيق شارحاً ومفصلاً له، من حيث الجريمة وكونها عامل مهم لهذه الدراسة، ومن ثم إعطاء مفهوم عام عن الأسرة وصلتها بالجريمة من حيث العوامل المؤثرة فيها دون التطرق إلى العقوبات والجزاءات التي فرضتها الشريعة الإسلامية لها، ومن ثم التطرق لمشكلة البحث وأسئلته وأهدافه وأهميته النظرية والتطبيقية ومن ثم الدراسات السابقة المتعلقة به وحدوده ومصطلحاته المهمة.

أما عن الباب الثاني في الإطار النظري : تطرق الباحث فيه إلى الجانب النظري وجمع شتات الموضوع من جميع جوانبه، وتطرق الباحث فيه بدايةً بالتعريف بالنظريات القانونية والفقهية، ومن ثم التركيز على ثلاثة مقومات أساسية تركز عليها الأطروحة، متمثلة في مدى تكامل وصلابة وتماسك الأبوين، والتزامهما بأصول التربية السليمة وفق الإسلام، واستواء الوضع الاقتصادي للأسرة واعتدال حجمها، ثم



تناول الباحث بعض التأثيرات المباشرة والغير مباشرة للجريمة على الأسرة والتي من المحتمل أن تكون لها الدور الرئيسي في بيان أهم المعطيات الخاصة بموضوع الأطروحة، ومن ثم تناول الباحث الكيفية المتبعة لنظام الأسرة في الإسلام وكيفية حماية الإسلام لها، ومن ثم تفسير العلاقة بينها وبين الجريمة من جهة نظرية، وبينها وبين الجريمة من جهة إسلامية، ومن ثم تطرق الباحث الى الطبيعة القانونية للجريمة ومفهومها العام ومن ثم نشأتها وتاريخها وأركانها، ومن ثم تناول الباحث العقوبات بمفهومها عند فقهاء المذاهب الأربعة وأنواعها والأسس التي تحكمها وشروطها وأقسامها، و الظروف المشددة والمخففة لها وبيان مدى السلطة التقديرية للقاضي في تحديدها وأيضاً سلطته بوقف تنفيذها.

أما عن الباب الثالث في منهج البحث : حيث اشتمل على التعريف بالمنهج المستخدم في هذه الأطروحة وهو المنهج الوصفي التحليلي، ويشتمل أيضاً على مصادر جمع البيانات والتي قسمها الباحث إلى مصادر أولية أصلية ومصادر ثانوية تبعية، كما شمل هذا الباب على أدوات جمع البيانات والأسلوب المتبع فيها والكيفية التي سيكون عليها التحليل ومن ثم هيكل البحث.

أما عن الباب الرابع في تحليل البيانات : عرض فيه الباحث بناء على ما تحصل عليه من بيانات ومن ثم صنفها وحللها تحليلاً مفصلاً، وقام فيه الباحث بعرض المواد القانونية اللازمة من خلال ما جمع من معلومات، ومن ثم قارن تلك البيانات بما جاء عند فقهاء الإسلام للوصول الى نتائج مفيدة والتي كانت في رأي الباحث نتائج جديدة و داعمة الى نظريات سابقة، ومن ثم سرد الباحث تلك النتائج في الباب الخامس والأخير المتعلق بالخاتمة والتوصيات.



وبذلك تجمعها وحدة موضوعية متجانسة، حيث يعرفها الشيخ مصطفى أحمد الزرقا :  
بأنها تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاماً حقوقياً  
موضوعياً منبثاً في الفقه الإسلامي، وذلك كفكرة الأهلية وأنواعها وعوارضها، إلى  
غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكاملة.<sup>37</sup>

ويعرفها الدكتور وهبة الزحيلي: بأنها المفهوم العام الذي يؤلف نظاماً حقوقياً  
موضوعياً تنطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة، كمنظريّة الحق،  
ونظريّة الملكية.<sup>38</sup>

ويعرفها الدكتور جمال الدين عطية بأنها: التصور المجرد الجامع للقواعد العامة  
الضابطة للأحكام الفرعية الجزئية.<sup>39</sup>

حيث تجدر الإشارة إلى أن التفسير النظري والإسلامي لعلاقة الأسرة بالجريمة يكون  
في الغالب من أسر تتسم بعدد من الخصائص، مثل كثرة التنقل الاجتماعي، وغياب  
أحد الوالدين بسبب الانفصال أو الوفاة أو السجن، وأيضا ممارسة الآباء لبعض  
الأفعال الانحرافية والعادات السيئة كالسكر أو الإدمان، أو ضعف في الرقابة الأسرية  
وسوء القدوة، الا غير أن تأثير تلك العوامل تباينت من أسرة الى أسرة، وكان أقوى  
تأثير لها على ابناء الأسر العريقة من خلال تمثل هذه الثقافة الانحرافية خلال  
عمليات التنشئة الاجتماعية التي تمارسها هذه الأسر، وأن الأولاد الذين ينشؤون في  
أسر منحرفة يكتسبون الاستعداد للانحراف، من الاقتداء بأبائهم أو ضعف التوجيه  
والأشراف، أو نتيجة للعاملين معا.<sup>40</sup>

37 مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، الجزء 1 ( دمشق : دار القلم، 1418 هـ ) 235 . ( المتوفى 1420 هـ )

38 وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء 4 ( دمشق : دار الفكر، 1984 م ) 7 . ( المتوفى 1436 هـ )

39 جمال الدين عطية، التنظير الفقهي، الجزء 1 ( الدوحة : مكتبة الإسكندرية، ط 1، 1407 هـ، 1987 م ) 9 .

40 محمد بن إبراهيم السيف، الظاهرة الإجرامية في ثقافة وبناء المجتمع السعودي، 64 . وما بعدها .









في هذا جاء الإسلام بوجوب النفقة، والأصل في وجوب النفقة على الولد من الكتاب والسنة، يقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ ﴾<sup>46</sup> . وقال تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾<sup>47</sup> .

وأما من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ل هند بنت عتبة (( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ))<sup>48</sup> .

فهذه النصوص الشرعية وفق الإسلام تدل على وجوب أن ينفق الرجل على أهل بيته والقيام بمصالحهم، فلا يجوز للوالد التقصير في النفقة على الأولاد ولا تضييعها، بل يلزمه القيام بها على الوجه الأكمل.

أيضاً قد يعاني الأبناء على عكس ذلك شعوراً زائداً بالثقة، فتتجه إرادتهم نحو الجريمة، وهذا يكون نتيجة إفراط بعض الآباء في تدليلهم ورضوخهم لنزواتهم وتلبية كل رغباتهم سواء كانت معقولة أو حمقاء<sup>49</sup> .

إذا كانت التربية السليمة في الإسلام هي حجر الإنسان في تكوين الشخصية القوية، فإن التربية الخاطئة هي حجر الأساس في تكوين الشخصية الخاطئة<sup>50</sup> .

### 3\_ استواء الوضع الاقتصادي للأسرة واعتدال حجمها

أما عن الوضع الاقتصادي للأسرة فله بعض الخطر، غير أنه أقل شأنًا من سواه فليس من اللازم أن تتمتع الأسرة بدرجة من الرخاء لكي تكون سوية، وحسبها أن

46 سورة الطلاق - الآية : 16

47 سورة البقرة - الآية : 223

48 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب النفقات، رقم الحديث 5370 ( دمشق : دار الريان للتراث، 1407هـ، 1986م ) 418 .

49 محمد عبدالله الوريكات، أصول علمي الأجرام والعقاب، 239 . وما بعدها، كما أشار إليها. فتوح عبدا لله الشاذلي، أساسيات علم الأجرام والعقاب ( مصر : منشأة المعارف بالإسكندرية ) 275-276 .

50 مجلة الأمن والقانون مكتبة اليونيسكو، العدد 2 ( ليبيا : طرابلس، 2004م ) 37 .









الاجتماعية الأولى التي لها تأثير مباشر وقوي على اتجاهات الفرد وتنشئته التنشئة الصحيحة، إذ عن طريقها يكتسب الفرد خبراته وتجاربه الأولى، وهي التي ترسخ لديه عادات وتقاليد مجتمعه وفكرة الخطاء والصواب، أما وعندما تصاب الأسرة بالتصدع بنوعيه وخاصة المادي منه، فإنها قد لا تكون قادره على تنشئة أبنائها التنشئة الصحيحة، مما يدفع بهم في الصغر إلى الانحراف، وفي الكبر الى الجريمة .<sup>59</sup>

مع ذلك يرى الباحث ومن خلال اطلاعه على الإحصائيات المعاصرة فإن عدد المجرمين الذين يمكن القول بأنهم قد تلقوا تكويناً إجرامياً مباشراً عن طريق الأسرة قليل، الا إذا حرض الأب ابنه بشكل مباشر على الفسق والفجور والتسول والسرقة نظراً للظروف الاقتصادية، وفي الغالب أن الأسرة تؤثر في إجرام الطفل بطرق غير مباشرة ولكن لا نستطيع أن ننسى تلك الطرق المباشرة التي تعتبر في مضمونها أشياء معنوية التي من الغير الممكن الإحساس بها أو الانتباه عليها الا بشكل معنوي تأتي مع مرور الزمن كهيئة نتيجة لما قرأ الطفل، وبما تعلم وبما أكتسب من خبرات وبما رأى من تصرفات داخل أسرته أو المجتمع من حوله سواء إن كان كامل الأهلية أو ناقصها، غير أن هذا العامل مبناه الرجحان وليس التأكيد.

غير أن من المحتمل أن يكون التعليم له دور مؤثر على الأسرة من حيث الجريمة، فيعد التعليم .<sup>60</sup> من أهم العناصر التي تكون البيئة الثقافية للمجتمع، ومنذ القدم

59 فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، 350 .

60 محمد عبد الله الوريكات، أصول علمي الإجرام والعقاب، 199 . وينظر. عوض محمد مبدئ علم الاجرام والعقاب، 150 . ويعني الباحث بالتعليم هنا هو تلقين المعرفة بأي وسيلة، أو هو تلقينها بوسيله مخصوصه وهي القراءة والكتابة. وقد غلبت هذه الوسيلة في تعريف التعليم حتى غدت مرادفا له . ولذلك ينصرف معنى التعليم في لغة العصر إلى معرفة القراءة والكتابة ، فهو في إفهام الناس نقيض الأمية . ومن الباحثين مع ذلك من يعطي التعليم مفهوما أرحب يتجاوز مجرد لإلمام بالقراءة والكتابة ويتسع لمعنى التهذيب والتمسك بالمثل العليا . غير أن هذه النظرة لا تتفق مع اصطلاحات العصر فالتعليم في مفهومه لا يعني تربية النفس بحكم اللزوم وإن كان المهتمون بشؤون التعليم يحرصون مع ذلك كل الحرص على الربط بينه وبين التربية .































وخاصة عندما تنتضخ المنافع الناجمة عنها، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى ﴿ كَلَّا  
بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ .<sup>83</sup>

إذا كانت ممارسة الشعائر الدينية لا تصلح في ذاتها مقياساً لمدى التدين، فإن مجرد انتماء الشخص إلى دين لا يصلح مقياساً لذلك من باب أولى، إذ ليس ثمة تلازم بين الانتماء ودرجة التدين، ولذلك فالمقارنة بين أثر العقائد الدينية المختلفة على الإجماع لا يمكن أن تسفر عن نتائج يوثق بها إذا اعتمد الباحث فيها على المقارنة بين إجماع المنتمين إلى تلك العقائد، لأن مجرد الانتماء إلى دين أو مذهب لا يحدد دائماً سلوك المنتمي ولا يحكم بالضرورة كل أفعاله.

حيث إن بعض الدراسات بينت أن مشاكل الشباب خاصة ترجع إلى ضعف الالتزام الديني ومن هنا يمكن القول بأن الدين له أثر كبير في مقاومة الإجماع باعتباره داعياً إلى مغالبة شهوات النفس وكبح جماحها، كل ما هنالك أن هذا الأثر مرهون بمدى تدين الفرد والتدين هنا أمر باطني لا سبيل إلى تلمسه أو قياسه.<sup>84</sup>

## 5\_ الأسرة ونظامها في الإسلام

في هذا المبحث سيتكلم الباحث عن الأسرة والإسلام وحقائقها وتأملاتها من القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه وتعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ .<sup>85</sup>

في الآية الكريمة خطاب للناس بصفاتهم، ولردهم جميعاً إلى ربهم الذي خلقهم من نفس واحدة وجعل فيهم أزواج وأبناء، حيث أن هذه الحقائق الفطرية البسيطة هي

83 سورة المطففين - الآية : 14

84 عبد السلام سالم الغرياني، علم الإجماع الاجتماعي ( ليبيا : دار الفكر طرابلس، ط1، بدون تاريخ نشر ) 194 .

85 سورة النساء - الآية : 1









## ب. المبحث الثاني / الطبيعة القانونية والشرعية للجريمة نشأتها ماهيتها أركانها

على الرغم من أن كتابات الفقهاء والباحثين بشأن الطبيعة القانونية للجريمة هي من القلة، وحيث أن التناثر بين المواضيع الجنائية المختلفة فيها غير واضحة، بالتالي فهي لا توضح هذا الموضوع بالدقة المطلوبة لإيضاحه وتبيان تفاصيله المهمة التي تختلف عن مواضيع أخرى، والتي من شأنها أن يختلط معها التكيف القانوني للجريمة، وعلى ذلك لا بد من التعرف على ماهية الطبيعة القانونية من خلال التطرق إلى تعريف الطبيعة القانونية للجريمة ورأي الفقه الإسلامي فيها.

### 1\_ الطبيعة القانونية للجريمة

تعرف الطبيعة القانونية للجريمة بأنها وسيلة لتحديد الواقعة المستوجبة للعقاب وهي الثوب القانوني الملائم لها بلا ضيق ولا اتساع، وينبغي أن يكون الفعل قيد التهمة والذي يتوافق معه هذا الوصف.<sup>97</sup>

يرى الباحث بأنه يمكن القول بأن الطبيعة القانونية للجريمة هي النموذج القانوني الذي يحدده المشرع في قانون العقوبات أو أي قانون عقابي آخر، والذي بموجبه يمكن أن تعد بعض الأفعال جريمة وفقاً لشروط وأركان خاصة مما يترتب على ارتكابها عقوبة معينة.

ترتبط الطبيعة القانونية لها بالتحديد الذي يقوم به المشرع والذي بموجبه تعد بعض الأفعال جرائم يترتب على ارتكابها عقوبات معينة محددة في النص القانوني وفقاً للمبدأ السائد في الدساتير وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.<sup>98</sup>

97 محمود عبد ربه محمد القبلاوي، التكيف في المواد الجنائية ( مصر : دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2003م ) 22 .

98 يعد هذا المبدأ مبدأ " دستورياً " وتشريعياً " في آن واحد وذلك لأهميته في الحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، لذلك نصت عليه اغلب دساتير الدول العربية وقوانينها العقابية . على سبيل المثال ينظر/ المادة (19 / ثانيا ) من دستور العراق الحالي 2005م . المادة (27) من دستور الإمارات العربية المتحدة لعام 1971. المادة ( 20 / أ ) من دستور البحرين 2002م . المادة (66) من دستور مصر











الأراضي الليبية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيها، ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.

### ج. الجريمة في الإسلام

الجريمة هي فعل ما نهى الله عنه وعصيان ما أمر الله به، أو بعبارة أعم هي عصيان ما أمر الله به بحكم الشرع الشريف، وهذا التعريف عام بحيث يشمل الجريمة المعاقب عليها دنيوياً من قبل الحاكم، كما يشتمل على الأفعال المعاقب عليه بالعقوبات التكليفية الدينية التي تكون كفاره للإثم، بجانب العقوبات الربانية المؤجلة ليوم الحساب عند رب العالمين.<sup>106</sup>

غير أن الإسلام يحارب الجرائم لأنه يرى بأن الإنسان يجب عليه أن يعيش في طريق شريف، وأن يحيا على ثمرات كفاحه وجهده الخاص، أي أنه لا يبنى كيانه على الجريمة، رغم أن الإسلام لا يعتبر أي فعل من الأفعال جريمة إلا ما فيه ضرر محقق للفرد والجماعة، ويظهر هذا الضرر فيما يمس الدين أو العرض أو النفس أو النسل أو المال، وما يترتب على ذلك من فساد وإخلال في المجتمع.<sup>107</sup>

بالتالي فإن الإسلام هنا يستهدف حماية أعراض الناس من كل ما يمس كيانهم، وحياتهم، وبذلك فإن المحافظة على سمعتهم وصيانة كرامتهم من الواجبات التي يسعى هذا الدين الحنيف لتحقيقها، حيث يظل الإسلام دائماً أبداً وفيّاً لمبدئه القاضي بتنظيف البيئة ووقايتها من الفتنة والجريمة، وابتغاء صياغة مجتمع بلا مشاكل، وفي سبيل ذلك تتبّع الإسلام أسباب الفتنة فحذر منها.

106 عبدالفتاح خضر، الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقهاء الإسلامي (السعودية : معهد الإدارة العامة بالرياض، 1985م) 12 .

107 عبد الله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام (مصر: دار السلام، ط5، 1406هـ، 1985م) 65 .











سلبية، ومن أمثلة ذلك كثرة الضرب، وحمل السلاح، وفك الأختام، والتدخل في الوظائف العامة.<sup>118</sup>

(ب) **النتيجة الضارة** : ويقصد بالنتيجة الضارة للجريمة هو التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الاجرامي، أو المصلحة التي يحميها المشرع<sup>119</sup> مما يعني أن للنتيجة الضارة مدلولين احدهما مادي، وهو التغيير الناتج عن السلوك الاجرامي في العالم الخارجي، والآخر قانوني وهو العدوان الذي ينال مصلحة او حقاً يحميه القانون.<sup>120</sup>

(ج) **العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة** : قد يقع السلوك الاجرامي بالعلاقة السببية، وتتحقق فيه النتيجة الضارة، ورغم ذلك ليس هناك مسؤولية جزائية فيه والسبب يعود الى عدم وجود تلك العلاقة، ولكي تتحقق المسؤولية الجزائية فيه لا بد أن ترتبط النتيجة الضارة هنا مع الفعل او السلوك الاجرامي ارتباط السبب بالمسبب، بغض النظر عما إذا كان الجاني قد توقعها ام لا، الامر الذي يترتب عليه أن السببية عنصر في الركن المادي للجريمة عمدية كانت أو غير عمدية، فهي تكون الصلة بين الظاهرتين الماديتين، ومن ثم فهي ذات طبيعة مادية وليست على صلة بالركن المعنوي ولا شأن لها به.<sup>121</sup>

**حيث ظهرت في هذا الصدد نظريتان :**

118 سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات ( الكويت : مطابع الرسالة الكويت، 1982م ) 139. وما بعدها وعرف السلوك الاجرامي أيضاً بأنه ( الفعل ) الذي يراد به النشاط المادي الخارجي المكون للجريمة وبالتالي فلا جريمة من دونه لأن القانون لا يعاقب على مجرد النوايا والرغبات والشهوات.

119 فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات القسم الخاص، ( بغداد : مطبعة الزمان، 1992م ) 188-18.

120 سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، 140 .

121 نفس المرجع، 192 .

**الأولى / نظرية تعادل الأسباب :** وتقوم هذه النظرية على أن سلوك الجاني هو السبب في حدوث النتيجة، بغض النظر عن حجم هذا السلوك، ومدى إسهامه في إحداث النتيجة.

**نقد النظرية :** لم تسلم هذه النظرية من النقد لأنها تؤدي إلى نتائج غير منطقية، مثال ذلك : لو تماثل مريض إلى الشفاء، وقبل خروجه من المشفى نصحه الطبيب بالمشي يوماً فترّة من الزمن، وبعد خروجه وهو ينفذ النصيحة أوصاه أخوه بسلوك طريق معين، وفي هذا الطريق استوقفه صديقه قليلاً ليسأله عن حاله، فلو صدمته سيارة إثر ذلك فقتلته لسئل أولئك جميعاً عن موته، إذ لولا نصيحة الطبيب ولولا وصية الأخ ولولا استيقاف الصديق لما صدمته السيارة ولما مات وفقاً لهذه النظرية، وهذا الفهم ينافي المنطق والصواب، وبالتالي هُجرت هذه النظرية ولم يُكتب لها البقاء.

**الثانية / نظرية السبب الملائم :** تختلف هذه النظرية عن الأولى في أنها لا تستوي بين جميع العوامل التي تساهم في إحداث النتيجة، بل إنها تعتد بالسبب الذي من شأنه إحداث النتيجة، فمجرد خدش في الكنف لا يؤدي إلى الوفاة، بل لابد من طعنة أو إطلاق ناري صوب القلب.

**نقد هذه النظرية :** إن هذه النظرية قدمت طرحاً مقبولاً إلى حدٍ ما، حيث أخذت بها معظم التشريعات الجنائية في العالم الخارجي، إلا إنها تعرضت أيضاً للنقد الذي من شأنه أن يضيق المقام عن طرحه، فنكتفي بالأخذ بالنظرية الأولى.

## (2) \_ الجريمة بحسب ركنها المعنوي

لا يكفي لقيام الجريمة قانوناً ومسائلة فاعلها جنائياً مجرد ارتكاب ماديات الجريمة المتمثلة في عناصر الركن المادي، بل ينبغي أن يتوافر لدى الجاني قدر من الخطأ

أو الإثم وهو ما اصطلح تسميته على الركن المعنوي، فلا جريمة إذن دون خطأ  
مهما كانت النتائج التي تمخضت عنها.<sup>122</sup>

قد تعددت المسميات الفقهية للتعبير عن الركن المعنوي، حتى أن البعض وصفه  
بأنه الركن الأدبي للجريمة، أو ركن الخطأ أو الإثم أو الذنب أو الخطيئة، ولا يؤثر  
هذا على حقيقة الركن المعنوي، ولا ينتقض من محتوي عناصره.<sup>123</sup>

من هنا يتضح في خلاصة القول أن للركن المادي أربع عناصر متمثلة في إرادة  
النشاط المكون للركن المادي للجريمة والعلم بكافة عناصره الواقعية الآزمة قانوناً  
بقيام تلك الجريمة والعلم بصلاحيته الناشط لإحداث الجريمة وتوافر موقف نفسي  
للفاعل إزاء النتيجة.<sup>124</sup>

### 3- الجريمة بحسب ركنها الشرعي

لم يأخذ بها فقهاء القانون ويقصد بها نص التجريم الذي يضيف على الفعل أو  
الامتناع بصفته الغير مشروع، فالجريمة لم تكسب وصفها كجريمه إلا مند تقرر  
تجريمها بنص قانوني، وما عدم ذلك لا يعد من الجرائم، حيث بدون نص تجريمي  
يصبح الفعل او لامتناع عنه مشروعاً مهما بدا ملوماً أو مأثماً من وجهة نظر الدين  
أو الأخلاق، أو الأعراف الاجتماعية، ومن هنا ترتبط شروط الركن المادي للجريمة  
بالركن الشرعي من حيث العلم والكفاية.<sup>125</sup>

122 حسن المرصفاوي، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية ( مصر : معهد البحوث والدراسات العربية، 1972م ) 64 .  
123 راجع تفصيلاً عن الركن المادي، أحمد بلال، الإثم الجنائي دراسة مقارنة ( مصر : دار النهضة العربية، 1989م ) وينظر فتوح  
الشاذلي، قانون العقوبات القسم العالم ( القاهرة : دار المطبوعات الجامعية، 1998م ) 437 وما بعدها . وعلى سبيل المثال ، المادة  
230 من قانون العقوبات الليبي تعاقب كل ( من قتل نفساً عمدًا .. ) والمادة 236 تنص على ( كل من جرح او ضرب عمداً .. ) والمادة  
252 ( كل من وضع عمداً ناراً .. ) وغيرها من المواد كثيرة في هذا القانون  
124 عمر سعيد رمضان، بين النظريتين النفسية والمعياري والإثم، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 1 ( القاهرة : 1964م ) 615 .  
125 السيد مصطفى السيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات ( القاهرة : مطبعة مصر، ط3، بدون تاريخ نشر ) 87.











الخطاب، كما أن الزوال سبب في توجه الخطاب بإقامة الصلاة، فالذي أحل وحرّم هو الله سبحانه وتعالى .<sup>135</sup>

السائد عند جمهور الفقهاء : أن سلطة ولي الأمر في التجريم والعقاب تنحصر في دائرة التعزير، أما الحدود والقصاص فلكونها عقوبات مقدرة شرعاً لجرائم محدودة حصراً، فليس لولي الأمر فيها أي تقدير، وهذا القول يستند على أن في الفقه أقوالاً تجعل لولي الأمر قسطاً من التقدير في بعض الحدود.

فالظاهرية والمالكية لا يوجبون ترتيباً معيناً لبعض العقوبات، ولا يخصون كل فعل من أفعالها بعقوبة معينة من عقوباتها، بل يتركونها للقاضي " ولولي الأمر من باب أولى " حرية اختيار أكثر العقوبات الملائمة في كل حالة والحكم بها، أما الأحناف والشافعية والحنابلة فيجعلون لكل صورته من صور الجريمة عقوبة محددة ليس للقاضي أن يعدوها إلى غيرها، وعلى الرأي الأول يكون لولي الأمر قدر من التقدير في اختيار نوع الجريمة و العقوبة الواجبة للتطبيق .<sup>136</sup>

يلخص الباحث مما سبق على أن الجريمة لا يجوز وقوعها في الشرع إلا على فعل محرم أو ترك واجب، سواء كانت الحرمة أو الوجوب ثابتاً بحسب الأصل، أو كان قد ثبت بأمر الإمام في حدود ما يجيزه له الشرع، وينبني على ذلك أنه ليس للإمام أن يعزر على فعل المباح أو على ترك ولا على فعل المكروه أو المندوب أو تركه مادام الحكم باقياً على أصله وقت الفعل أو الترك، حيث بعد أن يتحقق الإمام على سبيل القطع بأن ظروف الواقعة التي طرأت جعلت المصلحة العامة موجبة للانتقال بالحكم الشرعي إلى الوجوب أو الحظر أو بالنهي عنها.

135 محمد مصطفى المراغي، بحوث في التشريع الإسلامي للشيخ ( مصر : بدون طباعة، 1945م ) 42 .

136 عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ( الكويت : دار القلم العلمية، 1970م ) 172 . عبد الوهاب خلاف (1305-1375 هـ، 1888-1956م ) هو المحدث الأصولي، الفقيه، الفرضي عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وصاحب مؤلفات كثيرة خصوصاً في علم أصول الفقه .











## أ\_ مذهب جمهور الفقهاء

عدم جواز عقوبة الغرامة : قال ابن عابدين تعليقاً العقوبة تكون " لا بأخذ مال " غير أن بعضهم يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وظاهره ذلك أن بعضهم يفيد بأن معنى التعزير هو أخذ المال على القول به، أو إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر بها ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي .<sup>147</sup>

وقال الشيخ أحمد الصاوي المالكي : وأما التعزير بأخذ المال فلا يجوز إجماعاً .<sup>148</sup>

وقال الإمام العمراني الشافعي في معرض ذكره لأنواع المزكين إن أخفوا أموالهم حبسهم الإمام، فإذا ظهرت ففي القدر الذي يؤخذ منهم قولان :

أحدهما: قال في القديم يأخذ منهم الزكاة، وشطر مالهم عقوبة لهم، لما روى عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( في كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون فمن أعطها مؤتجراً فله أجرها، ومن كتّمها فإنّا لآخذوها وشطر ماله عزيمة، من عزائم ربك لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)) .<sup>149</sup>

147 ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المختار على الدر المختار، الجزء 4 ( لبنان : بيروت دار الفكر، ط2، 1412هـ، 1992م ) 61 . ( المتوفى 1252هـ )

148 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، الفقه المالكي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء 6 ( دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ نشر ) 370 . توفي الشيخ أحمد الصاوي المالكي بعد سنة ( 1329هـ )

149 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، شرح السيوطي سنن النسائي، كتاب الزكاة، رقم الحديث 2444 ( دمشق : دار البشائر الإسلامية، 1406هـ، 1986م ) 17 . ( المتوفى 858هـ ) ونقل عن الشافعي أن هذا الحديث لا يثبتته أهل العلم. ينظر أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليميني الشافعي، البيان في مذهب الإمام الشافعي، المحقق: قاسم محمد النوري، الجزء 3 ( جدة : دار المناهج، ط1، 1421هـ، 2000م ) 137 .

وقال ابن قدامة الحنبلي: والتعزير يكون: بالضرب، والحبس، والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء منه، ولا جرحه، ولا أخذ ماله، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به.<sup>150</sup>

واستدلوا على ذلك بما يأتي :

(أ) \_ بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس في المال حق سوى الزكاة .<sup>151</sup>

(ب) \_ أن العقوبات كانت في أول الإسلام في الأموال، ثم نسخ ذلك.

### ب\_ اتجاه بعض الفقهاء من الفقه الإسلامي

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه، أن العقوبة المالية جائزة، وللحاكم أمر تقديرها بحسب نوع المخالفة والظروف المحيطة بها، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة :  
منها: مضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطع فيه، كالحريسة، والثمر قبل أن يوضع في الجرين .<sup>152</sup> ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (( ضالّة الإبل المكتومة غرامتها )) .<sup>153</sup>

الراجح والله أعلم أن ما ذهب إليه البعض هو الذي ينبغي المصير إليه لأنه أقرب للرجحان، وذلك لأمرين :

150 موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني الفقه المقارن، الجزء 12 ( بيروت : دار إحياء التراث العربي، ط1، 1405هـ، 1985م ) 526 . ( المتوفى: 620هـ )

151 زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، فيض التقدير شرح الجامع الصغير، الجزء 5 ( مصر : المكتبة التجارية الكبرى، ط1، 1356هـ ) 374 . أخرجه ابن ماجة في باب الزكاة، رقم الحديث 1789، وهو حديث ضعيف كما قال النووي والسيوطي وابن حجر وغيرهم.

152 الحريسة :هي الشاة في الجبل يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل . و الجرين : الموضع الذي يجفف فيه الثمار.

153 محمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الجزء 7 ( بيروت : المكتب الإسلامي، 1405هـ، 1985م ) 19 . ( المتوفى: 1420هـ ) وأخرجه ورواه أحمد وأصحاب السنن، واللفظ لابن ماجة، رقم الحديث 640 . كما قال النووي في المجموع 2-360: اتفق المحدثون على ضعف هذا الحديث واضطرابه، شيخ الإسلام ابن تيمية ( المتوفى 728 هجري )







عليها القانونيون " خصائص العقوبة " والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ويمكن القول بأن الشرط في العقوبة هو ما يلزم من عدمه عدم العقوبة ولا يلزم من وجوده وجود العقوبة ولا عدمها.<sup>160</sup> وحيث إن الخصائص في قانون العقوبات تعني مجموعة مبادئ والتي تراعيها الشرائع العقابية في وضع شبكة العقاب.<sup>161</sup>

أخلص من ذلك أن الخصائص في قانون العقاب أشياء ملازمة للعقوبة حيث لا توجد عقوبة بدون تلك الخصائص، وعليه فإنها بمثابة الشروط لتلك العقوبة، ومما بدى لي أنهما بمعنى واحد خصوصاً في مجال العقوبات غير أن الفقهاء اصطالحوا على أنها شروط، وفي الجهة المقابلة اصطالح القانونيين على أنها خصائص ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذه الشروط يمكن بيانها على التالي :

(أ) - أن تكون العقوبة شرعية تخص الدين وحده : وتعتبر العقوبة شرعية إذا كانت تستند إلى مصدر من مصادر الشريعة، كأن يكون مردها القرآن أو السنة أو الأجماع، أو صدر بها قانون من الهيئة المختصة، ويشترط في العقوبات التي يقررها أولو الأمر ألا تكون منافية لنصوص الشريعة، وإلا كانت باطلة.

يترتب على اشتراط شرعية العقوبة : أنه لا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة من عنده ولو اعتقد أنها أفضل من العقوبات المنصوص عليها.<sup>162</sup>

وهذا الشرط فيه ضمان للأفراد غير أنه لو طبق حرفياً لوقف حائلاً دون ما قد تنتسح له رحمة القاضي تقديراً لظروف كل منهم ولذلك فإن الشرع عندما ينص على العقوبة

160 محمد بن محمد الخطيب الشربيني شمس الدين، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( بيروت : دار الفكر، 1415هـ ) 1-120 .

161 ابراهيم رمضان عطايه، فردية العقوبة وأثرها في الفقه الاسلامي، 18. نقلا عن عبدالفتاح الصيفي، علم الاجرام والعقاب، محمد زكي أبو عامر، 394 .

162 عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء 1 ( بيروت : دار الكاتب العربي، بدون تاريخ نشر ) 629 .

فإنه يراعى في كيفية تحديدها، على أن يترك الفرصة للقاضي ليفحص حالة كل جان ومدى استحقاقه للرفقة والشدة.

(ب) - أن تكون العقوبة تعبيراً عن مقابل جريمة معينة، ومسؤولية مجرم عن هذه الجريمة، أي أنها جزاء يقابل في آن واحد، كما يقتضي أن تقاس العقوبة من حيث شدتها بما يتناسب مع مقدار جسامة الجريمة ودرجة مسؤولية المجرم.

(ج) - أن تكون العقوبة شخصية : بمعنى أن تصيب الجاني ولا تتعداه إلى غيره، وهذا الشرط هو أحد الأصول التي تقوم عليها الشريعة الاسلامية، لأن من القواعد الأولية في الشريعة الاسلامية أن المسؤولية الجنائية شخصيه فلا يسأل عنها إلا فاعلها ولا يؤخذ شخص بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة بينهما .<sup>163</sup>

وفي القرآن الكريم شواهد كثيرة على ذلك منها قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ ﴾ .<sup>164</sup>

وقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ .<sup>165</sup> وقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ .<sup>166</sup>

وجاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المبدأ حيث يقول صلى الله عليه وسلم (( لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه )) .<sup>167</sup>

وشرط شخصية العقوبة هذا يطبق تطبيقاً دقيقاً في الشريعة الإسلامية من يوم وجودها على الرغم من أن العقوبة شخصية فإن آثارها قد تلحق في كثير من

163 عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، 630 .

164 سورة الانعام - الآية : 164

165 سورة فصلت - الآية : 46

166 سورة النساء - الآية : 123

167 السنن الكبرى، كتاب المحاربة، باب قتال المسلم، الجزء 2 ( بيروت : دار الكتب العلمية، بدون تاريخ نشر ) 318 . رقم الحديث

3592 . وسنن النسائي، كتاب تحريم الدم، الجزء 2 ( حلب : مكتبة المطبوعات الاسلامية ) 127 . رقم الحديث 4127 .





أ\_ جنایات في حق الله وهي " كالسرقة " ولا يهمننا دراستها في هذا الصدد

ب\_ وجنایات في حق الله والعبد معاً "مثل زنا الزوج والزوجة المحصن وعدم التوبة "

هذا مانحن فيه الآن بمعنى أنه أقرب للشيء الذي نحن فيه من دراسة، وبالتالي من أهم صفات الحدود في جريمة الزنا أن العقاب فيها لا يشبه نوع الجريمة المرتكبة، فجلد الزاني حد ولكن الجلد لا يشابه الزنا في شيء .فإذا كان الزاني غير محصن فحده الجلد إن كان حراً؛ لقول الله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .<sup>173</sup>

أما إذا كان الزاني محصناً أي متزوجاً، شدة العقوبة عليه، حيث أوجبت عليه عقوبة الرجم حتى الموت رجلاً كان أو امرأة، وهذا محل إجماع بين العلماء، ودليل ذلك حديث ابن عباس في صحيح البخاري في قصة رجم الصحابي الذي زنى واسمه ماعز، حيث جاء في الحديث حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (( أتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه و سلم فقال أبك جنون، قال لا : قال فهل أحصنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه و سلم اذهبوا به فارجموه )) .<sup>174</sup>

173 سورة النور - الآية : 2

174 محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحيح البخاري الجامع الصحيح المختصر، تحقيق، مصطفى ديب البغا، الجزء 6 ( بيروت : دار ابن كثير، اليمامة، ط3، 1407هـ، 1987م ) 2499 . رقم الحديث 6430 .



قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، قال فكنت حينها فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرّة فرجمناه .<sup>175</sup>

وكذلك ما رواه مسلم في قصة رجم المرأة الغامدية التي زنت، وأقيم عليها حد الرجم بعد ثوبتها فقال صلى الله عليه وسلم عن توبة المرأة الغامدية : (( لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل )) .<sup>176</sup>

لأن الحدود تقام بالنص من الشارع، ولأنها عقوبات متناهية وشديدة فإن الشريعة أوجبت ألا تستوفي فيها إلا إذا وقعت الجناية وقوعاً قطعياً لا مجال فيه لشك، ولذلك وضعت لها شروط دقيقة للتأكد من أن الجاني قد وقع في حد من حدود الله ووجب استيفاؤه، فإذا لم تستوف تلك الشروط الدقيقة فإن الحد يسقط لأن في مسند أبي حنيفة للحارثي حديث رواه عبد الله ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه أنه قال : (( ادروا الحدود بالشبهات )) .<sup>177</sup> وفي رواية أخرى (( ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم )) .<sup>178</sup>

### جـ. عدم التوبة وتكرار الجريمة

الأصل أن هناك علاقة بين التوبة و تكرار الجريمة، فتكرارها دليل واضح على عدم التفكير في التوبة وأن المجرم في هذه الحالة قد سعى إلى إغلاق باب التوبة والذي بموجبه لا تسقط عقوبته، وسبب ذلك أن التوبة من مقتضاها حصول الندم

175 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري ( بيروت : دار الريان للتراث، 1407هـ، 1986م ) 124 . وما قبلها .

176 عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، لمصنف، صحيح مسلم، كتاب الحدود،. الجزء 6 ( دمشق : دار الفكر العربي، 1414هـ، 1994م ) 558 . رقم الحديث 22999 .

177 محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، حفة الأحوذى، سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، ( القاهرة : دار الكتب العلمية، بدون تاريخ نشر ) 573 . رقم الحديث 1424 .  
178 نفس المرجع، 573 .

وتحقيق العزم على عدم العودة الى الجريمة مرة أخرى، ولذلك فلا عوده للجريمة مع التوبة وبدونها يمكن القول بأن العقوبة واجبة التشديد.

تستعمل عقوبة التعزير كنوع من التعامل مع العودة في الجريمة، ذلك بأن العودة تمثل الرغبة في الجريمة وتعتبر دليل على تحقيق زيادة الشر والأذى للناس من هذا المجرم العائد في جرائمه، ولهذا فالقاضي يستطيع أن يقرر له عقوبة تعزيره زيادة على العقوبة المقررة له شرعاً، مقابل العودة للجريمة، بهدف تحقيق أعلى قدر من الردع والزرع، ومن ذلك الجلد بآلة قوية وشديدة والسجن والنفي والإقامة الجبرية وإحراق المال أو الأدوات التي استعين بها في الجريمة.

من هنا يمكن القول بأن العودة للجريمة تؤكد استحقاق العقوبة للجاني، وأن عدم العودة بالتوبة يكون سبباً في سقوط العقوبة. فتشديد العقوبة يرجع إلى أسباب تتمثل في العودة لها وضعف الإيمان وتوغل النفس في الشر، ولهذا تشدد العقوبة فيها، حيث يكون الغرض منها تقوية الرادع العقابي، بما من شأنه أن يردع المجرم من التفكير من الوقوع في الجريمة مرة أخرى.

#### ب) \_ الظروف المخففة للعقوبات عند الإسلام

كما كتب الباحث سابقاً أن الأصل في الحدود والقصاص لا مجال للتشديد أو التخفيف فيهما، لأنهما في أصلهما مصاحبةً للتشديد أو للتخفيف بنص الشرع، ولأنهما عقوبات مقدرة ليس للقاضي أن ينقص منها أو يزيد في مقدارها، ولأن العقوبة في الحدود تتجه لمعالجة الجريمة، دون النظر إلى ظروف المجرم الشخصية، غير أن في عهد خلافة عمر ابن الخطاب ساد الفقر بين الناس وأصبح الشخص منهم لا يأكل شيئاً ولا يستطيع القيام بواجباته، حتى أن البعض الآخر سرق من شدة الجوع، فأمر حينها سيدنا عمر بتخفيف العقوبة عن السارق ولا أن تقطع يده، وهذا ما بينه



## أ\_ تخفيف العقوبة بالتوبة

يقول الله تعالى : ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .<sup>180</sup>

أي من تاب على عدم ارتكاب الجرائم نادماً عازماً على عدم العودة للظلم فإن توبته مقبولة، وهذا يقودنا إلى قضية أخرى كثر الاختلاف فيها، وهي: هل يسقط الحد بالتوبة أم لا؟

قد قيل بعدم سقوط الحد ولو تاب السارق وأصلح، وقيل يسقط الحد بالتوبة، ولكل فريق حجته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بتأويل خاص :

فالذين قالوا بعدم سقوط الحد بالتوبة اعتبروا أن الأصل هو إقامة الحد، وأن سقوط الحد بالتوبة استثناء لا غير .<sup>181</sup> وأن الله سبحانه وتعالى لم يستثنى من هذا الحكم إلا حد الحرابة بنص القرآن، حيث قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .<sup>182</sup>

أما من قال بسقوط الحد بالتوبة فقد قال عنهم ابن حزم في كتابه المحلى: أن الحدود كلها تسقط بالتوبة، وهذه رواية رواها أبو عبد الرحمن الأشعري عن الشافعي، قالها بالعراق ورجع عنها بمصر، واحتج أصحاب هذه المقالة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ عندما مسته حجارة الرجم فخرج يشتم (( ألا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه يا هذا لو سترته بثوبك كان خيراً لك )) .<sup>183</sup>

180 سورة المائدة - الآية : 39

181 عبد الكريم مطيع الحمداوي، حد السرقة بين الفهم والتطبيق ( القاهرة: دار المعارف، بدون تاريخ نشر ) 3-4 وما بعدها.

182 سورة المائدة - الآية : 34

183 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المحلى بالآثار، الجزء 8 ( بيروت : دار الفكر العربي، بدون تاريخ نشر ) 126 . ( المتوفي 456 هـ )

حيث تبعاً لما فهمنا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نرجح بأن الحد يسقط بالتوبة، وأن عدم سقوطه في فاحشتي الزنا والقذف هو الاستثناء، وأن التوبة تسقط الحدود وتجب ما قبلها، وهذا كتاب الله ينطق بالحق بين أيدينا قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . 184

وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ . 185

وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . 186

ثم إن السنة النبوية بينت لنا أن رحمة الله سبقت غضبه، كما ورد في البخاري ومسلم ومسنند أحمد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال : قال الله تعالى فيما رواه عنه صلى الله عليه وسلم "سبقت رحمتي غضبي" . 187 وإقامة الحدود هنا تعتبر انتصاراً لغضب الله، وسقوطها بالتوبة من رحمة الله، ورحمة الله سبقت غضبه، حيث قال الله تعالى : ﴿ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ . 188 وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ . 189

ويعتبر هذا خير دليل على رحمة الله عز وجل التي طالت كل شيء بما في ذلك عباده المسيئين، وبذلك تتجلى عظمة الله عز وجل في آياته وفي خلقه .

184 سورة الأعراف - الآية : 153

185 سورة النساء - الآية : 17

186 سورة النحل - الآية : 119 .

187 مجد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد الشيباني، جامع الأصول في أحاديث الرسول، الجزء 4 ( دمشق : دار الفكر العربي، ط1، بدون تاريخ نشر ) 518 . ، رقم الحديث 2622 .

188 سورة الأنعام - الآية : 12

189 سورة الأعراف - الآية : 156

ب. الظروف المشددة والمخففة للعقوبات في القانون الليبي

أ) \_ الظروف المشددة للعقوبات في القانون الليبي

يقصد بتشديد العقوبة أن يحكم القاضي بعقوبة تزيد في مقدارها عن الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً، أو تعلق في نوعها على العقوبة المنصوص عليها، إما لظروف مادية موضوعية تقترب بالفعل الإجرامي ذاته، وإما لظروف شخصية ذاتية تتعلق بالجاني، ومعنى ذلك إنه لا يعتبر من قبيل تشديد العقوبة أن يصل القاضي في حكمه بها إلى الحد الأقصى المنصوص عليه فيها، فمثل هذا الحكم يدخل في السلطة التقديرية المخولة له.

أما تشديد العقوبة في معناه القانوني فهو يعني تجاوز الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها قانوناً، ولهذا فلا يكون التشديد إلا بنص قانوني خاص، ولهذا تعتبر العقوبة المشددة رادعاً قوياً يحول دون العودة لذلك الفعل مجدداً.

أ\_ أسباب تشديد العقوبة نوعان

1\_ أسباب موضوعية أو مادية وهي الظروف التي تقترب بالركن المادي للجريمة كظرف الليل والكسر والتسلق والإكراه في جريمة السرقة.

2\_ أسباب تشديد شخصية وهي التي ترتبط بشخص الجاني المرتكب للجريمة في حق إنسان آخر، ومن امتثلتها العودة إلى الجريمة أو الباعث لها على ارتكابها أو الدافع الدائي لها، كصفة الجاني في جريمة السرقة أو صفة الطبيب في جريمة الإجهاض، وقد تكون خاصة ببعض الجرائم، وقد تكون عامة تسري على كافة الجرائم، وقد يجتمع الأمرين فيها معاً، فيرجح الأمر الأيسر فيها بمعايير يراعى فيها حالة الجاني وقت ارتكاب الجريمة.













التي أشارت إليها "المادة 28 عقوبات" وما في حكمها على ألا يجوز للقاضي أن يتعدى الحدود التي ينص عليها القانون ما لم تكن هناك أسباب للتخفيف أو للتشديد وفي حالة توافر أحد هذه الأسباب فعلى القاضي هنا ألا يتجاوز ما يسمح به القانون في هذا الشأن.<sup>197</sup>

قد نصت على هذا التحديد نطاق السلطة التقديرية للقاضي في المادة " 27 عقوبات بقولها " يحكم القاضي بالعقوبة التي يراها مناسبة في حدود ما نص عليه القانون وعليه أن يبين الأسباب التي تبرر تقديره لها ولا يجوز له تعدى الحدود التي ينص عليها القانون لكل عقوبة بزيادتها أو انقاصها الا في الأحوال التي يقرها القانون " وبالتالي يكون المعيار لتقدير العقوبة هو طبيعة الفعل والقصد الجنائي منه، وسلوك مرتكب الفعل في ذلك الوقت وظروف حياته الشخصية والعائلية والاجتماعية.<sup>198</sup>

كما أستقر قضاء المحكمة العليا الليبية على أنه اذا كان الحكم قد دان الجاني بالحد الأدنى للعقوبة الواجبة التطبيق، فإن عدم تبريرها لا يعد مخالفة للقانون ولا يجوز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم بالنقض لإنعدام مصلحته.<sup>199</sup>

197 محمد رمضان باره، قانون العقوبات الليبي، القسم العام، 63 وما بعدها.

198 نفس المرجع، 66 .

199 المحكمة العليا الليبية، الجلسة 1963/4/4 م . مجموعة المبادئ القانونية، الجزء 1، 236 . وأيضاً جلسة 1965/5/12م ، الجزء 3،

193 . نقلا عن محمد رمضان باره، قانون العقوبات الليبي، 65 .







التي أثرت أو تؤثر فيها والظروف المحيطة بها .<sup>203</sup>

**3\_** يعتبره البعض الآخر مثل " الدكتور أحمد إبراهيم خضر " بأنه مظلة واسعة ومرنة تتضمن عددا من المناهج والاساليب الفرعية المساعدة والداخلية تحت مظلة المنهج الوصفي مثل المسوح الاجتماعية أو الدراسات الميدانية أو دراسة الحالة وغيرها، ولهذا يكاد المنهج الوصفي يشمل كافة المناهج الاخرى باستثناء المنهجين التاريخي والتجريبي، ذلك لأن عملية الوصف والتحليل للظواهر تكاد تكون مسألة مشتركة وموجودة في كافة انواع البحوث العلمية .<sup>204</sup>

**4\_** يعتبره البعض الآخر كالمفكر " ماثيو جيدير " بأن هذا المنهج مبني على دراسة الحالة، ولا يقتصر على التعرف على معالم الظاهرة وتحديد أسباب وجودها، وإنما يشمل على تحليل البيانات ودراستها ومن ثم تحليلها وتفصيلها وتفسيرها، ومن ثم التوصل الى الوصف الدقيق لها، ويشمل بذلك كل المناهج سواء كانت الفرعية منها أو الأساسية .<sup>205</sup>

**5\_** يعتبره البعض الآخر كالدكتور " إسماعيل سعيد صيني " بأن هذا المنهج لا يشترط فيه التحليل، بل يتطلب التركيز فيه على بعض الجزئيات الموصوفة فقط، حيث من خلال التركيز على تلك الجزئيات وحصرها، سيتم التعرف على الأجوبة المناسبة لمشكلة البحث .<sup>206</sup>

203 ربحي مصطفى عليان، وعثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق (عمان : دار صفاء للطباعة ، ط1، 2008م) 52-59 .

204 أحمد إبراهيم خضر، الملامح العامة للمنهج الوصفي، الجزء1 (مصر : مطبعة الإسكندرية، 1434هـ ) 4 . هو أحمد إبراهيم عبدالرحمن خضر من مواليد بمحافظة أسوان بمصر، التحق بقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، 1966م، حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع العسكري، وحصل على الدكتوراه في نفس التخصص، 1979م .

205 ماثيو جيدير، منهجية البحث، تنسيق محمد السيد غانم، ( باريس : بدون تاريخ نشر ) مترجم من الفرنسية للعربية، 100 .

206 سعيد إسماعيل صيني، قواعد أساسية في البحث العلمي ( السعودية : شبكة الألوكة، ط2، 2010م ) 97 .

حيث أن اختلاف العلماء في تحديد مفهوم المنهج الوصفي أشد من اختلافهم في تحديد مفهوم أي منهج آخر، ويعزى هذا الاختلاف لعدم اتفاقهم أساساً على الهدف الذي يحققه هذا المنهج، هل هو مجرد للظاهرة المدروسة أم أنه يتجاوز الوصف إلى توضيح العلاقة ومقدراها ومحاولة اكتشاف الأسباب الكامنة وراء الظاهرة، وقد أدى اختلافهم في تحديد مفهوم المنهج الوصفي إلى اختلاف آخر أوسع منه، وهو الاختلاف حول عدد من المناهج التي ترتبط بظاهرة معاصرة مثل المنهج الحقلي والمنهج الوصفي والمنهج السببي المقارن والمنهج الارتباطي والوثائقي وتحليل المحتوى والمنهج التتبعي، وهناك من العلماء من يرى بأن هذه المناهج السابقة من إحدى مناهج أنواع البحث الوصفي، مثل الدكتور "أبو سعيد الصيني" كما أن هناك من يراها منهجاً قائماً بذاته مثل الدكتور "داوود بن درويش حلس" <sup>207</sup>.

يرى الباحث بأن قاعدة الأساس هي أن الباحثين لا يقدمون في الدراسات الوصفية مجرد اعتقادات خاصة، أو بيانات مستمدة من ملاحظات عرضية أو سطحية، كما أنهم ليسوا مجرد مبوبين أو مجدولين، ولكنهم يجمعون الأدلة على أساس فرض أو نظرية ما، ثم يقومون بتبويب البيانات وتلخيصها بعناية، ثم يطلونها بعمق، في محاولة لاستخلاص تعميمات ذات مغزى تؤدي إلى تقدم المعرفة.

حيث يحظى هذا المنهج باهتمام المتخصصين بالشؤون التربوية والاجتماعية والإدارية، ونجد أن المفكرين يهتمون بهذا المنهج كثيراً في دراسة الحالات الفردية، وعلى الجانب الآخر يستخدم منهج دراسة الحالة كثيراً كمنهج مساند في دراسات أكبر وأوسع تحتاج في جانب منها لدراسة حالة من الحالات بعمق، كما أن الباحث المستخدم لمنهج دراسة الحالة على الجهة المقابلة، قد يلجأ في جانب من دراسته لاستخدام مناهج أو أساليب أخرى كالمنهج التحليلي لدراسة حالة وتفسيرها مثلاً.

207 داوود بن درويش حلس، دليل الباحث في توضيح وتنظيم البحث العلمي في العلوم السلوكية (الرياض: إدارة التعليم، 2006م)

15 . وما بعدها .























- 2\_ نقل الباحث النصوص والمعلومات من مصادرها الأصلية والتبعية المنقولة عنها محيلاً إلى المصدر في الهامش إذا كان نصاً أو نقلاً.
- 3\_ خرج الباحث الأحاديث الشريفة من المكتبة الشاملة من كتب الحديث بذكر المؤلف، ورقم الحديث، والجزء والصفحة توفيراً على القارئ وقته وجهده.
- 4\_ قام الباحث بتعريف المصطلحات وشرح الكلمات الغريبة الواردة في البحث.
- 5\_ ذكر الباحث في هذا البحث اسم المرجع كاملاً بدايةً بمؤلفة ومن ثم اسم الكتاب بخط مائل والجزء إن وجد ومن ثم قوسين كتب بداخلهما أسم الدولة ودار النشر ورقم الطبعة وسنة النشر ورقم الصفحة، وإن تكرر اسمه مرة أخرى اكتفى الباحث بالإشارة إلى اسم الشهرة والمؤلف واسم الكتاب مختصر الجزء والصفحة دون الحاجة إلى تكرار المعلومات مرة أخرى إلا إذا أخذت من طبعة مختلفة وأكتفى الباحث بكتابة مرجع سابق أو سبق ذكره.
- 6\_ تم وضع علامات الترقيم والتشكيل كما يقتضي البحث العلمي.
- 7\_ تم إتباع خطوات كتابة البحث العلمي كما يستوجبه الكتاب الرسمي المقرر من جامعة سونان أمبيل الحكومية بدولة أندونيسيا.



السليم ركن عرفي، يحدده الزمان والمكان والثقافة، وحيث تتمثل أركان هذه الجريمة وفق القانون الليبي كما في الآتي :

## 1)\_ الركن المادي :

إن الأصل أن يكون الوالد أو الولي أو الوصي على هذا الولد موكلاً بالاعتناء به وتوفير الحماية والرعاية له، وكافة مستلزماته من طعام ولباس وفرش ومسكن وغيرها، من مستلزمات ومتطلبات الحياة التي لا يستطيع العيش بدونها، حيث إن هذا واجب حتمته عليه الشريعة الإسلامية والقوانين كافة، وتقع هذه الجريمة بالسلوك الايجابي والسلوك السلبي، كالإهمال وعدم توفير الاحتياجات الأساسية لهذا الواجب المفروض على الوالد أو الولي أو الوصي بتوفير كافة مستلزمات هذا الولد وإعالتة كما كلف به الشرع الحكيم، فتقع هذه الجريمة بأن يرفض الوالد أو الولي أو الوصي تقديم هذه المستلزمات، كأن يرفض أن يقدم له الرعاية والعناية والحماية، أو يهمل في تزويد أسرته بمستلزماتهم، من طعام ولباس وفرش على الرغم من استطاعته القيام بذلك، فهذا الشخص المكلف بحماية أطفال الأسرة الصغار سواء كان والداً لهم أو ولياً أو وصياً عليهم، وامتنع أن يوفر له ولعائلته الطعام والكساء والفرش، يصبح محل إتهام وفق القانون الليبي، حيث أن المعيار الذي أخذ به المشرع هو في كون الطفل الذي لم يبلغ الثامنة عشر لا يستطيع أن يوفر لنفسه تلك الأشياء بمفرده، كونه قاصراً ولا يستطيع أن يعيل نفسه، ولا يستطيع أن يزود نفسه بهذه الاحتياجات ولا يستطيع حماية نفسه، نظراً لصغر سنه وطبيعة جسمه، فيأتي دور الوالد والولي أو الوصي هنا، والذي كلف قانوناً وشرعاً على أن يعول أسرته، ومن ثم إذا ما ارتكبت هذه الأفعال سواء على الزوجة أو الابناء فيعتبر الجاني قد اتبع مسلك يتنافى مع نظام الأسرة السليم وأخلاقها، وبذلك يكون شرط التخلي عن القيام

بالواجبات الأسرية وفق القانون الليبي كأن يكون قاصداً ودون سبب مشروع أو مبرر معقول يمنعه بالرغم من أنه يستطيع إعالتهم .<sup>216</sup>

## (2)\_ محل الجريمة :

نستطيع أن نحدد محل هذه الجريمة أو صفة المجني عليهم في هذه الجريمة، هم الأشخاص الذين تقع عليهم هذه الجريمة، وهم الزوجة والولد الصغير القاصر الذي لا يستطيع أن يعيل نفسه، أو لا يستطيع أن يدير أمور نفسه بمفرده، نظراً لصغر سنه، أو لطبيعة جسمه كونه طفل قاصر، فطبيعة بنيته الجسمية صغيرة، فلا يستطيع العمل ولا يستطيع أن يميز بين النفع والضرر له، وبالتالي يكون الجاني هو الزوج أو الأب أو من له حق في رعاية هؤلاء الأشخاص، كالولي والوصي، فهؤلاء موكلون بحماية هذا الصغير و الاعتناء به ورعايته.

## (3)\_ الركن المعنوي :

قد تكون هذه الجريمة مقصودة وقد تكون غير مقصودة، ويتطلب لتوفر أركانها توفر القصد الجنائي العام لدى الجاني، وهو الرفض أو الامتناع عن تقديم الغذاء أو الكساء أو الفراش لهذا الولد الصغير، بالرغم من إن الجاني مكلف شرعاً وقانوناً بحماية هذا الطفل ورعايته، وتوفير كافة مستلزماته اللازمة للإبقاء عليه حياً وبصحة جيدة، أي أن يعلم أن فعله هذا برفض تقديم الطعام والكساء والفراش وغيرها من مستلزمات لهذا الولد الصغير سوف يؤدي إلى هلاكه، ويجب أن تتجه إرادته إلى ذلك بالرغم من أن باستطاعته أن يوفر هذه المستلزمات وهذه المتطلبات .<sup>217</sup>

216 وسيم ماجد إسماعيل دراغمة، الجرائم الماسة بالأسرة ( رسالة ماجستير -- جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، 2011م )  
21 . وما بعدها.

217 سعد عبد العزيز، الجرائم الواقعة على الأسرة، ( تونس : الدار التونسية، ط2، 1990م ) 40 .







كما يجب عليه أن يقدم حساباً سنوياً مؤدياً بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل بداية كل سنة .<sup>222</sup>

## ب)\_ انتهاء الوصاية

تنتهي مهمة الوصاية على اموال القاصر فور بلوغ القاصر سن الرشد، إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه، ويجب على الوصي أن يسلم الأموال إلى القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوماً من انتهاء الوصاية .<sup>223</sup>

نصت الفقرة الأخيرة من المادة " 396 " على كل من جرد وسائل العيش فروع القاصرين أو العاجزين عن العمل أو أصوله أو زوجه مالم يكن قد انفصل عنه قانوناً دون خطأ منه.

حيث أن المقصود هنا من تجريد القاصر أو الزوج من وسائل العيش فروع القاصرين أو العاجزين عن العمل وفق ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان .<sup>224</sup> والذي يكون بعدم اعطاء الشخص لأبنائه أو زوجته الحق في مستوى من المعيشة الكافية للمحافظة على صحة ورفاهية أسرته، من حيث توفير حياة كريمة لهم، ويتضمن أيضاً ذلك الحق في التعليم و التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وتأمين الرعاية لهم في حالة المرض أو

---

222 إذا كان من الممكن إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ( 45 ) فإن الحساب الذي يقدمه الوصي عند انتهاء الوصاية عملاً بنص المادة ( 50 ) من ذات القانون لا يعفى منه بحال، بل يتعين عليه تقديمه أيا كانت قيمة أموال القاصر المشمول بوصايته.

223 عملاً بنص ( المادة 50 ) من القانون رقم ( 119 ) 1952 م .

224 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948م. بموجب القرار 217 بوصفه أن المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، هو حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالمياً.

العجز أو الترمل، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش التي يكون قادر عليها والتي من الممكن توفيرها .<sup>225</sup>

كما أن الولاية أساسها المصلحة، والمجنون والطفل لا يستطيع أن يعرف مصلحة نفسه، وتبعاً لذلك فلا يستطيع معاونة غيره في تحقيق أوجه المصلحة، وبذلك تنتهي الولاية على الطفل بزوال السبب الذي لأجله ثبتت الولاية على الطفل، والصغر ينتهي بالبلوغ ، والبلوغ قد يكون بالسنين وقد يكون بالعلامات، وأحكام الولاية على الطفل متناثرة في قوانين مختلفة كالقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية وقانون رعاية الأحداث وقانون العقوبات وقانون حقوق الطفل وغيرها من القوانين، ولذلك لم ينل هذا الموضوع حظه من الدراسة والبحث مع أهميته وصلته بشريحة الأطفال التي يفترض أن تكون لها الأولوية والأفضلية والمصلحة الفضلى، كما أنه لم يتم جمع شتات هذا الموضوع المتشعب في مرجع واحد أو دراسة واحدة، وإضافة إلى هذا فإن موضوع الولاية على الطفل تتداخل معه كثير من المسائل والأحكام والمفاهيم، ومن ذلك تداخل الولاية مع الحضانة والكفالة والوصاية، ومع أن أحكام الولاية على الطفل قد تناثرت في قوانين كثيرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك إلا أن هذه القوانين قد أغفلت بعض الأحكام المتعلقة بالولاية على الطفل مثل العلاقة بين الحضانة والولاية والكفالة وبيان مظاهر وحدود كل منها .<sup>226</sup>

---

225 الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة ( 25 ) ( الصحة والرعاية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته ) والمادة ( 26 ) والتي تنص ( لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته ) وجاءت المادة ( 27 ) بنصها ( لكل شخص له الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة ) .

226 عبد المؤمن شجاع الدين، *الولاية على الطفل*، دراسة فقهية قانونية مقارنة ( اليمن : صنعاء، كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء، 2011م ) 4 .





يرى الباحث بأن يجب وينبغي على الولي أن يعلم القاصر من أمور الدنيا ما يحتاج إليه من سباحة ورماية وغير ذلك مما ينفعه في كل زمان بحسبه.

كما يجب على الولي تأديب الصغير بالآداب الشرعية التي تغرس في نفسه الأخلاق الكريمة والسلوك القويم، وذلك لصيانته من قرناء السوء و نار الآخرة.<sup>234</sup>

حيث تجب أجره التعليم والتأديب في مال القاصر إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقته، والإنفاق من مال الصغير لتعليمه الفرائض واجب بالاتفاق، كما يجوز أن يصرف من ماله أجره تعليم ما سوى الفرائض من القرآن، وغير ذلك مما يعود على القاصر بالنفع.<sup>235</sup>

### ج. التخلص من علاج القاصرين من أفراد الأسرة

علاج الصغير وختانه الولاية فيها تكون للولي على النفس، لأن هذه الأشياء من أهم الأمور اللازمة للصغار لتعلقها بصحتهم وحياتهم، ويتحقق هذا بالإذن للطبيب في تقديم العلاج اللازم للصغار، والإذن في إجراء العمليات الجراحية لهم، وهذا كله خاص بالولي على النفس، أما إذا كانت هناك ضرورة ملحة في إجراء العمليات لإنقاذ حياتهم وتغيب الولي على النفس فللولي على المال الإذن في إجراء العملية، لأن ذلك من الواجب على كل مسلم إنقاذ حياة أي آدمي من عموم المسلمين، وهذا كله من لوازم النفقة التي تجب على الولي إذا لم يكن للصغير مال، أما إذا كان له مال فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيراً أو كبيراً، وبذلك يتضح جلياً في

234 شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، معني المحتاج الى معرفة معنى الفاظ المنهاج، الجزء 1 (المغرب : البيضاء، دار الكتب العلمية، 1445هـ، 1994 م) 131 .

235 محمد أمين بن عمر ابن عابدين، فروع الفقه الحنفي رد المختار على الدر المختار، الجزء 5 (المغرب : البيضاء، دار الكتب العلمية، 1412هـ، 1992 م) 355 .



كيفية تحديد النفقة، حيث وإن كان الشخص موسراً فالأصل أن ينفق على نفسه وكما أشار الباحث بأن هذا الحكم مبناه الغلبة وليس الأمر والوجوب.<sup>236</sup>

هـ. الوصاية عند فقهاء الفقه الإسلامي

لم يجد الباحث تعريفاً واضحاً لها عند فقهاء الفقه الإسلامي، إلا في مذهب الحنفية، وجاء تعريفهم على النحو التالي: فقد عرفها " الكاساني " : بأنها تنفيذ القول على الغير .<sup>237</sup> وزاد ابن نجيم وابن عابدين على هذا التعريف شاء أم أبي .<sup>238</sup>

عرفها الفقهاء المعاصرون : منهم مصطفى الزرقا : بأنها قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية .<sup>239</sup>

جاء تعريفها في قانون الأحوال الشخصية : بأنها حق منح الشرع لبعض الناس يكتسب به صاحبه تنفيذ قوله على غيره رضي ذلك الغير أم لم يرضى .<sup>240</sup>

عليه يرى الباحث من خلال النظر إلى هذه التعريفات، بأنها جميعاً قد اتفقت في المعنى واختلفت في الألفاظ رغم الزيادة التي أوردها الفقهاء المحدثون، إلا أن هذه الزيادة شملها تعريف الحنفية الذي عرف الولاية بشروطها وحقيقة حكمها، رغم أن كل التعاريف جاءت قصيرة وبمدلول وبمفهوم مفوض للمجتهد في كونه حق مقدر يأمر به الشرع الحكيم لحماية القاصرين ورعاية أموالهم حتى أن يصلو إلى سن

236 موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، الفقه المقارن المغني، الجزء7 ( لبنان : بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1405هـ، 1985م ) 210 .

237 علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء 2 ( الأردن : عمان، المطبعة الجمالية، 1328هـ ) 253 . ( المتوفي 1191هـ )

238 محمد أمين بن عمر، رد المختار، الجزء 2، 406 . ابن نجيم ( المتوفي 969هـ ) ابن عابدين ( المتوفي 1252هـ )

239 مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، الجزء 2 ( بدون طباعة، 1425هـ، 2004م ) 843 .

240 محمد قدرى باشا، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان، المحقق، بسام عبد الوهاب الجابي، الجزء 1 ( بدون طباعة، 1895م ) 118 .



هناك سناً معينة لذلك، حيث اختلفوا في ذلك، لأنه المعيار الذي يحدد سن البلوغ منوط بالشخص نفسه وتركيبته وبذلك اعتبر الفقهاء البلوغ حداً فاصلاً بين مرحلتي التكليف وعدمها، في حالة انعدام ظهور شيء من هذه العلامات عليه.

### أدلة المذهب الأول :

وهم القائلون بأن الصبي إذا أكمل خمس عشرة سنة صار بالغاً مكلفاً بالأحكام الشرعية، وقد استدلووا من السنة وذلك على النحو التالي :

1- ما روى عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأخذت منه الحدود ))<sup>246</sup>.

وجه الدلالة : في الحديث دلالة واضحة انه سن البلوغ خمس عشرة سنة، وتعتبر حداً فاصلاً بين التكليف وعدمه، فالحديث صريح في أن المولود إن بلغ هذا السن جرى عليه قلم التكليف واستوفيت منه الحدود.

### أدلة المذهب الثاني:

هم القائلون بأن سن البلوغ في الذكر هو إتمام ثماني عشرة سنة، وفي الأنثى سبع عشرة سنة فقد استدلووا من الكتاب: بقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾<sup>247</sup>. وجه الدلالة : حيث قد ثبت في الآية الكريمة بأن الشرع الحكيم قد علق حكم التكليف والخطاب بالاحتلام<sup>248</sup>.

246 أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، أخرجه في السنن الكبرى سنن البيهقي الكبرى، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الجزء 6 ( المغرب : البيضاء، دار الكتب العلمية، 1424هـ، 2003م ) 56 . وضعفه الألباني في الجامع الصغير، الجزء 1، 798 . أنس ابن مالك ( المتوفي 91هـ )

247 سورة النور - الآية : 59

248 علاء الدين الحنفي، بدائع الصنائع، 172 .

## أدلة المذهب الثالث:

هم القائلون بأنه إذا أتم كل من الذكر والأنثى ثماني عشرة سنة، فقد أدركا سن البلوغ وجرى عليهما قلم التكليف والبلوغ، فقد استدلوا بما استدل به أصحاب المذهب الثاني من أدلة، وقالوا أن في الغالب إن هذا السن هو الذي يتيقن فيه اليأس من الاحتلام.<sup>249</sup>

## الترجيح :

عليه فإن الباحث يرجح أصحاب المذهب الأول، مذهب الجمهور القائل، بأن سن البلوغ عند الذكر والأنثى هو إتمامهما لخمس عشرة سنة، وذلك لقوة ما استدلوا عليه من أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه.<sup>250</sup>

## أ\_ شروط الولي على مال القاصر عند الفقه الإسلامي

أنفق جمهور الفقهاء على بعض الشروط كالآتي :

1\_ أن يكون الولي كامل الأهلية، بالغ عاقل حر راشد، لأن من فقد وصفاً من هذه الأوصاف كان فاقداً الأهلية، أو ناقصها فلا يكون أهلاً للولاية على مال نفسه، فمن باب أولى ألا يكون أهلاً للولاية على مال غيره، وكذلك يشترط في الولي أن يكون رشيداً، لأن السفیه ممنوع من التصرف في ماله، فيمنع من التصرف في مال غيره من باب أولى، وذلك لأن الولاية إنما تثبت لمن يقدر على تحقيق مصالح المولي عليه، وكل من الصغير والمجنون والسفيه ليس له من سلامة التفكير ما يلي أمر نفسه فلا يصح أن يلي أمر غيره.<sup>251</sup>

249 محمد الخرشبي العدوي، شرح الخرشبي، 291 .

250 شمس الدين محمد الشافعي، مغني المحتاج، 166 .

251 علاء الدين الحنفي، بدائع الصنائع، 153 .









فاسدًا فباع عقار القاصر، فلا يجوز له، وحتى إن كبر الابن كان له أن ينقض إلا إذا كان خيراً للصغير، بأن باع بأكثر من قيمته أو بضعف القيمة.<sup>263</sup>

**قال المالكية :** يجوز للولي أن يتصرف في مال القاصر بالمصلحة، إلا أنهم فرقوا بين الولي الأب و الولي غير الأب، فقالوا أنه يجوز للولي الأب أن يتصرف في مال الصغير بالمصلحة فله بيع مال أملاك ولده المحجور عليه مطلقاً عقاراً أو منقولاً، وإن لم يذكر سبب البيع، لأن تصرفه محمول على المصلحة، أما غير الأب من الأولياء فقد قيدوا البيع بوجود أسباب فلا يبيع فيها الوصي.<sup>264</sup>

**قال الشافعية :** لا يجوز للولي أن يبيع عقار القاصر، لأن العقار أسلم وأنفع مما عداه، إلا لحاجة من كسوة أو نفقة ونحوهما، كأن لم تفي غلة العقار بذلك ولم يجد من يقرضه أو لم ير للمصلحة في الاقتراض أو خاف عليه من الخراب والتلف، أو غبطة ظاهرة كبيعه بزيادة على ثمن مثله وهو يجد مثله ببعضه أو خيراً منه ب كله فلا يجوز البيع هنا، لأن العقار أسلم وأنفع للصبي الغير مكلف حتى يبلغ.<sup>265</sup>

**قال الحنابلة :** لا يجوز للولي بيع عقار القاصر إلا على وجه الحظ أي لمصلحة له، وأنواع المصلحة كثيرة عندهم : لكونه في مكان لا غلة فيه أو هي يسيرة، أو له جار سوء أو ليعمر له عقار آخر ولو بلا ضرورة أو زيادة على ثمن مثله.<sup>266</sup>

يرى الباحث أن ما ذهب إليه المذهب المالكي هو الأرجح، وهو أن يحق للولي أن يتصرف في مال القاصر بالمصلحة، وذلك لأنهم فرقوا بين الولي الأب والولي غير الأب، حيث يجوز للولي الأب أن يتصرف في مال الصغير بالمصلحة، لأنه

---

263 سيف الدين الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، باب من بنى في حقه ما يضر في جاره، الجزء 2 (بيروت : المكتب الإسلامي، بدون تاريخ نشر) 784 . ( المتون: 631 هـ )  
264 علاء الدين الحنفي، بدائع الصنائع، 153 .  
265 شمس الدين الشافعي، معني المحتاج، 174 .  
266 منصور بن يونس الحنبلي، كشف القناع، 451 .

مدعاة له فلا نتصور أن يبذر الأب أموال ابنه، في كونه هو من جمعها له وسانده فيها، أما غير الأب من الأولياء فقد قيدوا البيع بوجود أسباب فلا يبيع الوصي فيه.

### جـ مراتب الأولياء على الطفل في الفقه الإسلامي

اختلف الفقهاء في ذلك خلافاً واسعاً متشعباً مبسوطاً في المراجع الفقهية - ونكتفي بالإشارة إلى بعض هذه الأقوال الفقهية، حيث يجعل الفقهاء الولاية للعصبات بدءاً بالأصول ومنع الفقهاء الولاية عن الفروع، حيث يستحيل أن يكون هؤلاء أولياء للطفل فليس له فروع ، وبيان مراتب الأولياء على الطفل عند الفقهاء على النحو الآتي:

1\_ الأصول والمتمثل في الأب ثم يليه الجد وإن علا، وذلك لتمييز هؤلاء بالشفقة على الطفل ورعاية مصالحه قياساً بالأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب ، لأن مبنى الولاية على الطفل الشفقة ورعاية المصلحة وهي أوفر في الأصول (الأب والجد وأن علا) وهذا ما ذهب إليه غالبية الفقهاء منهم الشافعية والحنفية والزيدية .

2\_ بعد الأصول يأتي الأخوة في ترتيب الولاية على الطفل حيث يقدم الأخوة الأشقاء ثم الأخوة لأب، كما يتقدم في الولاية على الطفل أولاد الأخوة على الأعمام لتقديم جهة الأخوة على جهة العمومة وهذا قول غالبية الفقهاء ومنهم الشافعية والحنفية.

3\_ بعد الأخوة تأتي مرتبة الأعمام في الولاية على الطفل ثم سائر العصبات من جهة الأعمام وبحسب ترتيبهم في الميراث، ثم بعد ذلك يأتي ترتيب العصبية السببية

4\_ كافل اليتيم وإن كان أجنبياً عنه، وكذا تكون الولاية على الطفل للملتقط الذي التقطه، وهذا ترتيب قويم جدير بالاعتبار، لأنه إذا كان أهل الطفل قد أهملوه أو تركوه فقد قطعوا ما أمر الله به أن يوصل لذلك سقط عنهم سلطان الولاية على



أ. جدول مقارنة لمحل تلك الجرائم بين القانون والفقهاء الإسلامي

محل الجريمة	من حيث القانون الليبي	من حيث الفقه الإسلامي
التصرف في اموال القاصر	<p>يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها ويبدل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة ، كما لا يجوز له مباشرة التصرفات على اموال القاصر إلا بإذن من المحكمة وعدم توديع أموال القاصر في أحد المصارف بعد استبعاد النفقة ومصروفات الإدارة وذا ما تم ايداع تلك الاموال فلا يجوز أن يسحب من هذه الأموال إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة.</p> <p>كما يجب عليه أن يقدم حساباً سنوياً مؤدياً بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل بداية كل سنة. وهذا بخلاف ما اتفق عليه فقهاء الإسلام ، حيث اتفقوا على جواز أن يتولى الولي إخراج الزكاة من مال القاصر دون إذن منه ، لأنها عبادة مالية تجري فيها النيابة و الولي نائب الصبي فيها فيقوم مقامه في إقامة هذا الواجب</p>	<p>إن سلطة الولي تشمل إدارة أموال القاصر والتصرف فيها، ويعتبر ذلك واجباً عليه ويؤدي ذلك الواجب متوخياً المحافظة على تلك الأموال ورعايتها، ملتزماً بالأحكام التي يفرضها الشرع والقانون في هذا الشأن، ومن هذه السلطة أن يتولى الولي إخراج الزكاة ،لأنها عبادة مالية تجري فيها النيابة و الولي نائب الصبي فيها فيقوم مقامه في إقامة هذا الواجب .بخلاف العبادات البدنية كالصلاة والصيام، فإنها عبادات شخصية لا يجوز التوكيل فيها، والإنابة فلا بد أن يباشرها الإنسان بنفسه، إذا التعبد فيها واضح باحتمال المشقة البدنية امتثالاً لأمر الله تعالى فقد اتفق الفقهاء على أن الزكاة تجب في مال البالغ العاقل المسلم، إذا كان بالغاً للنصاب وزائداً عن حاجاته الأصلية</p>

<p>الفقه الإسلامي يرى بأن نفقة القاصر تجب في ماله إن كان له مال، وإلا وجبت على أبيه . وهذا بخلاف القانون الليبي الذي الزمه الزاماً قاطعاً فإن لم يكن لهم مال فيلزم بالإئفاق عليهم ممن تجب عليهم نفقتهم من قرابتهم، وعليه فإن للولي أن ينفق عليهم بالمعروف من غير إسراف و إقتار.</p> <p>واتفقت المذاهب الأربعة على الآباء وسائر الأولياء يجب عليهم تعليم الصغار وتوفير ما يلزمهم قبل وبعد البلوغ بخلاف القانون الليبي الذي يسن في مدوناته في هذا الامر ما قبل البلوغ أما ما بعد البلوغ فليس للولي حق في النفقة عليه الا بالمعروف ومن باب الاحسان فيعلم الصغير ما تصح به عقيدته من إيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وما تصح به عبادته ويعرفه ما يتعلق بصلاته وصيامه و طهارته ونحوهما.</p>	<p>تقع هذه الجريمة وفق القانون الليبي بأن يرفض الوالد أو الولي أو الوصي تقديم هذه المستلزمات، كأن يرفض أن يقدم له الرعاية والعناية والحماية أو يهمل في تزويد أسرته بمستلزماته، من طعام ولباس وفرش على الرغم من استطاعته القيام بذلك، فهذا الشخص المكلف بحماية الأسرة والطفل الصغير سواء كان والداً له أو ولياً أو وصياً عليه ويمتنع ويرفض أن يوفر له ولعائلته الطعام والكساء والفرش يصبح محل إتهام وفق القانون الليبي حيث إن المعيار الذي أخذ به المشرع في كون الطفل الذي لم يبلغ الثامنة عشر لا يستطيع أن يوفرها لنفسه بمفرده كونه قاصراً و لا يستطيع أن يعيل نفسه، ولا يستطيع أن يزود نفسه بهذه الاحتياجات ولا يستطيع حماية نفسه نظراً لصغر سنه وطبيعة جسمه</p>	<p>نفقة طعام الأسرة والقصر وشرابهم وكسوتهم وغير ذلك</p>
<p>ليس للولي سلطة في مباشرة التصرفات الضارة بالمولى عليه ضرراً محضاً، كالتبرع من مال القاصر بالهبة أو البيع أو الشراء بغبن فاحش، فيكون تصرفه باطلاً، وله مباشرة التصرفات النافعة نفعاً محضاً كقبول الهبة والصدقة والوصية وكذا التصرفات المترددة</p>	<p>أن المشرع الليبي أخذ بمعايير خاصة عند اختيار الوصي وجعل للنيابة العامة حق في الاشراف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم وإداراتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم، فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ولها الحق في التصدي لما قد يتعارض مع</p>	<p>تبذير أموال القاصر</p>









وهذا ما لم يذهب اليه قانون العقوبات الليبي الذي يرى بأن الأسرة كيان مقدس ويجب حمايته جنائياً<sup>270</sup>.

من هنا يستطيع الباحث القول بأن النظريات الفقهية المترتبة على جمهور فقهاء الفقه الإسلامي في تلك المسألة تعتبر الأقرب للصواب، لأنها أقرب ما تكون للمنطق بأدلة ثابتة، حيث لا يعتبر فيها التقصير أو عسر الوالدين عن الإعانة المترتبة على واجباته المنزلية جريمة، ويأتي دليل ذلك بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أتى له أحد الأشخاص يشكوا أبيه له، فما لبث الرسول ألا وإن أجاب (( أنت ومالك لأبيك ))<sup>271</sup>.

حيث أن لهذا الحديث قصة مؤثرة وردت في رواية الطبراني والبيهقي لهذا الحديث عن طريق المنكر بن محمد بن المنكر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل (( اذهب فأتني بأبيك )) فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال " إن الله عز وجل يُقرئك السلام ويقول لك " إذا جاءك الشيخ فسأله عن شيءٍ قاله في نفسه ما سمعته أذناه، فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم " ما بال ابنك يشكوك، أتريد أخذ ماله ؟ قال: سلّه يا رسول الله، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي " فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إيه ! دعنا من هذا، أخبرنا عن شيءٍ قلته في نفسك ما سمعته أذناك )) فقال الشيخ: والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقيناً لقد قلت

270 أحمد محمود خليل، الوسيط في تشريعات محاكم الأسرة، 5. الأمام الطبراني ( المتوفى 360هـ ) الأمام البيهقي ( المتوفى 458هـ )  
271 حديث صحيح رواه جابر رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي أيضاً في، دلائل النبوة، وصححه ابن حجر والألباني. ( 6902 )  
والرواية الأخرى للحديث: ((أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم )) رواه ابن عمر رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ( 2291 ) ورواه أيضاً سمرة وأبو مسعود - رضي الله عنهما - وأخرجه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير" وينظر، الروض الداني إلى المعجم الصغير، للطبراني، الجزء 2، 152-153 برقم 947.

في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي فقال صلى الله عليه وسلم، قل وأنا أسمع، ثم قال :

قلت: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني إليك وتنهل

إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت \*\*\* لشكواك إلا ساهرا أتململ

كأني أنا المطروق دونك بالذي \*\*\* طرقت به دوني وعيني تمهل

فلما بلغت السن والغاية التي \*\*\* إليها مدى ما كنت منك أوئل

جعلت جزائي منك جبها وغلظة \*\*\* كأنك أنت المنعم المتفضل

فليتك إذ لم ترع حق أبوتي \*\*\* فعلت كما الجار المجاور يفعل

فأوليتني حق الجوار ولم تكن \*\*\* علي بمال دون مالك تبخل

حتى قيل حينئذ أن النبي عليه السلام أخذ بتلابيب ابنه وقال " أنت ومالك لأبيك "

وهذا ما يراه الباحث أيضاً ويتفق فيه مع بعض فقهاء الفقه الإسلامي، على الرأي

القائل، بأن نفقة القاصر تجب في ماله، ولا يعتبر أخذ ذلك المال أو التقصير في

نفقته من الجرائم، وإلا وجبت على أبيه كما بينها الباحث سابقاً، وهذا بخلاف القانون

الليبي الذي الزمه الزاماً قاطعاً والا كانت جريمة جنائية عوقب عليها، وعليه فإن

الباحث يرى أن التقصير في القيام بالواجبات الأسرية ليست جريمة من حيث

الشريعة وإن تعددة الجرائم فيها من حيث القانون.

كما يرى الباحث أيضاً أن المبدأ يتشابه الى حد ما، ما بين الرأي المستند عليه

جمهور الفقهاء، وما بين ما أستند عليه القانون الليبي في الزام الآباء وسائر الأولياء

بتعليم الصغار وتوفير ما يلزم لهم قبل وبعد بلوغهم السن القانونية، وحيث من باب

الاحسان لهم بوجوب بأن يعلمونهم ما تصح به عقيدتهم من إيمان بالله وملائكته





















يرى الامام أحمد الغزالي، بأن هذه الوسائل اذ لم تطبق بالشكل الصحيح تصبح وسائل تشفي وانتقام بدلاً من أن تكون وسائل اصلاح وتربية وتعديل سلوك، ويضيف عليها بعض الشروط، بأن لا يكون الضرب إلا على ذنب، وأن يكون الضرب ضرباً غير مبرح، والا يترك عاهة والا يجرح عضواً والا يكره، والا يكون على الوجه والا يكون على الرأس وأن تكون آلة الضرب مألوفة، أي أن تكون رطبة معتدلة الحجم، ليس لها تأثير جسدي يسبب له إيذاء جسيم .<sup>283</sup>

يرى الباحث بأنه يجب على الاباء أن يتعاملوا مع أبنائهم بكل رحمة، ولا يعتدوا على أطفالهم بالضرب والقسوة، فالأب المعتدي على اطفال أسرته أشد جرماً من الاجنبي، لأن هذا الاعتداء جاء من مسؤول عن أمن أسرته وأطفاله، وبذلك لم يجد الباحث أن الفقه الإسلامي قد اشترط شكوى الطرف المتضرر في الجريمة، واعتبر الفعل مجرم بمجرد حصول النتيجة وأصر جمهور الفقهاء على أن الجاني يجب عليه الأخذ بعين الاعتبار الشروط السابقة في التربية والتأديب، ردعاً له وهذا ما جاء به الإسلام رحمةً ومودتاً، حيث جاء في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه، يقول، حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن يزيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( كلكم راع وكلكم مسؤول فالإمام راع

---

283 سمر خليل محمود عبدالله، حقوق الطفل في الاسلام، 137 . الإمام أحمد الغزالي ( المتوفي 1416هـ ) عالم ومفكر إسلامي مصري، يعد أحد دعاة الفكر الإسلامي في العصر الحديث، عُرف عنه تجديد في الفكر الإسلامي وكونه من "المناهضين للتشدد والغلو في الدين" كما يقول أبو العلا ماضي كما عُرف بأسلوبه الأدبي الرصين في الكتابة واشتهر بلقب أديب الدعوة. سببت انتقادات الغزالي للأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي العديد من المشاكل له سواء أثناء إقامته في مصر أو في السعودية. بعد تخرجه عمل إماماً وخطيباً في مسجد العتبة الخضراء ثم تدرج في الوظائف حتى صار مفتشاً في المساجد، ثم واعظاً بالأزهر ثم وكيلاً لقسم المساجد، ثم مديراً للمساجد، ثم مديراً للتدريب فمديراً للدعوة والإرشاد. وله العديد من المؤلفات الفقهية وغيرها ، وفي ( 1391هـ، 1971م ) أعير للمملكة العربية السعودية أستاذاً في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ودرّس في كلية الشريعة بقطر، وفي ( 1401هـ، 1981م ) عين وكيلاً لوزارة الأوقاف بمصر .

وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول (( . 284

#### أ. جدول مقارنة بين القانون الليبي والفقهاء الإسلاميين

محل الجريمة	من حيث القانون الليبي	من حيث الفقه الإسلامي
الاستعمال الغير مشروع لوسائل الإصلاح والتربية (العنف العائلي)	لم يجرم القانون الليبي اتجاه ارادة الوالدين نحو القيام بإساءة استعمال وسائل الإصلاح والتربية الا بالعنف العائلي و لا يعتبر هذا الفعل في القانون الليبي جريمة الا بعد النظر للنتيجة المتعلقة بالفعل و قيد هذا الركن بشرط تعرض القاصر أو الابن لمرض في الجسم أو في العقل وأن يجب على الثاني تقديم شكوى الا وهو الطرف المتضرر.	ما ذاهب اليه جمهور من الفقهاء كالإمام أحمد الغزالي على تجريم هذا الفعل والذي خالفت القانون الليبي بأن لا تأخذ بشكوى الطرف المتضرر كنتيجة لهذا الفعل ككون المجني عليه قاصراً لم يبلغ سن الرشد وانفتحت مع القانون الليبي في شروط النتيجة المتعلقة بالفعل من حيث تعرض القاصر لمرض في الجسم أو في العقل أو تعرضه لعاهة مستديمة.

#### ب. موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي من تلك الجرائم

أما عن موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي فهو لم يتطرق الى سوء استعمال وسائل الإصلاح والتربية ولم يتطرق الى الضرب كجرمه تتبعه وإنما ترك لقانون العقوبات الليبي سن القوانين الخاصة بهذا الشأن، فقانون العقوبات الليبي ينظر الى الأسرة على أنها شيء مقدس ويجب أن تحمي جنائياً في تلك الجريمة، وأكتفى في المادة الثامنة عشرة منه في حق الزوج على زوجته في الفقرة الرابعة والخامسة منها

284 محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، 1988م . رقم الحديث 4892 .





## 5\_ إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال في منظور قانون العقوبات الليبي

ينص قانون العقوبات الليبي على إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال بنصه :  
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس كل من أساء معاملة أحد أفراد أسرته  
أو صغير دون الرابعة عشرة أو أي شخص آخر خاضع لسلطته أو معهود إليه به  
لتربيته أو تثقيفه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن، وإذا نجم عن الفعل أذى  
شخصي زيدت العقوبة بقدر النصف فإذا نجم عنه الموت كانت العقوبة السجن .<sup>288</sup>

مكررة " أ " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجيه أو  
أصوله أو فروعه أو إخوته أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع  
مع قدرته عليه مدة شهر بعد التنبيه عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .<sup>289</sup>

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مدة  
لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم  
عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة عليه.

مكررة " ب " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين  
جنيهاً كل من امتنع عن تسليم صغير إلى من له الحق في طلبه، بناء على حكم  
قضائي أو قرار صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك كل من خطفه بنفسه أو  
بواسطة غيره، ممن لهم بمقتضى الحكم أو القرار حق حضانته أو حفظه ولو كان  
ذلك بغير تحايل أو إكراه .<sup>290</sup>

288 قانون العقوبات الليبي، الجرائم العام، الفصل الثاني، الباب الأول الجرائم المتعلقة بالأسر، المادة " 398 "

289 نفس المرجع، الفصل الثاني، المادة " 398 " مكررة ( أ )

290 نفس المرجع، الفصل الثاني، المادة " 398 " مكررة ( ب )





تعتبر جريمة إساءة معاملة أفراد الأسرة، من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها توفر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة، لذا فإنه يجب لقيام هذه الجريمة أن يعلم الجاني أن فعل الإساءة هذا الذي قام به دون مسوغ قانوني مشروع، قد يلحق ضرراً فادحاً بهذا الطفل المجني عليه، أو سيسبب له ضرراً مستديماً لصحته كإصابته بمرض من الأمراض المزمنة أو موته.<sup>293</sup>

يرى الباحث بأن الغالب أن يكون التأثير الإجرامي للأسرة على شخصية الطفل غير مباشر، كما أشار له، سلمان عبدالله في كتاب أصول علم الأجرام والجزاء، فمن خلاله فقد رأينا أن منزل الأسرة هو الموطن الأول الذي يعيش الطفل فيه سنواته الأولى، حيث يبدأ فيه بناء هيكل شخصيته، ولذلك فإنه يتأثر بكل ما يمر من حوله، وأول عناصر هذا الهيكل هو تكوين الضمير الأخلاقي للطفل، والتي تحتوي على المبادي السامية، والقيم الدينية والخلقية والاجتماعية، كما أن من أهم عناصر هيكل شخصية الطفل هي تطوير ملكات الجانب العاطفي لديه، من خلال المعاملة الحسنة، ولا شك في أن دور الأبوين في هذا المجال هو دور أساسي وحاسم.<sup>294</sup>

**الفقرة الثانية :** الامتناع عن دفع نفقه أو أجره الحضانة بعد صدور حكم نهائي :  
لقد وضع الباحث في الإطار النظري سابقاً أن نفقة الزوجة والأسرة واجبه شرعاً وقانوناً على الزوج سواء كان موسراً أو معسراً، رغم أن هناك من خرج عن هذا الإجماع.

293 عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام الجريمة ( الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية، 1998م ) 231 .  
القصد الجنائي : أشار قانون العقوبات الليبي في كثير من مواده إلى القصد الجنائي دون أن يشير إلى تعريفه كغيره من قانون العقوبات على وجه العموم، وقد حاول الفقه القيام بهذه المهمة فقبل بتعريفات عديدة لا تختلف في مضمونها إذ تدور حول نقطتين، الأولى: وجوب أن تتوجه الإرادة إلى ارتكاب الجريمة، و الثانية : ضرورة أن يكون الفاعل على علم بأركانها فإذا تحقق هذان العنصران معا ( العلم و الإرادة ) قام القصد الجنائي و بانتفائهما أو انتفاء أحدهما ينتفي القصد الجنائي، ينظر فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات الليبي، 450 .  
294 سليمان عبدالمنعم، أصول علم الإجرام، 399 .



يقصد المشرع الليبي بالحكم النهائي، هو الذي أستكمل كافة طرق الطعن ولا يقبل إعادة النظر فيه، حيث الحكم الجنائي قليل الحصول من الناحية الواقعية، وذلك نظراً لما استوجبه المشرع من شروط وحالات معينة لإجازته، حتى غن الحديث عنه من الناحية القانونية يكاد يكون هو الآخر قليل، بل إنه منذ إنشاء المحاكم الليبية تعد الطعون المقدمة بإعادة النظر نادرة جداً.<sup>296</sup>

حيث يرى البعض أن الحكم النهائي يعني الحكم البات، أي غير القابل للطعن بأي طريقه، وهو ما يجري به الواقع، في حين يكفي البعض الآخر بكونه الحكم غير القابل للطعن بالطرق العادية فقط، بحيث يجيزون هذا الطلب و لو كان الحكم قابلاً للطعن بالنقض أو مطعون فيه بالنقض فعلاً.

الأمر الذي كان يتعين معه على المشرع الجنائي تحديد مصطلحاته التي يستخدمها تحديداً منضبطاً ومتفقاً مع طبيعة وغاية الموضوع الذي يتحدث عنه كل في نطاقه، لاسيما إذا كانت هناك عدة مصطلحات في الموضوع الواحد ولكل منها معنى مغاير للآخر، كما هو الحال في الموضوع الراهن.<sup>297</sup>

**الفقرة الثالثة :** الامتناع عن تسليم صغير إلى من له الحق في حضانته أو حفظه بناء على حكم قضائي :

(أ) -توافر القصد الجنائي

اشتراط المشرع الليبي أن يكون قرار التسليم صادر بناء على قرار أو حكم من جهة القضاء بشأن حضانته أو حفظه، لأن الأحكام هي عنوان الحقيقة، كما إنها

296 محمد خميس ابراهيم، الإخلال بحق المتهم في الدفاع ( رسالة دكتوراة-- جامعة الإسكندرية، 2000م ) 245 .

297 عبد الحكم فودة، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها، في ضوء الفقه وقضاء النقض ( مصر: الإسكندرية، دار المعارف، 2007م ) 19 وما بعدها. و أحمد فتحي سرور، الخطر المزدوج وحجية الأحكام، مجلة إدارة قضايا الحكومية، عدد 4، 48 . محمد محي الدين عوض، القانون الجنائي و اجراءاته، الجزء 1، 257 .

تمحص وقائع الدعوى ولا تصدر حكماً الا بعد تيقنها أن الاب غير جدير بالاحتفاظ بالابن وأن مصلحة الابن أن يسلمه الأب الى غيره، الذي أصبح في نظر المحكمة غير جدير ببقاء الابن معه، وحيث أن الاستمرار معه هو ضرراً للابن، ولذا يجب لمعاقبة المتهم على تلك الجريمة هو توافر القصد الجنائي وعلمه بوجود حكم محكمة بتسليم الصغير . 298

فيما يلي يعرض الباحث صورة لكيفية رفع دعوى عن الممتنع عن تسليم صغير لحضانتة أو الأشراف عليه وفق القانون الليبي. كما في الشكل الآتي في ملحق البحث . 299

#### الفقرة الرابعة : شكوى الطرف المتضرر

كقاعدة عامة أن النيابة العامة هي التي تملك سلطة تحريك الدعوى العمومية دون غيرها، لأنها هي التي تمثل المجتمع، و تنوب عنه في متابعة الجناة المجرمين وفي المطالبة بتوقيع العقوبات عليهم.

#### أ\_ المفهوم القانوني للشكوى :

هي ما تقدمه الضحية من بلاغات إلى السلطات المختصة مثل النيابة العامة، كأن تطلب فيه منها بتحريك الدعوى العمومية، شريطة أن يكون ذلك بخصوص الجرائم التي تكون النيابة العامة لها سلطه في تحريك الدعوى العمومية بشأنها، والمقيدة بقوة القانون بناء على تقديم هذه الشكوى من طرف المتضرر، ومن بين الدعاوى التي يشترط فيها القانون تقديم الشكوى " جريمة التقصير في القيام بالواجبات العائلية وجرائم سوء استعمال وسائل الاصلاح والتربية وجرائم إساءة

298 محمد جلال بيومي، مذكرة دفاع عن امتناع عن تسليم صغير، دائرة الجنايات في اللجنة رقم 12201 ( 2010م ) جنايات.

299 شكل بين صحيفة رفع دعوى جائية والمتمثلة بجنحة امتناع عن تسليم صغير، وفق المحاكم الليبية، في ملحق البحث، k . L









الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ، وللزوج أن يُجري المقاصّة بين ما أداه من النفقة المؤقتة، وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً؛ بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.<sup>306</sup>

حيث أن الأحكام التي جاء بها هذا النص تتلخص فيما يأتي :

أ\_ أبقى الأساس السابق في أنّ تقدير نفقة الزوجة يكون بحسب حال الزوج يُسرّاً أو عسرّاً.

ب\_ أوجب على القاضي فرض نفقة مؤقّنة للزوجة في حالة قيام سبب استحقاق النفقة، وتوافر شروط هذا السبب، وذلك في خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدّعى بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى أن يتم الحكم في النزاع.

لأنّه يقضي على مشكلة حيرة الزوجة في حصولها على نفقتها، وما تلاقيه من متاعب بسبب الإشكالات والتأجيلات، مع ملاحظة أنّ الشريعة الإسلامية ليست هي المسؤولة عن تلك الإجراءات المعطلة لحصول الزوجة على نفقتها، وإنّما المسؤول الأول عن ذلك هو عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية منهجاً وسلوكاً.

ج\_ أعطى الزوج حقّ إجراء المقاصّة بين ما أداه من نفقة مؤقّنة، وبين ما حكم به نهائياً للزوجة، بحيث يترك لها ما يفي بحاجتها الضرورية، وبذلك يكون ملزماً الزام قطعي بدفع ما عليه من دين، ويعتبر حقاً للزوجة في ذلك كل ما يلزمها ويلزم أبنائها

307 .

306 محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل السلام، 222-226

307 محمد مصطفى شلي، ملحق أحكام الأسرة، 28 . نقلاً عن أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحياء علوم الدين ( لبنان : بيروت، دار المعرفة، 450هـ، 2005م ) أما المقاصّة بين دين النفقة وبين دين ثابت للزوج على الزوجة من قبل، فقد منعه القانون المذكور إلاّ فيما زاد عن حاجة المرأة الضرورية، وهو مسلك حسن أيضاً؛ لأن القاعدة الشرعية أن الضروريات مقدمة على أداء الدين.



**المذهب الحنبلي :** يرى هذا المذهب بأن يكون خاصا بالزوجين دون غيرهما، باستثناء ابنه الذي لم يبلغ سنّ التمييز، فإذا كان مشغولاً بسكنى أحدٍ مَهَمًا كان قريباً، فإنّه لا يعد سكناً شرعياً، حيث لا تحقق فيه الزوجة حرّيتها الكاملة، وأن يكون المسكن مأموناً، وإلا فلا يعدّ مسكناً على الإطلاق، بل أنّ مظاهر الأمن فيه أنّ يكون بين جيران صالحين، حتى تكون الزوجة آمنةً فيه على نفسها ومالها، ويلاحظ أنّه إذا كان متزوجاً بأخرى، فإنّ وجود هذه الزوجة في مسكنٍ مُجاور لها يعدّ إخلالاً بشرعية المسكن إذا كانت تتأذى من وجودها .<sup>310</sup>

حيث إنّ أعد لها مسكنها بالشروط السابقة، وجب عليها الاستقرارُ فيه، ولا تخرج منه إلا بإذنه، أمّا إذا امتنع عن إعداد هذا المسكن، أو أعدّ مسكناً لا تتوافر فيه الشروط السابقة، فإنّ من حقها أن تطالبه بأجرة مسكن شرعي.

**المذهب الشافعي :** يرى المذهب الشافعي بأن يجب على الوالد وإن علا نفقة ولده، وإن سفل، فالأب مكلف بالإنفاق، على أولاده ذكوراً وإناثاً، فإن لم يكن لهم أب، كلف بالإنفاق عليهم الجد أبو الأب القريب، ثم الذي يليه، ودليل ذلك من الكتاب قول الله عز وجل ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ .<sup>311</sup>

واستدلوا من السنه : عن عائشة رضي الله عنها، أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال، " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " يقصد: خذي من مال أبي سفيان .<sup>312</sup>

310 محمد شلبي، أحكام الأسرة، 185 .

311 سورة الطلاق - الآية: 6

312 يحيى بن شرف أبو زكريا النووي، شرح النووي على مسلم، الجزء3 ( بيروت : دار الخيزر، 1416هـ، 1996م ) باب قضية هند، رقم الحديث 1714 .





أ. جدول مقارنة في تلك الجرائم بين القانون والفقهاء الإسلامي

محل الجريمة	من حيث القانون الليبي	من حيث الفقه الإسلامي
إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال	تعتبر جريمة إساءة أفراد الأسرة من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها توفر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة، لذا فإنه يجب لقيام هذه الجريمة أن يعلم الجاني أن فعل الإساءة هذا الذي قام به دون مسوغ قانوني مشروع يلحق ضرراً فادحاً بهذا الطفل المجني عليه، أو سيسبب له ضرراً مستديماً لصحته كإصابته بمرض من الأمراض المزمنة أو موته	أن تكون من الجرائم العمدية هذا غير متفق فيه عند فقهاء المذاهب الأربعة إلا أن من الأرجح من المحتمل أن الكثير من الأسر التي تسيء معاملة الأطفال وقعت ضحية لدائرة من العنف المتوارث فنجد أن الأب والأم تعرضوا لمثل هذا التصرف عندما كانوا صغاراً حيث يميل الناس إلى التعامل مع أطفالهم بنفس الطريقة التي عوملوا بها عندما كانوا صغاراً. ودون توفر القصد الجنائي وهذا بخلاف القانون الليبي
الامتناع عن دفع النفقة أو أجرة الحضانة بعد صدور حكم نهائي	إذا رفعت الزوجة دعوى لتسديد النفقة و اقتنعت المحكمة بطلباتها وفقا لما قدمته من بيانات و أدلة لتدعيم طلبها قضت على الزوج بتقديم النفقة المستحقة فإن امتنع الزوج عن تنفيذ الحكم و عودته على الإنفاق على زوجته كالمعتاد من حقها إذن أن تبلغ وكيل النيابة بنسخة من الحكم ليتابعه بجريمة الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاءً، حيث أن الجريمة المقررة للزوج الممتنع عن النفقة المحكوم بها تعتبر جريمة الإهمال العائلي أو ترك الأسرة و صنفها المشرع الليبي	أن الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة عند الفقه الإسلامي بأن يُرفع أمره إلى القضاء مرة أخرى؛ للنظر فيه، فإن كان قادراً على الوفاء أمره بذلك، فإن أدى ما عليه أُخلى سبيله، وكذلك يخلى سبيله إذا أحضر كفيلاً يضمن أداء المبلغ المحكوم به عليه، وهذا بخلاف القانون الليبي أمّا إذا امتنع عن الوفاء ولم يُوجد من يكفله، فإن المحكمة تأمر بحبسه لمدة لا تزيد عن شهر، على أن يخلى سبيله في أي لحظة يقوم فيها بالسداد أو بتقديم كفيل. وهذا ما ذهب إليه

<p>المذهب المالكي ، واتفقت معه جميع المذاهب الاخرى الا المذهب الحنبلي الذي رأى إن كانت المرأة ناشزاً، فلا نفقة لها.</p>	<p>على إنها إساءة الأسرة والأطفال على أنها جناية.</p>	
<p>أوجب الإسلام الحضانة للصغار وجعلها لكلا الزوجين بدون رفع الأمر للحاكم فاستحق الزوج النفقة واستحقت الام الحضانة وهذا باتفاق المذاهب الأربعة بالعموم شريطة أن تكون أمينة على الصغار حريصة على الدين والخلق. فإذا كانت سيئة الخلق ولا تؤمن على الصغير لم تسند حضانته لها.</p>	<p>اشتراط المشرع الليبي ان يكون قرار التسليم صادر بناء على قرار أو حكم من جهة القضاء بشأن حضانته أو حفظه لان الأحكام هي عنوان الحقيقة كما انها تمحص وقائع الدعوى ولا تصدر حكماً الا بعد تيقنها أن الاب غير جدير بالاحتفاظ بالابن وان مصلحة الابن ان يسلمه الأب الذي اصبح في نظر المحكمة غير جدير ببقاء الابن معه وان الاستمرار معه هو ضرراً للابن.</p>	<p>الامتناع عن تسليم صغير إلى من له الحق في حضانته أو حفظه</p>
<p>اتجه فقهاء الفقه الإسلامي على الرأي الراجح أن شكوى الطرف المتضرر ليست واجبه لكي تتحقق الجريمة فمجرد الاساءة لإفراد الأسرة يجرم الفعل وهذا ما يخالف القانون الذي جعل شرط رفع الدعوى ركن أساسي لتحقيق الجريمة</p>	<p>شكوى الطرف المتضرر في القانون الليبي ركن أساسي لتحقيق الجريمة ورفع الدعوى وبالتالي أن النيابة العامة هي التي تملك سلطة تحريك الدعوى العمومية دون غيرها لأنها هي التي تمثل المجتمع، و تتوب عن المجني عليهم في متابعة الجناة المجرمين وفي المطالبة بتوقيع العقوبات عليهم .</p>	<p>شكوى الطرف المتضرر</p>

## ب. موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي من تلك الجرائم

أما عن موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي، فهو لم يتطرق الى جرائم إساءة معاملة أفراد الأسرة والاطفال بشكل خاص، وانما تركها لقانون العقوبات " الجرائم العامة " الا في مسألة تنظيم النفقة في الفصل السادس منه بأن للنفقة أحكام عامة، وحيث ما إذا نظرنا الى المواد التالية لوجدناها تقر بالنفقة على الزوجة، حيث نصت المواد على الآتي :

المادة الثانية والعشرون : تشمل النفقة على المسكن والطعام والكسوة والعلاج وكل ما به مقومات الحياة.

المادة الثالثة والعشرون : تجب نفقة الزوجة على زوجها الموسر من تاريخ العقد الصحيح، كما تلزم الزوجة الموسرة بالنفاق على زوجها وأولادها منه مدة إعسار الزوج، وتقدر النفقة بحسب حال الملزم بها وقت فرضها عسراً أو يسراً.

المادة الرابعة والعشرون : يجوز طلب زيادة النفقة أو نقصانها لتغير حال المنفق أو أسعار البلد أو ظهور مالم يكن ظاهراً من حال الملزم بها.

المادة الخامسة والعشرون : يحق لكل من الزوجين أن يسكن معه في بيت الزوجية من تجب عليه نفقته شرعاً، ما لم يثبت الإيذاء من المشاركة في السكن بحكم من المحكمة المختصة.<sup>315</sup>

حيث يدخل في حكم المحكمة الطعون بكافة أنواعها في حالة ما تمت قصور في الحكم، وبذلك يكون حق الطعن مكفول للمتهم.

315 صيغ قانون الأحوال الشخصية تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث ( 1393 هـ، 1983 م ) في ليبيا والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية في مؤتمر الشعب العام في دور انعقادها العادي التاسع في الفترة من ( 8 إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول . الموافق من 11 إلى 16 فبراير 1984 م ) المادة " 22 " والمادة " 23 " والمادة " 24 " والمادة " 25 "

### ج. مناقشة الباحث للتحليل والنقد لتلك الجرائم

يتفق الباحث مع الرأي القائل بأن هذه الجريمة من أخطر الجرائم التي تهدد حياة الطفل بشكل خاص، وتهدد الأسرة والعائلة بشكل عام، وينتقد الباحث في كون السبب المؤدي لها هو نتيجة فعل التفكك الأسري، غير أن القانون الليبي يعتبر بأن تلك الجريمة من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها توفر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة.

ينتقد الباحث كون فعل الإساءة هذا يتطلب على الجاني قبل وقوعه دون مسوغ قانوني مشروع بأنه يلحق ضرراً فادحاً بهذا الطفل المجني عليه، أو سيسبب له ضرراً مستديماً لصحته كإصابته بمرض من الأمراض المزمنة أو موته.

يستند الباحث مع رأي جمهور الفقهاء في ذلك، حيث أن تكون تلك الجريمة من الجرائم العمدية هذا غير متفق فيه عند فقهاء المذاهب الأربعة ويذهب مع الرأي الراجح الذي يرى بأن الكثير من الأسر التي تسيء معاملة الأطفال وقعت ضحية لدائرة من العنف المتوارث، وإنهم تعرضوا لمثل هذا التصرف عندما كانوا صغاراً حيث يميل الناس إلى التعامل مع أطفالهم بنفس الطريقة التي عوملوا بها عندما كانوا صغاراً ودون توفر أي قصد جنائي.

أما من حيث شكوى الطرف المتضرر فإن القانون الليبي جعله ركن أساسي لتحقيق الجريمة ورفع الدعوى، وهذا ما لا يتفق فيه الباحث معه، وبالتالي فإن النيابة العامة هي التي من المفترض أن تملك سلطة تحريك الدعوى العمومية دون غيرها، حيث إنها تمثل المجتمع، و تنوب عن المجني عليه في متابعة الجناة المجرمين وفي المطالبة بتوقيع العقوبات عليهم.

يتفق الباحث مع رأي جمهور الفقهاء الذي يرى بأن شكوى الطرف المتضرر ليست واجبه لكي تتحقق الجريمة، حيث بمجرد الاساءة يجرم الفعل وهذا ما يخالف القانون الذي جعل شرط رفع الدعوى ركن أساسي لتحقيق الجريمة.

إذا ما تأمل القارئ في مسألة الامتناع عن دفع النفقة في حالة ما إذا رفعت الزوجة دعوى و اقتنعت المحكمة بطلباتها وفقاً لما قدمته من بيانات، لوجد أن الجريمة المقررة للزوج الممتنع عن آدائها تسمى في القانون " الإهمال العائلي " أو ترك الأسرة و صنفها المشرع الليبي على أنها جنائية تدخل تحت النص القانون المتعلق بجريمة إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال.

ينتقد الباحث المشرع الليبي في كون اعتبار الفعل جنائية، حيث من المعروف أن ذلك الإهمال أو التقصير في ذلك الفعل يدخل تحت قانون الأحوال الشخصية و لا ترتقي تلك الأفعال الى أفعال جنائية.

يرى الباحث أن ما ذهب اليه جمهور الفقهاء هو الأقرب للصحيح، في كون الزوج ما إن كان قادراً على الوفاء و أدى ما عليه في زمن ليس بالقريب، فهنا لا يجرم الفعل فيه، حيث يعتبر هذا الفعل من باب التأخير أو باب الحرص على الوفاء، وليس من باب التعمد في عدم السداد، حيث ما إذا تم النظر في نصوص قانون العقوبات الليبي لوجدناها مجحفة نوعاً ما في كونها أعطت القاضي سلطة تقديرية في الفصل في هذا الشأن، وفي جميع تلك الأحوال يتفق الباحث مع الرأي الأرجح والأقرب للصواب، رغم أن الانتقادات التي وجهها الباحث لا تعتبر جرح لهذا القانون وإنما تعتبر داعمه له لتطويره ومعالجته وتحديثه وإدخال التعديلات عليه بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.

ب. المبحث الثاني / العقوبات القانونية لجرائم الأسر وتوافقها مع الشريعة الإسلامية

## 1\_ عقوبة الجرائم المتعلقة بالتقصير في القيام بالواجبات العائلية عند قانون العقوبات الليبي

نصت المادة 396 من قانون العقوبات الليبي فيما يتعلق بعقوبة جرائم التقصير في القيام بالواجبات العائلية على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهاً كل من تخلص من القيام بالواجبات الإعانة المترتبة على مكانته الأبوية، الى آخر المادة كما ذكرها الباحث سابقاً، ومن ثم نص في بداية الفقرة الثانية من المادة بأنه العقوبة تزداد الى النصف اذا ارتكب الفاعل بعض الأفعال المنصوص عليها والمتمثلة في سلب وتبذير اموال الأبن القاصر، واموال من له وصاية عليه، أو جرد من وسائل العيش أحد أصوله أو احد فروعها، وجاءت المادة 398 مكرر " ج " من نفس القانون مكملة للعقوبة بقولها لا تقام الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المواد 396 و 397 و 398 مكرره " أ " و 398 مكررة " ب " الا بناء على شكوى الطرف المتضرر.

بالتالي اذا اشتكى الطرف المتضرر وفق القانون الليبي في إحدى تلك الجرائم المنصوص عليها سابقاً فيحق له العدول والتنازل عن الدعوى وقت سريانها، وفي حالة ما تم التنازل من طرف المجنى عليه، فعلى القاضي الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.

من خلال النصوص السابقة والمعطيات يمكن تحليل وتقسيم العقوبات التي تصدر عن جرائم التقصير في القيام بالواجبات العائلية وفق القانون الليبي الى ثلاثة عقوبات رئيسيه والتي تدخل بشكل مباشر بموضوع الأطروحة كما هو في الآتي :



















ووفقاً لهذا المعيار في القانون الليبي يحق لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل، وذلك طبقاً للمادة " 10 " من قانون الإجراءات الجنائية الليبي والتي تنص على أن يكون التنازل وفق الشروط التالية :

(1)\_ لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل، وفي حالة تعدد المجني عليهم عددًا لا بأس به، فهذا لا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .

(2)\_ إذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، وذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة،

بناءً على ما سبق يعرف التنازل على أنه إسقاط حق المجني دعواه بإرادته المنفردة دون إكراه، فهو عمل أحادي الجانب أو تصرف قانوني بالإرادة المنفردة، فلا يلزم لصحة التنازل عن الدعوى أو لإتمامها أن يصادفها قبول من جانب المدعى عليه، فالمدعى عليه ليس له أي مصلحة في رفض التنازل عن الدعوى، لأن التنازل عن الدعوى يمنع المدعي من رفع دعوى جديدة فلم يعد المدعى عليه يخشى من رفع الدعوى ضده من جديد، وحيث أن الباحث في هذا الصدد يدعم بحثه ويرفق أحكام صادرة عن المحاكم الليبية، دائرة الجرح والمخالفات والتي تختص بالجرائم المذكورة سابقاً، وكيفية انقضائها بالتنازل، ممن لهم الحق في أن يتنازلوا، سواء كان من قبل المتهم، أو كان من قبل الشاكي، كما أن الباحث يستدل على ذلك بما حكم به القاضي في الدعاوي الآتية في إحدى المحاكم الليبية كما هو مبين في الآتي :











يأذيها وذلك في أحد قولي الشافعية،<sup>342</sup> وقد قرر الفقهاء مشروعية الجمع بين الحبس تعزيراً وبين غيره من أنواع التعزير، ومن ذلك تقييد السفهاء والمفسدين في سجونهم وحبس من طلق في الحيض وضربه.<sup>343</sup>

#### أ\_ مدة الحبس عند جمهور الفقهاء

حيث لمدة الحبس عند الفقهاء حد أدنى وحد أعلى، بحسب حال الجاني وجريته، والاصل أن تقدير مدة الحبس يرجع الى الحاكم مع مراعاة ظروف الشخص والجريمة والزمان والمكان، وقد أشار الزيعلي الى ذلك بقوله : ليس للحبس مدة مقدرة، وقال الماوردي : إن الحبس تعزيراً يختلف باختلاف المجرم، وباختلاف الجريمة فمن الجانبين من يحبس يوماً ومنهم من يحبس أكثر لي غاية غير مقدرة، لكن الشرييني من الشافعية ذكر أن شرط الحبس هي : النقص عن سنة كما نص عليه الشافعي في الإثم، وصرح به معظم الفقهاء، وأطلق الحنابلة في تقدير المدة.<sup>344</sup>

(أ)\_ أقل المدة :

في كلام بعض الشافعية أن أقل مدة الحبس يوم واحد، وبالتالي يقصد به تعويق المحبوسين عن التصرف بنفسه، ليضجر وينزجر لأن بعض الناس تتأثر بحبس يوم فيعتم.<sup>345</sup> حتى بالحبس عن حضور صلاة الجمعة، وقال آخرون أقل مدة الحبس يوم واحد أخذاً بالرأي الأول.<sup>346</sup>

342 حاشية ابن عابدين، 469 . والأشباه للسيوطي، 491 .

343 محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، أحكام القرآن لابن العربي، المحقق : محمد عبد القادر عطا ( لبنان : دار الكتب العلمية بيروت، ط3، 1424هـ، 2003م ) 625.

344 فتح القدير، الجزء6، 375 . وحاشية ابن عابدين، الجزء 4، 326 . وتبصرة الحكام، الجزء2، 373. والأحكام السلطانية للماوردي، 224. ومغني المحتاج، الجزء 4، 192 . وكشاف القناع، الجزء4، 74-75 .

345 حاشية ابن عابدين، الجزء5، 384 .

346 محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، القرشي، ضياء الدين، معالم القرية في طلب الحسبة، الجزء1 (دار الفنون كمبرج ) 191 . وتبصرة الحكام، الجزء2، 329 .

ب) - أكثر المدة :

جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، لم يقدرُوا حداً أعلى للحبس بقصد التعزير، وفوضوا ذلك الى القاضي، فيحكم بما يراه مناسباً لحال الجاني، لأن التعزير فرع من فروع الحبس، مبنى على ذلك الى القاضي فيحكم بما يراه مناسباً لحال الجاني، فيجوز للقاضي استدامة حبس من تكررت جرائمه من أصحاب الجرائم الخطيرة، وللشافعية في هذا ثلاثة أقوال : أحداها للزبيري، وقدر أكثر الحبس بستة أشهر، والقول الثاني وهو المشهور، وقدر بسنة أو النفي المذكور بالحد، والقول الثالث لأمام الحرمين، والذي وافق فيه الجمهور في عدم تحديد أكثر المدة، وقد أجاز بعض الشافعية العمل بمذهب الجمهور على أن يكون الحامل على ذلك المصلحة لا التشهي والانتقام .<sup>347</sup>

### ب\_ التمييز بين الحبس القصير والحبس الطويل

ميز الفقهاء بين الحبس القصير والحبس الطويل، فسمى الفقهاء أقل ما كان من سنة حبساً قصيراً، وما كان سنة فأكثر حبساً طويلاً، وقضوا على أصحاب الجرائم الغير الخطيرة مثل التقصير في القيام بالواجبات العائلية بالحبس القصير ثلاثة أيام وقضوا على ذلك أصحاب الجرائم الخطيرة ومعتادي الأجرام بالحبس الطويل مثل حبس الزاني البكر سنة بعد الحد .<sup>348</sup>

### ج\_ سقوط الحبس عند جمهور الفقهاء

يقصد به توقيف تنفيذه بعد النطق به، سواء أبادي بتنفيذ بعضه أم لم يبدأ وأسبابه عند جمهور الفقهاء هي :

347 حاشية ابن عابدين، الجزء 4، 67 . وتبصرة الحكام، 148. ينظر لأحكام السلطانية للماوردي، 165 .

348 تبصر الحكام، الجزء 1، 266 . ينظر لأحكام السلطانية للماوردي، 222 . ينظر حاشية ابن عابدين، الجزء 4، 67 . ينظر

الأحكام السلطانية لأبي يعلى، 259. ينظر تبصرة الحكام في أصول الأفضية، 310 .

أ) الموت : ينتهي الحبس بموت الجاني لإنهاء موضع التكليف، ولا يتصور استيفاء الحبس بعد انعدام المحل.

ب) الجنون : يرى جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، على أن الجنون الطارئ بعد ارتكاب الجريمة، يستوجب إيقاف تنفيذ الحبس فيه، لأن المجنون ليس مكافئاً شرعاً، ولا أهلاً للعقوبة والتأديب، وهو لا يعقل المقصود من الحبس لفقده الإدراك.<sup>349</sup> غير أن مذهب الحنابلة يرى : وهو قول أبي بكر الاسكافي من الحنفية أن الجنون لا يوقف تنفيذ الحبس، لأنه مرتكبها في وقت ارتكابها لم يكن لديه عارض أو مانع يمنعه من ذلك، وعللوا ذلك بأن الغاية من العقوبة التأديب والزجر، فإذا تعطل جانب التأديب بالجنون فلا ينبغي تعطيل جانب الزجر منعاً للغير.<sup>350</sup>

ج) العفو : إذا كان الحبس لحق آدمي سقط بعفوه، وضربوا مثالا على ذلك بالمدين المحبوس لحق الدائن.<sup>351</sup>

د) الشفاعة: تجوز الشفاعة للمحكوم عليه بالحبس قبل البدء بتنفيذ الحكم، وذلك إذ لم يكن صاحب أذى، لما فيها من دفع الضرر،<sup>352</sup> ويجوز للحاكم رد الشفاعة إن لم تكن فيها مصلحة، وقد رد عمر رضي الله عنه الشفاعة في معن بن زائد حين حبسه لتزويره خاتمه، رغم أن هناك من يقول بأن الشفاعة ملك لله وحده لا تطلب إلا منه، وآخرين يقولون إن الله أعطى الشفاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم فقط ولأوليائه الصالحين دون غيرهم.<sup>353</sup>

349 الكساني، بدائع الصنائع، الجزء7، 63-64 . ينظر حاشية ابن عابدين، الجزء5، 378-426 . ينظر. حاشية القليوبي، الجزء3، 260 .

350 مرعي بن يوسف بن الكرمي، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، المحقق: ياسر إبراهيم المزروعى ورائد يوسف الرومي، الجزء3 ( 1428هـ، 2007م )، 316 .

351 فتح القدير، الجزء5، 471 . ينظر .حاشية ابن عابدين، الجزء5، 388 .

352 حاشية القليوبي، الجزء4، 206 . ينظر .الأحكام السلطانية للماوردي، 237 .

353 المغني لابن قدامة، الجزء8، 325 .



إني أعود بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيز من المغرم ؟  
فقال : إن الرجل إذا غرِمَ حدَّثَ فكذب، ووَعَدَ فأخلف .<sup>356</sup>

أما في الاصطلاح كما قال بعض الفقهاء : ما يُعطى من المال على كُره الضرر  
والمشقة،<sup>357</sup> وهذا يتفق مع ما ذكره آخرون، بأن معناها الاصطلاحي : لا يخرج  
إجمالاً عن معناها اللغوي، وفي ضوء هذا يبدو أن تعريف مجمع اللغة العربية  
للغرامة . الذي تقدم ذكره . هو الأوفى والأشمل دلالة .<sup>358</sup>

موجب الغرامة : الأصل في موجب الغرامة مجاوزة الحد المشروع والتعدي بالأقوال  
والأفعال، على الأنفس والأبدان، ففي ذلك الغرامة، وهي الدية أو الأرش. أما التعدي  
على الفروج ففيه فضلاً عن الحد غرامة صدّاق، مثل من اغتصبها وزنى بها ثم  
تزوجها، وأما التعدي على الأموال ففيه غرامةٌ مثل المتلف إن كان مثلياً، وقيمتِه إن  
كان قيميّاً، و للفقهاء في جواز العقوبة المالية رأيان :

#### (أ) \_ مذهب جمهور الفقهاء

هو عدم جواز عقوبة، الغرامة قال ابن عابدين تعليقاً على قوله " لا بأخذ مال في  
المذهب " قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال،  
وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف، وأفاد  
أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر،

356 صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، باب الدعاء قبل السلام، واللفظ له، 66 . وصحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة، باب ما  
يستعاذ منه في الصلاة، 769 .

357 محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، التعريفات الفقهية، معجم يشرح الألفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والأصوليين وغيرهم من  
العلماء ( بيروت : دار الكتب العلمية، 1424هـ، 2003م ) 399 .

358 أحمد الشرباصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي ( بيروت : دار الجيل، 1401هـ، 1981م ) 320-331 .

ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي .<sup>359</sup>

وقال الشيخ أحمد الصاوي المالكي وأما التعزير بأخذ المال فلا يجوز إجماعاً .<sup>360</sup>

وقال الإمام العمراني الشافعي في معرض ذكره لأنواع المزكين إن أخفوا أموالهم حبسهم الإمام، فإذا ظهرت ففي القدر الذي يؤخذ منهم قولان :

أحدهما: قال في القديم يأخذ منهم الزكاة، وشطر من مالهم، عقوبة لهم، لما روى بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ومن منعها فإننا آخذوها، وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد فيها شيء )) .<sup>361</sup> والثاني : قد قيل في الحديث، تؤخذ منه الزكاة لا غير .<sup>362</sup>

وقال ابن قدامة الحنبلي: والتعزير يكون: بالضرب، والحبس، والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء منه، ولا جرحه، ولا أخذ ماله، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به .<sup>363</sup>

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

(أ)ـ بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس في المال حق سوى الزكاة، وأن العقوبات كانت في أول الإسلام في الأموال ثم نسخ ذلك .<sup>364</sup>

359 محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المختار على الدر المختار، الجزء 4 ( لبنان : بيروت، دار الفكر، ط2، 1412هـ، 1992م ) 61 .

360 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، الفقه المالكي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء 6 ( دمشق : دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ نشر ) 370 .

361 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، شرح السيوطي سنن النسائي، كتاب الزكاة، رقم الحديث 2444، 17 . وقد نقل عن الشافعي أن هذا الحديث لا يشته أهل العلم .

362 أبو الحسين يحيى الشافعي، البيان في مذهب الإمام الشافعي، 137 .

363 موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني الفقه المقارن، الجزء 12 ( الناشر دار إحياء التراث العربي، ط1، 1405هـ، 1985م ) 526 . ( المتوفى 620هـ )



(ب) \_ مذهب بعض فقهاء الحنابلة

أن العقوبة المالية " الجزاء المالي " جائزة، وللحاكم أمر تقديرها بحسب نوع المخالفة والظروف المحيطة بها. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة :

منها: مضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطع فيه، كالحريسة، والثمر قبل أن يوضع في الجرين. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (( ضالّة الإبل المكتومة غرامتها، ومثلها معها )) .<sup>365</sup>

الراجح والله أعلم أن ما ذهب إليه البعض هو الذي ينبغي المصير إليه إذا وجدت الضوابط التي ذكرتها قبل قليل، حيث مذهبهم هو الأقرب الى الصحيح وهذا بترجيح الباحث، وللباحث في هذا الصدد تعليان أو مدلولان وذلك لأمرين :

أحدهما: كثرة ما ورد من الأمثلة في التطبيق العملي للعقوبة المالية، من الآثار المرفوعة والموقوفة غير التي ذكرتها في معرض الاحتجاج لرأي البعض .<sup>366</sup>

ثانيهما : أن الحديث الذي احتج به الجمهور ضعيف من جهة سنده، ومن جهة أن المحذور الذي اعتمد عليه الجمهور إذا ضبط زال المانع. حيث قال الامام الغزالي : للولي أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه، والباحث لا يرجح هذا الدليل كون أن الضابط الذي احتج به الجمهور ضعيف ولا يرتقي لأن يصبح دليل .<sup>367</sup>

364 أخرجه ابن ماجة في باب الزكاة، رقم الحديث 1789 . وهو حديث ضعيف كما قال النووي والسيوطي وابن حجر وغيرهم. زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، فيض القادير شرح الجامع الصغير، الجزء 5 ( مصر : المكتبة التجارية الكبرى، ط1، 1356هـ ) 374 .

365 نفس المرجع، 374 . أخرجه ورواه أحمد وأصحاب السنن، واللفظ لابن ماجة، رقم الحديث 640 . كما قال النووي في المجموع الجزء2، 360 . اتفق المحدثون على ضعف هذا الحديث واضطرابه.

366 محمد ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، 316 .

367 محمد ضياء الدين، معالم القرية في طلب الحسبة، نقلا عن الغزالي، 288 . ( المتوفى 505 هجري )

## أ. جدول مقارنة لمحل تلك العقوبات بين القانون الليبي والفقهاء الإسلاميين

محل العقوبة	من حيث القانون الليبي	من حيث الفقه الإسلامي
الحبس و مدة الحبس	ذهب القانون الليبي على عقوبة الحبس في التقصير في القيام بالواجبات العائلية لا تزيد عن سنة حيث ينص القانون الليبي بشكل عام على عقوبة الحبس بأن لا يجوز ان تنقص اربع وعشرين ساعة ولا ان تزيد على ثلاث سنوات الا في الاحوال المخصوصة التي أقرها المشرع الليبي والمنصوص عليها قانوناً.	ذهب الشافعية على أن أقل مدة الحبس في جرائم التقصير في القيام بالواجبات العائلية يوم واحد وأكثره ستة أشهر أما عن المالكية والحنابلة والحنفية فلم يقدروا حداً أعلى وأدنى للحبس وهذا بخلاف القانون الليبي وفوضوا ذلك الى القاضي فيحكم بما يراه مناسباً لحال الجاني، وقد أجاز بعض الشافعية العمل بمذهب الجمهور على أن يكون الحامل على ذلك المصلحة لا التشهي والانتقام.
السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة	عقوبة جريمة التقصير في القيام بالواجبات العائلية من العقوبات الأصلية التي أعطى لها القانون الليبي سلطة تقديرية للقاضي بالحكم بالعقوبة التي يراها مناسبة في حدود ما نص عليه القانون، وبذلك على القاضي أن يبين الاسباب التي تبرر تقديره، ولا يجوز له تعدي الحدود التي ينص عليها القانون لكل عقوبة بزيادتها أو إنقاصها الا في الاحوال التي يقرها القانون.	رجح فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وما ذهب إليه بعضهم على تفويض القاضي في تحديد العقوبة ليحكم بما يراه مناسباً لحال الجاني، لأن الحبس يأخذ حكم التعزير ، وبالتالي نجد القانون الليبي لا يخالف هذا المبدأ ويتفق مع الشريعة الإسلامية في جواز سلطة القاضي في تحديد العقوبة لجرائم التقصير في القيام بالواجبات العائلية.



غير أن جمهور الفقهاء، ومنهم ما ذهب اليه الشافعية يحددون بأن تكون أقل مدة الحبس في جرائم التقصير في القيام بالواجبات العائلية، يوم واحد وأكثره ستة أشهر، أما عن المالكية والحنابلة والحنفية فلم يقدروا حداً أعلى وأدنى للحبس وهذا بخلاف القانون الليبي وفوضوا ذلك الى القاضي، فيحكم بما يراه مناسباً لحال الجاني، وقد أجاز بعض الشافعية العمل بمذهب الجمهور على أن يكون الحامل على ذلك المصلحة لا التشهي والانتقام.

يستند الباحث على أقوال الفقهاء فيما يخص بتحديد مدة الحبس، لأنه جل القوانين الوضعية تكون مبنية على أمن تلك الدول، حتى أن مخالفتها للشريعة الإسلامية لا يعتبر من الأشياء الملزمة لها.

غير أن القانون الليبي يمتاز عن غيره في مسألة وقف تنفيذ الحكم بالحبس في تلك الجرائم، حيث بمجرد التنازل من طرف الشخص المتضرر تسقط الدعوى وبمجرد الحكم فيها بانقضائها لا يصبح لها أي أثر قانوني، وهذا ما يتشابه فيه القانون الليبي مع الرأي الراجح من أقوال الفقهاء، والذي يوقف فيه تنفيذ الحبس في تلك الجرائم إما بالموت أو الجنون أو العفو أو الشفاعة، وبذلك يأخذ العفو حكم التنازل وهذا ما ذهب اليه القانون الليبي تحديداً.

رغم أن السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة وفق القانون الليبي تكون من العقوبات الأصلية التي أعطى لها المشرع الليبي سلطة تقديرية مطلقة للقاضي بالحكم بالعقوبة التي يراها مناسبة، في حدود ما نص عليه القانون، وبذلك ينتقد الباحث تلك السلطة المطلقة ويشد بأهمية النظر الى الاسباب التي تبرر تقديره، ولا يجوز له تعدي الحدود التي ينص عليها القانون لكل عقوبة بزيادتها أو إنقاصها الا في الاحوال التي يقرها القانون.

أما عن العقوبة الأخرى المتعلقة بجريمة التقصير في القيام بالواجبات العائلية والمتمثلة في عقوبة الغرامة، فيرى فيها الباحث إجحافاً للمحكوم عليه، وبهذا يرى الباحث بوجوب تعديل هذا النص من هذا القانون، استناداً الى الرأي الراجح من أقوال الفقهاء والذي يرى بعدم جواز تلك العقوبة في تلك الجرائم، بغض النظر عن مذهب الحنابلة الذي يرى أن العقوبة المالية جائزة وللحاكم أمر تقديرها بحسب نوع الجريمة التي قصر فيها ولي الامر والظروف المحيطة به.

هنا أيضاً يرى الباحث أن علاج النتيجة الإجرامية في النص السابق لم يكن بالشكل المطلوب، حيث أن المشرع نص على النتيجة الأيسر نسبياً واغفل عن النص القانوني الصريح، وفي هذا الصدد أشار الباحث إلى أن المشرع عندما اشترط صفة الجاني لوقوع الجريمة قد وسع من نطاق العقوبة فيما يتعلق بالأشخاص الذين قد شاركوا في ارتكاب الجريمة من غير الأصول كزوجة الأب وغيرها، ولا يركن بذلك المبادئ العامة التي قد تحمل الفاعل ممن لم تتوفر به صفة الجاني أو الاشتراك في الجريمة، وبالتالي يفلت الشخص من العقاب اذا أفلت الفاعل الأصلي الذي يستمد منه اجرامه.

حيث بذلك تكون صفة المجني عليه في هذه العقوبة إما متهمًا أو شاهداً، وبالتالي أن الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي، والذي وجد الباحث فيه بانه لا يكفي فقط اتجاه ارادة الجاني إلى التقصير في القيام بتلك الواجبات أو التعمد في ذلك، ولكن هذا لا يعني أن يكون اعتراف المتهم بالتقصير انه مذنب ويجب تنفيذ العقوبة عليه، حيث يمكن أن يكون التقصير نتيجة سوء الأوضاع المعيشية لرب الأسرة، أو يكون نتيجة سبب قاهر له خارج عن إرادته.







على مواد ظروف تشديد العقوبة بقولها إذا نتج عن الفعل أذى شخصي طبقت العقوبات المقررة في المواد " 379 " الى " 381 " مع خفضها إلى النصف .<sup>372</sup>

ويحلل هذا النص بتحديد ماهية تلك المواد وتكييفها القانوني، وتحديد ماهية الأذى الشخصي وعقوبته والتي تكون كالاتي :

(أ) \_ فيما يتعلق بالمادة الأولى جريمة الإيذاء البسيط

تنص بأن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً كل من أحدث بغيره أذى في شخصه، أدى إلى مرض، وإذا لم تتجاوز مدة المرض عشرة أيام، ولم يتوافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة " 382 " فلا يعاقب على الجريمة إلا بناءً على شكوى الطرف المتضرر .

من خلال تحليل هذه المادة يجد الباحث الفقرة الأولى منها تنص على عقوبة الحبس والغرامة، وهذا ما تم تحليله في المطلب الأول ولكن في الفقرة الثانية نجد أن القانون الليبي قد وضع لها شروط، وهي اذ لم تتجاوز المدة عشرة ايام ولم يتوفر ظرف من الظروف التشديد في المادة " 382 " فلا يعاقب على هذه الجريمة الا بناءً على شكوى الطرف المتضرر وتنص هذه المادة على أحوال وعقوبة وظروف التشديد بنصها : تزداد العقوبة بمقدار لا يتجاوز النصف إذا حصل الإيذاء المنصوص عليه في المواد 379 و 380 و 381 مع سبق الإصرار أو التردد أو باستعمال السلاح، أو إذا ارتكب الإيذاء ضد أحد الأصول .<sup>373</sup>

372 قانون العقوبات الليبي، الجرائم العامة، المادة ( 379 ) والمتعلقة بجريمة الإيذاء البسيط، والمادة ( 380 ) والمتعلقة بجريمة الإيذاء الجسيم، والمادة ( 381 ) والمتعلقة بجريمة الإيذاء الخطير.

373 نفس المرجع، المادة ( 379 ) من قانون العقوبات الليبي تنص على الإيذاء البسيط بقولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً كل من أحدث بغيره أذى في شخصه أدى إلى مرض، وإذا لم تتجاوز مدة المرض عشرة أيام، ولم يتوافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 382 . فلا يعاقب على الجريمة إلا بناءً على شكوى الطرف المتضرر.

ب) - فيما يتعلق بالمادة الثانية وهي جريمة الإيذاء الجسيم

يعد الإيذاء الشخصي جسيماً وفق القانون الليبي بشروط معيته، ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه إذا توافر أحد الطرفين الآتيين:

1\_ إذا نجم عن الإيذاء مرض يعرض للخطر حياة المعتدى عليه أو يعرضه للعجز عن القيام بأعماله العادية مدة لا تزيد على أربعين يوماً.

2\_ إذا وقع الفعل على الحامل ونجم عنه تعجيل الوضع .<sup>374</sup>

ج) - فيما يتعلق بالمادة الثالثة وهي جريمة الإيذاء الخطير

وحيث يعد الإيذاء الشخصي خطيراً ويعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا نشأ عن الفعل الآتي :

1)\_ مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه.

2)\_ فقد حاسة من الحواس أو إضعافها إضعافاً مستديماً.

3)\_ فقد أحد الأطراف أو الأعضاء أو إضعافه إضعافاً مستديماً أو فقد منفعته أو

فقد القدرة على التنازل أو صعوبة مستديمة جسيمة في الكلام .<sup>375</sup>

374 قانون العقوبات الليبي، الجرائم العامة، المادة ( 380 ) من قانون العقوبات الليبي تنص على الإيذاء الجسيم بقولها يعد الإيذاء الشخصي جسيماً ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه إذا توافر أحد الطرفين الآتيين، إذا نجم عن الإيذاء مرض يعرض للخطر حياة المعتدى عليه أو يعرضه للعجز عن القيام بأعماله العادية مدة لا تزيد على أربعين يوماً. وإذا وقع الفعل على الحامل ونجم عنه تعجيل الوضع.

375 نفس المرجع، المادة ( 381 ) من قانون العقوبات الليبي تنص على الإيذاء الخطير بقولها يعد الإيذاء الشخصي خطيراً ويعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا نشأ عن الفعل مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه، أو فقد حاسة من الحواس أو إضعافها إضعافاً مستديماً ، أو فقد أحد الأطراف أو الأعضاء أو إضعافه إضعافاً مستديماً أو فقد منفعته أو فقد القدرة على التنازل أو صعوبة مستديمة جسيمة في الكلام ، أو تشويه مستلم في الوجه، أو إجهاض الحامل المعتدى عليها.

حيث يكون المتهم بريء فيها حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وحرية الإنسان وكرامته مصونة به قبل وقوع العقوبة عليه، حيث لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية، ومن الناحية النظرية تكون العقوبات مقترنه بالحرية الفردية وضمائنها واعتباراتها التي تعلو على كل اعتبار آخر. إذ أن ليس هدف الاجراءات الجزائية في هذه العقوبة اثبات الجرم على المتهم بل تقصي الحقائق أولاً، فيجب احترام حقوق المتهم فيها، فلا قيمة للحقيقة التي يوصل اليها على مذبح الحرية.

حيث لما كانت جريمة إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال من اكثر الجرائم انتهاكاً عن تفشيها من الناحية العملية، في بلد كان مهذاً للشرائع التي جرمت منذ اقدم العصور هذا النوع من الإساءات وحظرتة وعاقبت عليه في وقت كان وسيلة مشروعة، في شرائع لحقتها بعد الاف من السنين، وكانت مصدراً لكثير من القوانين المعاصرة، في بلدان تفتخر الان باحترامها لحقوق الانسان، ويضيف الباحث الى أهمية تلك العقوبات أن هناك العديد من علامات التعجب حول المواد التي عالج المشرع الجنائي الليبي فيها هذه الجريمة، فضلاً عن النص المباشر عليها، ولذلك لازال العمل قائم في البحث وتقنين قوانين جديدة طالتها بالتعديل ولم تبحث بعد، والتي نأمل الوقوف طويلاً عندها.

يرى الباحث أن عقوبة جريمة الإيذاء في هذه الجريمة تقوم على ركنها المادي الذي قوامه سلوك الجاني المتمثل بالضرب أو الجرح، والذي يؤدي إلى المساس بسلامة جسم المجني عليه، وقيام رابطة سببية بين فعله والنتيجة المترتبة عليه وعلى القصد الجنائي الذي يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل.

#### 4\_ عقوبة جرائم سوء استعمال وسائل الاصلاح أو التربية في منظور الفقه الإسلامي

من مزايا الفقه الإسلامي أنه تشريع واقعي يتعامل مع واقع البشر ويسع جميع تصرفاتهم بأحكامه المنصوصة في الكتاب والسنة، أو المستنبطة منهما بطريقه من طرق الاستنباط والاستدلال، وليس منهجاً صورياً بعيداً عن الواقع، ومن هنا وسعت قواعده وضوابطه كل جديد من الأحداث والتصرفات، وعمت بكليتها كل مكان وزمان.

#### أ)\_ عقوبة السجن وطبيعته عند الفقه الإسلامي

السجن لغة : بالكسر على الموضع، وبالفتح على المصدر، ومادة السجن تدل على المنع،<sup>376</sup> حيث قال الله تعالى في قصة سيدنا يوسف ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ .<sup>377</sup>

حيث أن أول من عرف السجن اصطلاحاً هو شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى قيل أن كل من أتى بعده نقل التعريف عنه، لكن الباحث في هذا الصدد يرى أن ابن حزم سبق ابن تيمية، حيث ذكر تعريف السجن في كتابه الاحكام فقال : السجن: منع المسجون من الأذى للناس أو من الفرار بحق لزمه وهو قادر على أدائه.<sup>378</sup>

376 هشام بن أحمد الوقشي الأندلسي، التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، المحقق، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الجزء 2 ( بدون تاريخ نشر، ط1، ) 33 .

377 سورة يوسف - الآية : 33

378 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الأحكام في أصول الاحكام، لمحقق، أحمد محمد شاكر، الجزء 2 ( دمشق : دار الآفاق الجديدة، ط2، 1403هـ، 1983م ) 462 . شيخ الإسلام ابن تيمية ( المتوفى 728 هجري ) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم ( المتوفى 465 هجري ) ينظر محمد بن عبد الله الجريوي، السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية مقارناً بنظام السجن والتوقيف وموجباتهما في المملكة العربية السعودية، الجزء 1 ( السعودية : جامعة الإمام الإسلامية، بدون تاريخ نشر ) 37 .









فإن طبيعة السجن في الإسلام يكون كعقوبات تعزيرية إصلاحية، ليست محتمة في كل حال، وليست وسيلة إيذاء وانتقام.

#### هـ) \_ بدائل السجن ومشروعيته عند الفقه الاسلامي

بحث الفقهاء المعاصرين على بدائل للسجن في عقوبات الجرائم المتعلقة بالأسر، والتي لها وصف عقوبة التعزير، واتفقوا أن البديل الوحيد لها هي عقوبة التعزير، فهي تتفرد داخل اسمها، والأصل فيها ثبوت شرعيتها إجمالاً، من الكتاب والسنة والإجماع، ويزيد طائفة من الأصوليين بقولهم أن السجن باب من أبواب المصلحة المرسلة، وإذا استعملت عقوبة التعزير كبديل لعقوبة السجن لا حرج فيه إذ لم يوجد في ذلك نص خاص قولي أو فعلي .<sup>386</sup>

ويرى الباحث أن سبب بحث الفقهاء عن بدائل السجن في هذا العصر هو طغيان استعمال السجن على جل الجرائم، حتى أصبح التعزير منحصراً فيه غالباً، وأصبح السجن أسهل طريقه لردع الجاني، حيث لم تكتفي القوانين بذلك فقط، حيث قد ذهبت أغلب القوانين الى أبعد من ذلك عند النطق بالحكم مع الأعمال الشاقة للمحكوم، وبذلك يكون ذلك الحكم إجحاف لهذا السجين مما يؤثر في نفسيته لتصبح ليست رادعة له فقط، وإنما مسببه له أزمة نفسيه قد يعانى منها ما بعد خروجه من السجن، وبذلك يرى الباحث بأن الحكم بالسجن مع الأعمال الشاقة يعتبر شيء تعسفي لم يتم يرد عند جمهور الفقهاء ولا في الشريعة الإسلامية .<sup>387</sup>

386 البدائل: جمع: بديل، على غير القياس الصربي، والبديل في اللغة: ما يخلف الشيء ويقوم مقامه ، وقد عرفه من أعد مشروع بدائل السجن المقترح في وزارة العدل المملكة العربية السعودية بأنه : مجموعة من التدابير التي تحل محل عقوبة السجن وتعمل على تطبيق سياسة منع الجريمة ويمكن الإتيان بتعريف قريب إلى تصرفات الفقهاء فيقال: بدائل السجن اصطلاحاً : ما يحل محل السجن في تحقيق المصلحة الشرعية للفرد والجماعة من عقوبات التعزير . مشروع بدائل السجن المقترح، إعداد وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، 3 .

387 عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، نثر البنود على مراقي السعود، الجزء 2 ( بدون تاريخ نشر) 185 .



في وجوب أن تكون عقوبة التعزير بديل من بدائل السجن، وتصل مدة عقوبة السجن في الشريعة الإسلامية الى المؤبد حسب جسامه الفعل.

يتفق الباحث مع القانون الليبي في كون المشرع حدد مدة السجن المؤبد بخمسة وعشرون سنة بخلاف القتل الغير العمد نتيجة اهمال أو تقصير وهي ثمانية سنوات، وتعتبر الخمسة والعشرون سنة من عمر الإنسان كافية لعقابه.

يرى الباحث بأن الفقه المعاصر الذي يحث على بدائل عقوبة السجن في الجرائم المتعلقة بالأسر هو الأقرب للترجيح باتفاقهم، كون البديل الوحيد للسجن التعزير، وبالتالي فإنها تتفرد بها والأصل فيها ثبوت شرعيتها إجمالاً من الكتاب والسنة والإجماع، حتى إن بعضهم قال أن السجن باب من أبواب المصلحة المرسله، وإذا استعملت عقوبة التعزير كبديل لعقوبة السجن لا حرج فيه إذ لم يكن عندهم في ذلك نص خاص قولي أو فعلي، وينتقد الباحث الفقهاء المعاصرين في كونهم لم يتطرقوا الى حجم نتيجة الفعل بخلاف القانون الليبي الذي نص ما اذا نتج عن الفعل الموت عوقب بثمانية سنوات.

الباحث يرى بأن المالكية والشافعية والحنفية لهم الرأي الراجح في أن الحكمة من شرع السجن في هذه الجريمة هي الحكمة من شرع العقوبات التعزيرية بصفة عامة، إذ تعتبر فرد من أفرادها، وجميع العقوبات إنما شرعت للمحافظة على نظام الكون بحفظ مصالح الخلق التي لا تقوم حياتهم إلا بإيجادها وتأمينها، ودفع الفساد والإفساد عنها، بخلاف الرأي الذي ذهب اليه الحنابلة، وبالتالي يستند الباحث على القول الراجح بأن عقوبة السجن في تلك الجرائم تعتبر من الوسائل الإصلاحية وليست من الأشياء المحتممة على كل حال.

## 5\_ عقوبة جرائم إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال في منظور قانون العقوبات الليبي والفقه الإسلامي

ينص قانون العقوبات الليبي " الجرائم العامة " بأن : يعاقب بالحبس كل من أساء معاملة أحد أفراد أسرته أو صغير دون الرابعة عشرة أو أي شخص آخر خاضع لسلطته أو معهود إليه به لتربيته أو تثقيفه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن، وإذا نجم عن الفعل أذى شخصي زيدت العقوبة بقدر النصف فإذا نجم عنه الموت كانت العقوبة السجن.

المادة المكررة " أ " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة شهر بعد التنبيه عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

حيث إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

المادة مكررة " ب " بأن : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً، كل من امتنع عن تسليم صغير إلى من له الحق في طلبه بناء على حكم قضائي أو قرار صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك كل من خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى الحكم أو قرار حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه. وحيث تعتبر جميع المواد اللاحقة والمكررة لهذه المادة مكمله لها في مضمونها وبذلك نصت المادة التالية على ما يلي :



المادة المكررة " ج " بأن : لا تقام الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المواد 396 و 397 و 398 مكررة " أ " و 398 مكررة " ب " إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر .<sup>388</sup>

من خلال هذه النصوص والمعطيات يمكن تحليل العقوبات التي تصدر عن جرائم إساءة معاملة أحد أفراد الأسرة والأطفال وفق القانون الليبي كما هو في الآتي :

جميع المواد السابقة اشتركت في عقوبة الحبس، والحكم بانقضاء الدعوة بالتنازل من طرف المجني عليه وهذا ما تم تحليله في المطلب الأول من هذا المبحث من حيث الفقه والقانون ولن يتطرق الباحث اليه مجدداً باعتباره يحمل نفس الوصف والتكيف القانوني.

بخلاف الفقرة الأولى التي اشتركت في الحبس والسجن ما بين التشديد والتخفيف وهذا ما حمله الباحث في الفقرة الثانية فهي تحمل نفس الوصف والتكيف القانوني الذي ينص على عقوبة السجن بشرط أن ينجم عن الفعل أذى شخصي فإذا نجم عن الفعل الموت كانت العقوبة السجن مدة يحددها القانون.

أما ما جاء في المادة " 398 " مكررة " أ " في عقوبة دفع النفقة بعد صدور حكم نهائي فاكتفى المشرع الليبي بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتان، ولكن وضع المشرع هنا شرط للإيقاف تنفيذ العقوبة بعد تأدية المحكوم عليه بتقديم كفيل له، يقبله صاحب الشأن، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة بنصها، وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة عليه.

388 قانون العقوبات الليبي، الجرائم العامة، المادة 398، والمواد المكررة لها (أ) (ب) (ج)

أما ما جاء في المادة " 398 " مكررة " ب " في عقوبة الامتناع عن تسليم صغير إلى من له الحق في طلبه، بناء على حكم قضائي أو قرار صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك كل من خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى الحكم أو قرار في حق حضانته أو حفظه، ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه، حيث نصت عليها المادة بعقوبتين، الحبس والغرامة، وقد تطرق لهما الباحث في المطلب الأول في هذا المبحث قانونياً وفقهياً، وبنفس الوصف والتكيف القانوني.

في جميع الأحوال لا تقام هذه الدعوى وفق ما جاءت به المادة " 398 " مكررة " ج " إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر وهو المجني عليه، وبذلك نصت المادة بأن لا تقام الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المواد 396 و 397 و 398 مكررة " أ " و 398 مكررة " ب " إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.

الباحث في هذا الصدد يدعم بحثه ويرفق دعوى وحكم صادر عن محكمة سبها الجزئية " ليبيا " مدينة سبها والمتعلق بجريمة إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال، وحيث من خلال هذا الحكم، يؤكد الباحث بأن القانون الليبي يعاقب بتلك العقوبات ما بين الحبس والتعزير، وانقضاء الدعوى بالحكم بتنازل الطرف المتضرر، رغم أنه يخالف الشريعة الإسلامية في بعض نصوصه، غير أن الأمر مفوض فيه للقاضي بين الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبة، بحيث يراها من منظوره ويقدرها من حيث الشريعة في رأيه، وهذا بما يسمى " السلطة التقديرية للقاضي في ليبيا " فمن غير المعقول أن ينص القانون على عقوبات بشكل عام، ومن ثم يترك للقاضي سلطته تقديرية في الاختيار، ولو افترضنا على سبيل المثال، أن هذا الأمر لا حرج فيه إذا لقال الناس، فلان حكم عليه القاضي بعقوبة أقل، وفلان لم يحكم عليه القاضي، وفلان حكم عليه القاضي بعقوبة مشددة، وبالتالي سيدخل الشك في قلوب الناس ومن المحتمل أن يفقد القاضي إحدى الشروط المترتبة عليه، الا وهي العدول.





## 6\_ آراء العلماء والمفكرين في مسألة العقوبة في تلك الجرائم

إن الجرائم والعقوبات بجميع أنواعها والتي أقرتها القوانين الوضعية ينعكس مداها على العديد من الأشخاص، ولها من الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية ما تأثر به على الفرد والأسرة والمجتمع، مما دفع بالكثير من العلماء والمفكرين إلى التوجه لتطبيق العقوبات البديلة عن السجن والحبس والغرامة وغيره، وخصوصاً عقوبة الفعل الذي يتنافى مع نظام الأسرة السليم، أو ما يسمى في بعض الأدبيات بعقوبة الجرائم المرتكبة على الأسر، وخاصة في الجرائم والمخالفات التي تقع لأول مرة، أو من الفئات العمرية الصغيرة؛ إلا أن التوسع في تطبيق هذه العقوبات البديلة لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن العقوبات الأصلية، حيث أن المجتمع الليبي مازال محدوداً، كونه لا توجد لائحة تنفيذه لمثل هذه العقوبات، وأن القضايا التي حكم فيها بعض القضاة على بعض الأشخاص بعقوبات بديلة إنما هو اجتهاد شخصي منهم .

قد كان للمفكرين والعلماء دور مهم في تفسير بعض النصوص في مسألة العقوبات مما انعكست إيجاباً على الواقع الاجتماعي، وبالتالي أصبحت تدور حول آراء القضاة والضباط والأخصائيين الاجتماعيين بخصوص تلك الجرائم والعقوبات الأصلية، حيث أن معظم القضاة في ليبيا لا يضعون العقوبات البديلة ضمن أولياتهم، بينما الضباط يضعون العمل لمصلحة المجتمع في المرتبة الثانية من الأوليات، بينما الأخصائيين الاجتماعيين يضعون عقوبة العمل لمصلحة المجتمع، في المرتبة الأولى للتفضيل على باقي العقوبات .<sup>390</sup>

390 عبدالله عبدالعزيز اليوسف، آراء القضاة والعاملين في السجون نحو البدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية ( السعودية : مؤسسة الملك خالد الخيرية، ط1، 2006م ) 232-240 .

يرى المفكرين أن العقوبات المعاصرة والتي للقاضي سلطه تقديره فيها، لها من الميزات ما يجعلها رائدة، ومتفوقة على غيرها من العقوبات الأصلية، والتي تحمل في طياتها آثار اجتماعية ونفسية على الأسرة وعلى المجتمع الذي يعيش فيه الشخص، ويرى المفكرون أن لنجاح العقوبات البديلة في المجتمعات المعاصرة من الممكن أن يتحقق بها المنفعة العامة، وذلك مرهون بوجود نظام واضح للتنفيذ، والمتابعة، وكذلك وجود وعي ممن سوف تطبق عليه العقوبة، وأهم من ذلك مدى وعي وتقبل المجتمع لمثل هذه العقوبات، كون هذا الأمر يتطلب التعاون بين أفراد ومؤسسات المجتمع.

يرى الباحث بأن العلماء والمفكرين يأخذون بمعايير عند استنباط العقوبات الجديدة، ويراعى فيها آراء المختصين القضاة والعاملون بالمؤسسة الإصلاحية، والعاملون في اللجنة الوطنية لرعاية الأسر في تطبيق العقوبات الغير أصلية، لتحقيق المنفعة العامة ولو خالفت الشريعة الإسلامية في مضمونها .

حيث ومن أحد المفكرين، المفكر ثامر بن سعيد عبد الله الغامدي والذي يرى بأن الاتجاهات الحديثة في السياسة العقابية أصبحت تتماشى مع التغيرات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية السائدة في العالم، حيث عمدت كثير من الدول لتطوير وإلغاء بعض العقوبات السالبة للحرية، وخصوصاً ما يتعلق بالمسجونين لمدد قصيرة، أو في الجرائم المتعلقة بالأسر واستبدال عقوبة السجن إلى عقوبات أخرى، مثل: وقف تنفيذ الحكم، والعقوبات المالية، والتعهد والكفالة، والعمل للمنفعة العامة، وغيرها من العقوبات البديلة الأخرى .<sup>391</sup>

حيث أن العقوبات السالبة للحرية وخصوصاً عقوبة السجن وغيرها من العقوبات المعمول بها في أغلب دول العالم، تعتبر في مضمونها من العقوبات التي لها آثار

391 ثامر بن سعيد عبد الله الغامدي، العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن دراسة اجتماعية ميدانية على عينة من المختصين ونزلاء المؤسسات الإصلاحية ( السعودية : جامعة الملك عبد العزيز، 2015م ) 3 .



سلبية على الفرد والأسرة وبالتالي على المجتمع وعلى الدولة ككل وتبين أن هذه العقوبات تعتبر عقوبات تقليدية ولها من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، نظرة السلبية دون النظر الى الشريعة الإسلامية.

ينتقد الباحث المفكر في كون أن العقوبات السالبة للحرية لم يعد يستعملها العالم تماشياً مع الواقع الحديث، ولكن إذا ما تأمل الباحث في القانون الليبي لوجد بأن تلك العقوبات مازالت هي السائدة في العالم، وخاصة في قانون العقوبات الليبي والمصري والجزائري وغيره، من قوانين الدول العربية، وهو ما تؤكد الإحصائيات المتعلقة بالوسط العقابي، ونظراً للسلبات المترتبة على هذه العقوبات تمثلت في تكس السجون للقاصرين، رغم أن زيادة إنفاق الدولة عليهم يؤثر سلباً عليها، إضافة لعدم جدوى الحد من تكرار العودة للجريمة للمساجين لفترات قصيرة، كل ذلك جعل هذه العقوبات قاصرة عما تهدف له السياسة العقابية الحديثة.

أما البعض الآخر من المفكرين فيرى في العقوبات بأنها مفهوم يجب أن يبحث عنه في الفكر القانوني الإسلامي المقارن وليس في أفكار حديثه ومعاصره تخالف المبدأ، والذي يكون بكون بعض العقوبات حق لله ولا يجوز تطويرها أو القاء التعديلات عليها بحجة تطور المجتمع، وهذا ما ذهب اليه المفكر، صبري محمد خليل، أستاذ الفلسفة بجامعة الخرطوم، حيث يرى بأن في القانون الجنائي الإسلامي قد وردت النصوص على العقوبات الحدية والقصاص ولا يمكن لأي شخص إدخال أفكار حديثه عليها، أما عقوبات التعزير الأخرى فلا بأس فيها لأنها لم ترد في الشرع، حيث للحاكم وحده من يقرر في الحكم بما يراه مناسباً في الجرائم التي لا حد فيها ولا كفارة ولا قصاص، حيث الفقه الإسلامي له العديد من القواعد التي تفيد حق الدولة في تبنى قواعد قانونيه معينة لتصبح ملزمة للناس.



## الباب الخامس

### النتائج والتوصيات

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، درس الباحث فيما سبق الجرائم الأسرية في القانون الليبي وكيفيةها في الفقه الإسلامي، وبين موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي منها، ودرس الباحث أيضاً، العقوبات المترتبة عليها، من حيث الفقه الإسلامي والقانون الليبي الوضعي، واتضح للباحث من خلال التحليل والمقارنة أن هذه الجرائم والعقوبات المفروضة عليها من الأنظمة الوضعية ليست عادلة أحياناً، لأنها جاءت لتحمي نفسها بالدرجة الأولى ومن ثم مصالح الناس بالدرجة الثانية، وأثبت النظام الإسلامي التجربة الناجحة في تنظيم أحكام الجرائم والعقوبات سواء منها الأسرية أو غيرها، وامتاز بأن الأسس التي يقوم عليها كفيلة بأن تقضي على العيوب التي تصحب العقوبة الوضعية، كما هي كفيلة بأن توفر المجهودات التي تبذل لتخفيف أضرار هذه العقوبات والأموال الكثيرة التي تنفق في سبيل تنفيذها.

#### أ. نتائج البحث

##### 1\_ النتيجة المترتبة على السؤال الأول

أ)\_ جريمة التقصير في القيام بالواجبات العائلية، إستنتج الباحث بأن هذه الجريمة تقع وفق القانون ما قبل بلوغ القاصر الى السن القانونية، وهذا ما يخالف الرأي الراجح في الفقه الإسلامي، الذي تتحقق فيها تلك الجريمة ما قبل وبعد سن البلوغ، ويعتبر واجباً على رب الأسرة الأنفاق على أبنائه في الحالتين، وعدم التقصير في حقهم.





بدائل السجن في هذه الجريمة، حيث إذا نتج عن هذه الجريمة الموت، فللقاضي هنا سلطة تقديرية في تحديد الحد الأعلى والأدنى للعقوبة.

(ج) - عقوبة جريمة إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال، حيث إستنتج الباحث بأن قانون العقوبات الليبي أعطى للقاضي سلطة تقديرية بالحكم في مقدار العقوبة الأدنى والتي يراها مناسبة في رأيه عند وقوع هذه الجريمة، وجاء هذا الرأي موافقاً للمبدأ أو للرأي الراجح عند فقهاء الفقه الإسلامي، مع الأخذ بالمعيار الذي تنقضي فيه الدعوى بوقف تنفيذ الحكم فيها، ويكون ذلك بمجرد التنازل من طرف الشخص المتضرر، وعلى خلاف الرأي الراجح عند الفقهاء والذي يتم الوقف بتنفيذ الحكم فيها إما بالموت أو الجنون أو العفو أو الشفاعة.

#### ب. النظرية المترتبة على النتيجة

انتقد الباحث قانون العقوبات الليبي، كونه جعل الجرائم الأسرية جرائم جنائية تخالف الشريعة الإسلامية في بعض نصوصها، وبإدخالها تحت بند القانون الجنائي لحمايتها جنائياً، حيث من خلال المقومات التي أستند عليها الباحث في الإطار النظري، والمتعلقة بالوضع الاقتصادي للأسرة، وعدم اعتدال حجمها وعدم تكاملها، تبين للباحث فيها بأنها ارتكزت على عوامل مبنية على العرف والتقاليد الاجتماعية، وهذا ما يرى فيه الباحث بأن تلك الجرائم من المفترض أن تدخل تحت قانون الأحوال الشخصية الليبي، لأنه المشرع حين يحمي مصلحة ما داخل المجتمع، فإنه ينظر إلى مخالفة الفرد لواجبه في الطاعة والولاء لقانون الأحوال الشخصية، وليس لقانون الجرائم والعقوبات الجنائية، فالجرائم الأسرية تعتبر عصيان لأوامر قانون الأحوال الشخصية، وفي هذا يكمن تبرير تجريم المشرع لهذا الفعل أو ذلك الامتناع.







تصاحب العقوبة الوضعية، كما هي كفيلة بأن توفر المجهودات التي تبذل لتخفيف أضرار هذه العقوبات والأموال الكثيرة التي تنفق في سبيل تنفيذها.

### ج. التوصيات

أ)- من خلال الاحصائيات المعاصرة في ليبيا لسنة 2006 ميلادي، والتي دفعت الباحث الى الكتابة في هذا الموضوع والتي سجلت فيها أعلى نسبة تزايد لجرائم الاسر في ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة وذلك بتزايد معدلات الشكاوي والقضايا المحالة للنيابة العامة بهذا الشأن، يوصي الباحث السلطات الليبية بأن يتم تخصيص مناهج خاصة تدرس في الجامعات لتهيئة الشباب وتعريفهم بمدي خطورة هذه الجرائم أو إقامة حملات توعوية سنوية عبر وسائل الأعلام أو من خلال أئمة المساجد وغيرهم، للحد من تزايد هذه الجرائم التي تنتج عنها تفكك الأسرة وتعمل على انحراف الأبناء الذين هم عصب الحياة.

ب)- يوصي الباحث من خلال هذه الدراسة الهيئة المسؤولة في ليبيا على تعديل القوانين، بأن يتم إعادة النظر في بعض نصوص قانون العقوبات الليبي ومعالجة وتعديل بعض القصور فيه، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتشريع ضوابط قانونية وقضائية في التعامل مع أشكال العنف العائلي بطرق حضارية بحيث لا تؤثر في مستقبل الأسرة والاطفال، وبما يكفل حقوق الناس وبما يضمن للمجتمع أمنه واستقراره ويعمل على نموه وتقدمه، فيساعد على تكوين نظرة قانونية شرعية محدده لهذه الجرائم، وبذلك يسهل على الأسر فهم ما جاءت به الشريعة الإسلامية في ضوء هذا القانون.

ج)- يوجه الباحث عناية المشرع على أن يقوم بإصدار مذكرات مفسره لنصوص قانون العقوبات الليبي، والمتعلقة بالجرائم الأسرية، لكي يسهل على كل العاملين

بالعمل القضائي وأطراف القضية المعروضة أمام ساحات القضاء فهم النصوص ومدى تطابقها على مع تلك الوقائع.

د) \_ يوجه الباحث وزارة الشؤون الاجتماعية والقائمين عليها للعمل والاستفادة من الخبرات، وعقد اتفاقيات تعاون في هذا المجال، وما بين المنظمات المحلية والدولية تحت مظلة الواقع والبحث عن الحلول.

هـ) \_ يوجه الباحث الى أن يكون هناك نوع من التعاون المنظم بين وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية و الأوقاف في هذا المجال من حيث ربط عملها بمنظومه موحده تظهر الإحصائيات لكل فترة زمنية داخل الدولة الليبية بحيث يتم من خلالها معرفة أهم المشكلات ونسبة الجرائم الأسرية من حيث الارتفاع والانخفاض وسبل معالجتها وتقديم أنسب الحلول لها بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

أخيراً فإن هذا الموضوع، يعتبر من المواضيع المهمة التي تلامس حياة الناس وواقعهم، وهذا ما أتمنى أن يوفقني الله فيه، فما كان فيه من صواب فسيكون من الله، وما كان فيه من خطأ فسيكون من نفسي ومن الشيطان، وأشكر كل من لديه ملاحظة أو استدراك أو تقويم .

والله ولي التوفيق









حلس، داوود بن درويش، دليل الباحث في توضيح وتنظيم البحث العلمي في العلوم السلوكية، الرياض : إدارة التعليم، 2006م .

حمداوي (ال)، عبد الكريم مطيع، حد السرقة بين الفهم والتطبيق، مصر : دار المعارف.

حيلي (ال)، وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، لبنان : دار الفكر المعاصر، ط2، 1418هـ.

حضيرى (ال)، سالمه محمد عبدالقادر، التوافق الزوجي وعلاقته بتنشئة الأطفال، رسالة ماجستير، ليبيا : جامعة سبها 2009م.

حديثي (ال)، فخري عبد الرزاق، قانون العقوبات القسم الخاص، العراق : مطبعة الزمان بغداد، 1992م .

حنفي (ال)، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار، الجزء4، لبنان : دار الفكر، ط1، 1412هـ، 1992م.

خليل، أحمد محمود، الوسيط في تشريعات محاكم الأسرة للمسلمين وغير المسلمين، مصر : المكتب الجامعي الحديث، 2008م.

خلاف عبد الوهاب، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، الكويت : دار القلم، 1970هـ .

خضر، عبدالفتاح، الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقهاء الإسلامي، السعودية : مطبعة معهد الإدارة العامة، 1985هـ.

خضر، أحمد إبراهيم، الملامح العامة للمنهج الوصفي، الجزء1، مصر : مطبعة الإسكندرية، 1434هـ.

- خطابي (ال)، أبو سليمان الخطابي، تحفة الأحوزي في شرح جامع الترمذي، المحقق، محمد راغب الطباخ، ط1، 1351هـ، 1932م.
- دراعم، محمد عبدالمنعم عطية، أثر الظروف في تخفيف العقوبة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، فلسطين : جامعة النجاح، 2006م.
- دراغمة، وسيم ماجد إسماعيل، الجرائم الماسة بالأسرة، رسالة ماجستير، فلسطين : جامعة النجاح، 2011م .
- دسوقي (ال)، محمد بن أحمد بن عرفة، الفقه المالكي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء6، دمشق : دار إحياء الكتب العربية.
- دمشقي (ال)، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين دمشقي الحنفي، رد المختار على الدر المختار، لبنان : دار الفكر، ط2، 1412هـ، 1992م.
- دولة (ال)، عصمت سيف، العروبة والإسلام، سلسلة الثقافة القومية، الجزء6، سوريا : مركز دراسات الوحدة العربية.
- رمضان، عمر سعيد رمضان، بين النظريتين النفسية والمعياري والإثم، مجلة القانون والاقتصاد، 1964م.
- رازي (ال)، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، معجم اللغة العربية مختار الصحاح، مصر : دار الحديث، 1424هـ، 2003م.
- زريفة، رشا بسام إبراهيم، عوامل استقرار الأسرة في الإسلام، رسالة ماجستير، فلسطين : منشورات جامعة النجاح، 2010م.
- زير (ال)، ناريمان الزير، محامية صحيفة الثورة يومية سياسية، تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطبع والنشر والتوزيع، احكام الوصاية الشرعية.
- زرقا (ال)، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، الجزء1، دمشق : دار القلم، 1418هـ.



سباعي (ال)، عماد فتحي، النظرية العامة للأعذار المغفية في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، مصر : كلية الحقوق، 1986م.

سعدي (ال)، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الجزء5، بيروت : دار ابن حزم، ط1.

سريتي (ال)، محمد أحمد، منهج البحث العلمي، الجزء1، السعودية : مكتب المروة للخدمات العلمية مكة المكرمة، 1436-1437هـ.

شمس الدين، محمد بن محمد الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، بيروت : دار الفكر 1415هـ.

شلبي، محمد مصطفى شبلي، أحكام الاسرة في الاسلام، مصر، دار النهضة العربية، 1977م .

شاطبي (ال)، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، كتاب الموافقات، المحقق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الجزء1، بيروت : دار ابن عفان، ط1، 1417هـ، 1997م.

شاذلي (ال)، فتوح عبد الله، شرح قانون العقوبات، مصر : دار المطبوعات الجامعية، 2001م.

شافعي (ال)، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، المحقق، قاسم محمد النوري، السعودية : دار المناهج، ط1، 1421هـ، 2000م.

شافعي (ال)، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج الى معرفة معنى الفاظ المنهاج، الجزء1، بيروت : دار الكتب العلمية، 1445هـ، 1994م.

شرباصي (ال)، أحمد الشرباصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي، بيروت : دار  
الجيل، 1401هـ، 1988م.

شنقيطي (ال)، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، نثر البنود على مراقبي  
السعود، الجزء2، السعودية : دار الملك فهد.

شاوي (ال)، سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات،  
الكويت، مطابع الرسالة الكويتية، 1982م.

شوكاني (ال)، محمد بن علي، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، خزنة  
الفقه الشافعي، كتب أدلة الأحكام، مصر : دار الحديث، ط1، 1413هـ، 1993م.

صغير، عبد الله بن علي، سيرة أئمة المذاهب السنية وأصولهم الفقهية، السعودية :  
بدون سنة نشر وطباعة.

صيني، سعيد إسماعيل، قواعد أساسية في البحث العلمي، السعودية : شبكة  
الألوكة، ط2، 2010م.

صلاحي (ال)، علي، الحركة السنوسية في ليبيا وسيرة الزعيمين محمد ادريس  
السنوسي وعمر المختار، مصر: المكتبة العصرية، 1428هـ، 2007م.

صنعاني (ال)، محمد بن إسماعيل بن الأمير صنعاني، سبل السلام شرح بلوغ  
المرام من أدلة الأحكام، المحقق، مصطفى الباز، الجزء3، مصر : مكتبة المعارف،  
1427هـ، 2006م.

طبراني (ال)، أبو القاسم سليمان بن أحمد المعروف، المعجم الأوسط، مصر:  
مكتبة المعارف، ط1، 1405هـ، 1985م.

عابدين، ابن. محمد أمين بن عمر ابن عابدين، فروع الفقه الحنفي رد المختار  
على الدر المختار، الجزء5، بيروت : دار الكتب العلمية، 1412هـ، 1992م.



عبدالواحد، مصطفى عبدالواحد، كتاب الأسرة في الإسلام، مصر : مكتبة المتنبئ  
القاهرة، ط1. 2006م.

عبيد، حسنين إبراهيم صالح، الوجيز في علم الإجرام والعقاب، لبنان : دار النهضة  
العربية.

عبدالعزيز، سعد عبد العزيز، الجرائم الواقعة على الأسرة، تونس : الدار التونسية  
للنشر، ط2. 2007م.

عبدالخالق، جلال الدين، الجريمة والانحراف الحدود والمعالجة، بيروت : دار  
المعرفة الجامعية. 2003م.

عبدالله، نوري سعدون، العوامل الاجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة، دراسة  
ميدانية لأثر العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، العراق : كلية  
الآداب قسم علم الاجتماع، منشورات جامعة الأبيار بمدينة الرمادي.

عبدالله، ذكريات أحمد، دور العائلة في الوقاية من الجريمة، دراسة ميدانية  
البحرين: المركز الإعلامي الأمني، 2010م.

عبدالله، مرقس رابي، العوامل الأسرية للجريمة، دراسة ميدانية، بغداد : دار الرافدين،  
1427هـ، 2006م.

عبدالواحد، مصطفى عبدالواحد، المجتمع الإسلامي، القاهرة : مؤسسة الكتاب  
المصري، 1984م.

عبدالمنعم، سليمان عبدالمنعم، أصول علم الإجرام والجزاء، لبنان : المؤسسة  
الجامعية للدراسة 1996م.

عطية، جمال الدين، التنظير الفقهي، الجزء1، الدوحة : مكتبة الإسكندرية، ط1،  
1407هـ، 1987م.





قانون العقوبات الليبي، الجرائم العامة، ليبيا : الجريدة الرسمية، 14 محرم  
1373هـ، 1953م،

قليوبي، وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين،  
الجزء4، سوريا : مصطفى البابي الحلبي، ط3، 1375هـ، 1955م.

قاسم، محمد زكي الدين محمد، رجال ومناهج في الفقه الإسلامي، الأئمة الأربعة،  
الكويت : مطابع الكويت. 2003م.

قدامة، ابن. موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني الفقه المقارن، الجزء12،  
مصر : دار إحياء التراث العربي، ط1، 1405هـ، 1985م.

قيم، ابن. (ال) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، إعلام  
الموقعين عن رب العالمين، المحقق : محمد عبد السلام إبراهيم، الجزء2، القاهرة :  
دار الحديث، ط1، 1411هـ، 1991م.

قيم، ابن. (ال) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، الطرق  
الحكمية، الكويت : مكتبة دار البيان.

قرطبي (ال)، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري  
المتوفى 456هـجري، المحلى بالآثار، الجزء8، بيروت : دار الفكر. 1996م.

قرطبي (ال)، عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  
المحقق، عماد زكي البارومي وخيري سعيد، الجزء5، المغرب : المكتبة التوفيقية.

قوسي (ال)، مناهج البحث التربوية بين النظرية والتطبيق، الكويت : مكتبة الفلاح  
2012م.

قرشي (ال)، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، القرشي، ضياء  
الدين، معالم القرية في طلب الحسبة، الجزء1، بريطانيا : دار الفنون كمبردج.







موسوعة (ال)، الحرة ويكيبيديا، شبكة المعلومات الدولية.

نووي (ال)، يحيي بن شرف أبو زكريا، شروح الحديث شرح النووي على مسلم،  
الجزء 1، السعودية : دار الخير، 1416هـ، 1996م.

وريكات (ال)، محمد عبدا لله، أصول علمي الأجرام والعقاب، الأردن : دار وائل،  
ط1، 2009م.

وسيط (ال)، مجموعة علماء المعجم، مجمع اللغة العربية، الجزء 2، مصر : دار  
المعارف، 1393هـ، 1973م.

يوسف (ال)، عبدالله عبدالعزيز، آراء القضاة والعاملين في السجون نحو البدائل  
الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، السعودية : مؤسسة الملك خالد الخيرية، ط1،  
2006م.

يسر، أمال عثمان، علم الأجرام والعقاب، لبنان : دار النهضة العربية ط1،  
1980م.

Abdurrahman AlMuala, *Crime and Punishment in Islam*, ( part 1 of  
5): Published on 08 Mar 2006 , Last modified on 16 Oct 2011  
Printed: 1836.

Glossary of Legal Terminology, *English – Arabic* , (472 words)  
Ayman Khatib, *Arabic Interpreter and Translator*, Khalil Ansara,  
Arkan Rule of Law Team in West Bank and Gaza.

Arkan supporting, rule of Law reform , *Quarterly Progress Report*  
Arril – June 2007 ,Development. It was prepared by C hemonics  
International Inc , *This publication was produced for review by the*  
*United States Agency for International.*

Thomas Gary, *Education and theory, strangers in paradigms.*  
(2007) Press.

Broken Families, *Dreams and Hopes.*Published By Authorhouse  
.31-3-2017 .Patrick Conley. All rights reserved .

